

MODEL PENDIDIKAN ISLAM MASA DEPAN

BERITA INDONESIA[®]

September 2005

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



PEACE

for

Cahaya Damai di
ACEH

The Excellent Biography



TokohINDONESIA®
www.tokohindonesia.com



Sampul:
Eri Irawan

Foto:
penaindonesia.org

Nilai rupiah meluncur turun sampai ke level 12.000 per dolar AS, terendah setelah krisis moneter 1997. Banyak faktor telah menjatuhkan nilai tukar rupiah.

8 | PELANGI DAMAI DI ACEH

Kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, benar-benar disambut dengan penuh suka cita oleh bangsa ini, khususnya rakyat Indonesia yang hidup di tanah 'Tanah Rencong' itu, yang sejak lama merindukan kedamaian dalam kehidupan sehari-harinya.

- 11 Optimisme versus Pesimisme
- 14 Ada Saling Percaya pada Kedua Belah Pihak
- 16 Jangan Ada Lagi Darah Mengalir
- 17 Jangan Ada Dusta Antara TI/Polri dan GAM

Berita Opini

- 19 Berdamai Tanpa Prasangka

Berita Newsmaker

- 22 Dirut BUMN Pemberani

Berita Iptek

- 26 BBA Mulai Mendunia

Berita Peristiwa

- 28 Tahun Penuh Bencana

Lentera

- 34 Ma'had Al-Zaytun:
Model Pendidikan Islam Masa Depan
- 38 Pak Harto di Al-Zaytun Hadiah Paling Berharga
dalam Sejarah Ma'had Al-Zaytun

Berita Lingkungan

- 41 Tetangga Seberang Menuai Asap

Berita Pendidikan

- 42 Ijazah Palsu: Jalan Pintas Menjadi 'Terhormat'
- 44 Kurikulum 2004 Tanpa 'Pemberontak'

Berita Gaya Hidup

- 45 Simbol Solidaritas Gelang Karet

Lintas Media

- 46 Selalu Bimbang Ya?

Berita Politik

- 50 Lahirnya Tradisi Baru

Berita Khas

- 56 Rupiah yang Rapuh
- 58 APBN Terantuk Emas Hitam

Berita Mancanegara

- 60 Menyalakan Sebuah Sumbu

Berita Obituari

- 65 Berpulanginya Sang Begawan



8



56



34



42



60



28



46



26

- 20 | Berita Nasional
- 24 | Berita Nusantara
- 30 | Highlight Berita
- 32 | Karikatur Berita
- 48 | Lintas Tajuk
- 51 | Berita Hukum
- 53 | Berita Perempuan
- 54 | Berita Olahraga
- 59 | Berita Ekonomi
- 62 | Berita Budaya
- 64 | Berita Infotainment
- 66 | Berita Produk

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto

Redaktur:

Anis Fuadi
Nawawi
Haposan Tampubolon
M Udyiana Mulyadin
Sarjiman

Sekretaris Redaksi:

Retno Handayani

Staf Redaksi:

Henry Maruwas
Christian Natamado
M Subhan

Desainer Grafis:

Eri Irawan

Litbang, IT dan Pusat Data:

Mangatur Lorieclide Paniroy (Kepala)
Sanita Retmi
Wilson Edward (Fotografer)

Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publikasindoindo

Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/ Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:

Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Keuangan dan Umum:

Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:

PT Temprint
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:

redaksi@berindo.com
iklan@berindo.com

Website:

www.beritaindonesia.co.id



BERINDO/WILSON EDWARD

Crew BERITA Indonesia di Wisma Al-Islah.

Bagian dari Sejarah

Assalamualaikum Wr Wb,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Sidang Pembaca, kita mahfum perubahan adalah keniscayaan. Siapa yang tak ingin berubah pasti tergerus oleh perubahan yang selalu terjadi.

Prinsip demikian sangat kami pegang teguh, agar mampu menyajikan pilihan berita-berita terbaik di antara beragamnya lalu lintas berita di sekeliling kita. Semua isi **Berita Indonesia** tersaji dalam paradigma perubahan.

Kami memberi makna baru kepada setiap berita agar membawa perubahan ke arah kehidupan yang toleran dalam menyikapi perbedaan, progresif dalam memaknai demokrasi, dan damai di antara sesama anak bangsa.

Berangkat dari kekhawanan pada setiap semangat damai, kami mengangkat peristiwa terbesar di Aceh, berupa kesepakatan untuk berdamai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang notanya ditandatangani di Helsinki, Finlandia (15/8), dalam rubrik "Berita Utama".

Dalam kaca mata **Berita Indonesia**, damai Aceh merupakan upaya memanusiakan rakyat Aceh, yang selama hampir 30 tahun terakhir nyaris kehilangan harkat kemanusiaannya. Karena itu, **Berita Indonesia** memaknai kesepakatan Helsinki sebagai sebuah kemenangan rakyat Aceh. Bukan Pemerintah RI atau pun GAM.

Karena itu, masyarakat Aceh pun seharusnya lebih terbuka dan demokratis memaknai kehidupan barunya dalam bingkai NKRI.

Kali ini berita khas kami isi dengan laporan terbaru tentang perkembangan rupiah, dan pilihan pil pahit untuk harus menaikkan harga BBM secepatnya. Krisis energi sedang mengemuka, yang bisa-bisa berlanjut ke krisis ekonomi, sosial, politik dan buntutnya bisa-bisa krisis kepercayaan.

Sebelum mimpi-mimpi buruk berubah wujud jadi kenyataan, masih ada waktu bagi pemerintah menampilkan kepekaan tinggi terhadap penderitaan rakyat. Untuk dipahami, sejak pemerintahan SBY-JK memegang tampuk kepemimpinan nasional, **Berita Indonesia** mencatat: Sudah Banyak Yang Jadi Korban.

Di penguji Agustus silam, dalam tahap enam tahun aktualisasinya di jagat pendidikan nasional, kampus peradaban bersetting global Ma'had Al-Zaytun kembali menorehkan sejarah.

Pada Sabtu (27/8), Mendiknas Bambang Sudibyo meresmikan berdirinya Universitas Al-Zaytun (UAZ), wujud riil sistem pendidikan satu pipa (*one pipe education system*) yang diterapkan di lembaga "pesantren spirit but modern system" itu. Kami hadirkan berita itu di rubrik "Lentera".

Tak lupa, kami menghaturkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kecelakaan tragis yang menimpa pesawat terbang milik maskapai penerbangan, Mandala Airlines, di kawasan Padang Bulan, dekat Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara Senin (5/9), yang menewaskan ratusan orang.

Semoga amal-ibadah para korban berkenan di hadapan-Nya. Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, itulah yang memberikan penghiburan kepada setiap anggota keluarga korban.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

DAMAI, DAMAILAH ACEH

Proses damai di Aceh baru saja diawali dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, 15 Agustus lalu. Setidaknya ada tiga pandangan (pihak) yang mengemuka setelah penandatanganan kesepakatan damai itu.

Pertama, pihak GAM, masyarakat aceh dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam perundingan. Mereka ini berpandangan bahwa kesepakatan itu sebuah kemenangan dan memandang pihak yang tak sepaham sebagai pihak yang tidak setuju adanya perdamaian di Aceh.

Kedua, para pihak yang berketetapan bahwa NKRI adalah harga mati. Mereka, antara lain, TNI, sebagian pejabat pemerintah, masyarakat di Pulau Jawa dan umumnya daerah yang tidak menghendaki merdeka sendiri. Mereka ini berpandangan bahwa kesepakatan itu sebuah kekalahan dan sebuah pintu masuk terlepasnya Aceh dari NKRI. Mereka melihat perundingan GAM jauh lebih pintar.

Ketiga, pihak yang tidak mau tahu dan apatis. Mereka tidak ambil pusing apakah akibat kesepakatan itu, Aceh akan damai dalam kerangka keutuhan NKRI atau Aceh berdiri sendiri lepas dari NKRI. Termasuk di dalamnya mereka yang kurang percaya kesepakatan itu akan diimplementasikan dengan baik, tapi mungkin akan dipenuhi tipu daya.

Namun, pengelompokan ketiga pihak dan pandangan itu tidaklah bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif kecenderungan.

Maka dalam konteks ini, kita lebih bijaksana bersikap bahwa kesepakatan Helsinki itu sebagai awal proses damai di Aceh dalam kerangka keutuhan NKRI. Sikap ini dilandasi keyakinan bahwa



GAM dan Pemerintah RI akan mengimplementasikan kesepakatan itu secara jujur dan tulus di bawah semboyan 'bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh'.

Ya, ini adalah awal proses damai! Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengatakan masalah Aceh belum selesai meski kesepakatan damai telah ditandatangani. Presiden, ketika berpidato pada pembukaan *Foreign Policy Breakfast* menyambut HUT ke-60 Departemen Luar Negeri (Deplu) di Gedung Deplu, Jakarta, Jumat (19/8), mengatakan: "Jangan dianggap itu sudah selesai. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Banyak sekali tantangan. Oleh karena itu, kita harus sukseskan betul terminasi konflik di Aceh, dengan tetap menjadikan Aceh sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

Menurut Presiden, penyelesaian masalah Aceh, merupakan perpaduan dari langkah *hard power* (melalui senjata) dan *soft power* (diplomasi). Karena itu, segenap masyarakat diminta menyukseskan terminasi konflik di Aceh yang telah berjalan 30 tahun itu agar penuh kedamaian dan tetap menjadi bagian utuh NKRI.

Kita sependapat dengan pernyataan Presiden itu. Walaupun memang, haruslah diakui, bahwa butir-butir kesepakatan damai Aceh itu, yang perundingannya dilakukan secara tertutup itu, mengundang potensi yang lebih menguntungkan GAM. Seperti diperkenalkannya Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan hymne serta partai politik lokal. Termasuk Aceh berhak mendapatkan dana dari utang luar negeri dan berhak menentukan suku bunga berbeda dengan Bank Indonesia. Juga kewenangan DPRD Aceh untuk menyetujui atau tidak keputusan DPR tentang Aceh.

Beberapa butir itu memunculkan persepsi seolah-olah dengan adanya MoU itu, GAM bisa langsung menguasai semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Aceh. Ditambah lagi dengan kehadiran *Aceh Monitoring Mission (AMM)* yang dikesankan memiliki kuasa pengendalian di atas kedaulatan pemerintah RI.

Itulah tantangan, yang harus dijawab dengan bijaksana, terutama oleh pihak GAM, masyarakat Aceh dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam perundingan itu. Jangan malah bersikap arogan seolah benar sendiri, sehingga mengundang penolakan dari berbagai kalangan.

Kita berharap, proses implementasi kesepakatan damai itu bisa dilakukan dengan cerdas dan terampil, laksana menarik rambut dari tumpukan tepung. Rambutnya bisa dilepas, tapi tepungnya tidak berantakan. Untuk itu kerendahan dan ketulusan hati, tanpa penonjolan prestasi diri, sangat diperlukan. Sebab, sebagai bangsa beradab dan berdaulat, kita cinta damai! Damai, damailah Aceh! ■

Kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, benar-benar disambut dengan penuh sukacita oleh bangsa ini, khususnya rakyat Indonesia yang hidup di 'Tanah Rencong' itu, yang sejak lama merindukan kedamaian dalam kehidupan sehari-harinya.

Tak akan ada lagi kekerasan di bumi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang telah berlang-sung sejak 1975, membuat suasana selalu mencekam dan penderitaan bagi masyarakat NAD –berada di tengah-tengah konflik kekerasan antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata dari GAM.

Tak ketinggalan media massa daerah, nasional, dan media asing memberikan apresiasi mendalam, dengan mengangkat berita itu sebagai laporan utama (*headline*).

Surat kabar harian nasional paling terkemuka di Indonesia, *KOMPAS*, bahkan berani tampil berbeda dari biasanya. Sejak mula diterbitkan 40 tahun silam (1965), baru pada penerbitan 16 Agustus 2005 lalu, koran yang mengusung visi: "Amanat Hati Nurani Rakyat" itu menampilkan hanya satu 'berita pilihan' pada halaman depannya, 'Perdamaian RI-GAM', dan itu pun cuma satu kata yang dipilih sebagai judul berita: HELSINKI.

Kesepakatan damai yang tertuang dalam naskah berbahasa Inggris: "*Memo-randum of Understanding between The Government of Indonesia and Free Aceh Movement*", ditandatangani Ketua Tim Perunding Indonesia, Hamid Awaluddin, dan Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM, bertempat di Government Banquet

Hall, Etelaseplanadi 6, Helsinki. Ketua Dewan *Crisis Management Initiative* yang juga mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, ikut menandatangani selaku saksi.

Prosesi penandatanganan nota kesepakatan (MoU) itu disiarkan secara langsung oleh televisi dan mendapat liputan luas dari media massa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita serta sejumlah petinggi tinggi negara lain menyaksikan jalannya penandatanganan melalui siaran televisi di Istana Merdeka.

Ibukota NAD, Banda Aceh, sendiri ribuan masyarakat memadati halaman Masjid Raya Baiturrahman guna menyaksikan peristiwa bersejarah itu melalui pesawat televisi yang di tempatkan di sana.

"Tak ada lagi anak yang menjadi yatim, isteri kehilangan suami dan orang tua kehilangan anak. Tak ada lagi, dan tak akan ada lagi semua (penderitaan) itu," ujar Hamid Awaluddin usai menandatangani kesepakatan damai itu.

Bagi Malik Mahmud, penandatanganan kesepakatan damai itu adalah awal bagi penciptaan perdamaian bagi masyarakat NAD, yang selama ini hidup dalam suasana yang penuh ketidak-tentuan.

Dua anak berjalan di dekat bendera Merah Putih dan di bawah naungan pelangi di Takengon, Aceh Tengah, 19 Agustus 2005
(Foto: Acehkita.com)



PELANGI DAMAI



MAI DI ACEH

“Tugas terberat setelah penandatanganan ini adalah penerapan isi MoU tersebut. Karena jika penerapannya gagal, maka bukan tidak mungkin semua itu akan memicu penindasan,” ungkap Malik Mahmud.

Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga yang turut hadir langsung di Helsinki, seperti diberitakan *Suara Karya* (16/8), meminta semua pihak menghormati hasil perundingan dan mendukung pencapaiannya.

“Kami (DPR-red) akan mendorong hasil perundingan ini dilaksanakan dengan baik,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Beberapa konsekuensi dari kesepakatan damai itu yang mesti diimplementasikan, antara lain, penarikan pasukan nonorganik TNI dan Polri dari NAD, perlucutan dan pemusnahan senjata milik GAM, pemerintah Indonesia akan memberikan amnesti kepada seluruh anggota GAM dan pembentukan pengadilan HAM di Aceh.

Kritik

Upaya pemerintah menjalin kesepakatan damai di NAD dengan GAM tidak sepenuhnya disambut secara positif. Di

dalam negeri, kritik dan resistensi atas sejumlah butir kesepakatan mencuat ke permukaan, bukan hanya setelah MoU ditandatangani tapi juga bahkan sebelum ada kepastian ihwal butir-butir kesepakatan yang akan disepakati kedua belah pihak.

Sementara pihak menilai, pemerintah bertindak kebablasan. NKRI dipertaruhkan sebab kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada pihak GAM dianggap kontroversial.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Hariman Siregar, politikus PDIP Taufik Kiemas dan sejumlah tokoh politik lain mengkritik isi MoU tersebut.

Para tokoh yang mendeklarasikan Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu itu menilai MoU tersebut melanggar UUD 1945 dan sejumlah perundangan lainnya, dan mengkhawatirkan implementasinya dapat memicu perpecahan bangsa.

Dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menko Polhukam, Widodo AS, dan Menteri-menteri bidang Polhukam (31/8), kontroversi MoU dikritisi sebagian anggota Dewan.

Wakil Ketua Komisi I Effendi Choirie, misalnya, sempat membacakan surat yang konon dari juru runding GAM Bachtiar Abdullah kepada Hasan Tiro.

Seperti diberitakan *Republika* (1/9), dalam surat itu Bachtiar mengatakan MoU merupakan salah satu tahap untuk merdeka. Bachtiar juga menyatakan tim perunding RI masih bau “asam sunti” (bau kencur-red).

Mendengar isi surat yang dibacakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, para menteri hanya diam terpaku. Menkominfo, Sofyan Djalil, mengaku belum mendengar hal itu dan akan mengecek kebenarannya. Lepas dari pro-kontra itu, bagaimanapun semua pihak sepatutnya mendukung upaya mewujudkan suasana damai di NAD. Negeri ini di awal kemerdekaan RI banyak memberikan kontribusi. Pesawat terbang RI yang pertama, “Seulawah” adalah sumbangan rakyat Aceh. Alhasil, dengan kesepakatan damai ini — dengan tetap bernaung di bawah Negara Kesatuan RI— provinsi paling ujung di Barat ini dapat segera bangkit membangun diri, sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hakikatnya, damai di Aceh menyimbolkan damai Indonesia. ■ **RF, SP**



Seorang warga melintasi bendera Merah Putih yang tercabik-cabik di tenda pengungsian di Merduati, Banda Aceh.

ACEH BARU YANG DAMAI OPTIMISME VERSUS PESIMISME

Sebelum dan setelah penandatanganan kesepakatan damai RI-GAM, silang pendapat dan pro-kontra telah mencuat ke permukaan, dan masih menguat sampai kini. Akankah tercapai 'Aceh Baru' yang damai ?



Tiga lembar bendera "Bintang Bulan", dikibarkan di Desa Paloh Mampreh, Kecamatan Nisam, Sabtu (20/8). Warga mengaku tidak mengetahui siapa yang mengibarkan bendera GAM tersebut pasca-penandatanganan MoU kesepakatan damai RI-GAM. Pangdam Iskandar Muda Mayjen Supiadin AS yang sempat berkunjung ke sana, mengatakan pengibaran bendera GAM melanggar nota kesepahaman bersama (Mou) perdamaian Aceh.

Sebelum ditandatangani, tak banyak orang yang tahu, termasuk anggota DPR, bagaimana persisnya isi naskah kesepakatan damai RI-GAM. Begitu pun setelah ditandatangani, MoU yang memuat butir-butir kesepakatan secara mendetail ditandatangani menuai tanggapan dari banyak elit politik di tanah air. Ada yang mendukung, ada yang menentangnya.

Suara pendukung melontarkan optimisme bahwa perdamaian di Aceh akan segera tercipta. Sedangkan, pendapat menentang yang datang dari kalangan DPR, pengamat ekonomi, pengamat politik, dan tokoh-tokoh nasional berangkat dari kekhawatiran bakal terciptanya 'negara dalam negara', berkenaan dicantumkannya sejumlah pasal yang mengisyaratkan wewenang teramat besar dan sangat luas pada GAM untuk 'menguasai' Aceh.

Beberapa pasal yang dianggap kontroversial sebab potensial menimbulkan perpecahan negara dan melanggar sejumlah UU dan UUD 1945 tersebut, antara lain: soal dana reintegrasi (*reintegration fund*) berupa pemberian kompensasi berbentuk uang dan tanah kepada setiap mantan anggota GAM; pemerintahan Aceh berhak menetapkan sendiri tingkat suku bunga perbankan yang berbeda dengan ketentuan Bank Indonesia; serta pembentukan Pengadilan HAM di Aceh.

Selanjutnya, pasal-pasal yang menggarisbawahi bahwa keputusan DPR-RI yang terkait Aceh harus mendapat per-

setujuan dari DPRD Aceh; Aceh berhak menggunakan simbol-simbol bernuansa etnosentrisme seperti bendera, lambang, dan himne; Aceh berhak atas 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya di wilayah Aceh dan laut teritorial Aceh; pembentukan *Aceh Monitoring Mission* (AMM) dari Uni Eropa dan negara anggota ASEAN dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen kedua belah pihak pada nota kesepahaman; serta Aceh berhak membangun dan mengelola semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

Berikut ini adalah pandangan-pandangan baik yang pesimis (kontra) maupun yang optimis (pro) terhadap Kesepakatan Helsinki, sebelum dan sesudah ditandatangani, yang kami kutip dari berbagai media massa nasional dan daerah:

Suara yang Pesimis:

Soetardjo Soerjogoeitno, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP): Naskah MoU adalah embrio dari negara federal yang bertentangan dengan bentuk NKRI.

Tjahjo Kumolo, Ketua F-PDIP DPR: Kami meminta penjelasan pemerintah soal amnesti, partai lokal dan sistem pertahanan karena ketiga hal itu memiliki undang-undang yang tidak bisa begitu saja melewati DPR. Fraksi kami

tidak menolak perundingan untuk mencapai perdamaian di Aceh, tapi dengan tegas menolak internasionalisasi masalah Aceh. Karena secara global gelagat internasionalisasi masalah Aceh sangat jelas terlihat.

DR. Ikrar Nusa Bhakti, Pengamat Politik LIPI: Kompensasi harus diberikan kepada orang yang mempunyai hak tetapi merasa dirugikan. Karena itu, dalam konteks ini harus dipertanyakan mengapa GAM diberi kompensasi. Cara-cara penyelesaian konflik dengan kompensasi adalah cara-cara seorang pedagang dan bukan solusi seorang negarawan. Seorang negarawan tidak pernah menyelesaikan konflik dengan menawarkan berapa banyak (*how much*) uang yang dibutuhkan, tapi menyiapkan sebuah *road map* atau peta jalan damai untuk Aceh pasca penandatanganan Helsinki besok. Karena membuat perjanjian seperti Helsinki itu mudah, tapi *road map* apa yang akan dilakukan, apa implementasinya, itu yang sulit dan apakah pemerintah dan DPR sudah menyiapkan *road map* untuk Aceh pasca Helsinki?

Permadi, Anggota F-PDIP DPR: *Integration fund* sebenarnya gagasan yang baik, tapi proses untuk itu tidak langsung diberikan. GAM harus membuktikan lebih dulu bahwa mereka memang punya niat untuk kembali ke NKRI. Jika hanya asal diberikan maka akan

memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat Aceh yang selama ini setia pada NKRI. Mereka bisa saja berpikir lebih baik jadi separatist dulu baru kemudian kembali ke NKRI sehingga mendapat kompensasi.

Effendi Mara Sakti Simbolon, Ketua Pokja Pertahanan Komisi I F-PDIP DPR: Pemerintah terperangkap dan kebablasan dengan isi MoU. Dengan memberikan sejumlah jaminan kepada GAM, pemerintah telah membuka celah menuju referendum. Misalnya dengan partai politik lokal, pemerintah seperti memberi angin kepada GAM untuk melanjutkan perjuangan memerdekakan diri. Partai politik lokal adalah jaminan politik untuk menuju ke satu tahapan baru, yakni referendum.

Apapun hasilnya (MoU) kami anggap tidak ada. Kita akan mengajukan *judicial review* ke MK meminta keputusan sepihak pemerintah dibatalkan.

Saya heran kenapa Hamid (Hamid Awaluddin, Ketua Tim Perunding RI) begitu mudah menyetujui pemberian dana kompensasi. Kalau itu uang dia *sih* silahkan saja.

DR. Aviliani, Ekonom Indef: Nota kesepahaman di bidang ekonomi akan menimbulkan banyak dampak negatif. Dari sisi moneter, kebebasan menentukan suku bunga bagi Aceh yang berbeda dengan yang ditetapkan BI dapat memicu krisis. Konsesi yang diberikan pada Aceh terlalu mahal dan berbahaya, sebab bisa memicu kecemburuan daerah lain. Kontrol itu sangat penting. Lantas kalau nanti Aceh meminjam dengan utang luar negeri sendiri, apa jadinya. Kalau tidak bisa bayar, siapa yang bertanggungjawab. Pemerintah pusat, bukan? Nilai utang itu juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang nantinya.

Hasnan Habib, Pengamat Militer: Isi nota kesepahaman antara pemerintah dan pemimpin GAM tidak jelas, terutama yang terkait masalah pengadilan HAM untuk Aceh. Masalah pengadilan HAM pasti akan mendapat resistensi (penolakan) dari kalangan TNI.

DR. Adnan Buyung Nasution, Praktisi Hukum:

Ada sejumlah butir di dalam MoU yang membahayakan NKRI. Seperti, Aceh dibolehkan mempunyai hymne dan bendera sendiri, hak penentuan bunga bank sendiri. Hal-hal seperti itu akan memacu daerah-daerah lainnya untuk menuntut hal yang sama bahkan besar kemungkinan lebih dari itu. Perwakilan GAM yang menandatangani Mou di Helsinki tidak bisa dikatakan sebagai

representasi dari anggota GAM, apalagi masyarakat Aceh seluruhnya. Masih banyak tokoh GAM di Aceh yang tidak dilibatkan, apalagi masyarakatnya. Apa masyarakatnya setuju dengan MoU tersebut?

Benny K. Harman, Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat DPR:

MoU antara RI-GAM merupakan titik awal dibentuknya negara federal di Indonesia. Sebab, isi MoU tersebut akan menjadi preseden buruk bagi daerah-daerah lain untuk menuntut hak yang sama. Sadar atau tidak sadar pemerintah sebenarnya mulai membentuk negara federal.

Kiki Syahnakri, Mantan Wakil KSAD:

Sebagai prajurit saya merasakan MoU ini sangat menyakitkan. GAM yang separatist dapat tanah tiga hektar dan jaminan sosial, sementara TNI dapat apa? Banyak tentara yang gugur, kehilangan kaki dan tangan, tapi keluarganya dapat apa? Malah akan diajukan ke pengadilan HAM, makanya saya akan lawan.

Trimedy Panjaitan, Anggota Komisi III F-PDIP DPR:

MoU melanggar UUD 1945 dan 20 UU Indonesia lainnya. Misalnya poin 1.1.2 huruf c melanggar pasal 26 ayat (1) huruf a, UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.



Jenderal TNI Endriartono Sutarto.

Lalu poin 1.1.5, melanggar pasal 36 UUD 1945 khususnya tentang bendera. Masalah ini malah lebih dari negara federal, sebab negara federal di Amerika Serikat saja tidak memiliki bendera sendiri. Lalu, masalah partai lokal melanggar UU No 31/2002 tentang Partai Politik, poin 1.3.1 melanggar UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, poin 1.3.4 melanggar UU no 18/2001 tentang Otonomi Khusus NAD.

Mahfud MD,

Anggota Komisi III F-PKB DPR: Isi kesepakatan itu memunculkan wujud GAM secara nyata dan formal. Padahal, seharusnya dengan kesepakatan itu tidak ada lagi wujud GAM. Seharusnya GAM sudah habis. Sekarang dihidupkan lagi.

Anhar, Anggota Komisi III DPR:

Ketentuan dalam MoU poin 2 menimbulkan kekhawatiran terutama di kalangan TNI/Polri jangan sampai berlaku surut (retroaktif).

Drajad Wibowo, Anggota Komisi XI F-PAN DPR:

Sejumlah nota kesepakatan itu harus direvisi karena jika dilaksanakan bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan moneter nasional. Jika ada Bank Sentral Aceh yang mengatur suku bunga bank dan ada nilai tukar rupiah yang lain, artinya kedaulatan moneter sudah tidak di pemerintahan pusat.

DR. Faisal Basri, Ekonom:

Keputusan Helsinki memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada Aceh, khususnya Gerakan Aceh Merdeka. Pantas kalau GAM setuju.

Suara yang Optimis

Hamid Awaluddin, Menteri Kehakiman dan HAM:

Nota kesepahaman tidak memberikan kemerdekaan untuk GAM. Secara substansial, isi MoU mengambil materi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UU Otda dan UU Pemerintahan Daerah. Wajar kalau MoU itu dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Tapi, tidak tepat kalau dikatakan MoU itu akan memberikan kemerdekaan bagi



Agung Laksono.

GAM. Kurang tepat kalau dikatakan MoU itu sebagai suatu malapetaka. Soal bendera, lambang dan hymne itu sama sekali tidak terkait dengan kemerdekaan Aceh. Bendera, lambang, dan hymne lebih bersifat simbol kultural kedaerahan dan bukan simbol kedaulatan.

Sofyan A. Djalil, Menkominfo: TNI tidak akan dilibatkan dalam misi pemantauan hasil kesepakatan pemerintah dan GAM, atau *Aceh Monitoring Mission* (AMM). Senjata milik anggota GAM yang dilucuti akan langsung dimusnahkan.

Agung Laksono, Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG): Hak-hak sipil anggota GAM yang bertahun-tahun tinggal di hutan harus dipulihkan. Negara berkewajiban untuk berperilaku dengan baik.

Agun G. Sudarsa, Anggota F-PG DPR: Langkah yang dilaksanakan pemerintah selama ini menunjukkan banyak kemajuan. Perundingan yang dilakukan selama ini bukan antara pemerintah dan pemerintah, tetapi sebagai sesama warga bangsa. Aspirasi politik dan ekonomi, termasuk usulan tentang pembentukan partai lokal adalah hal yang wajar.

Endin AJ Soefihara, Ketua Fraksi PPP DPR: Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada pemerintah, dan



Sofyan A. Djalil.

berharap kesepakatan damai yang akan ditandatangani nanti dapat dilaksanakan secara komprehensif dalam wadah NKRI. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah setelah penandatanganan naskah adalah pemusnahan senjata GAM, yang dibarengi dengan penarikan pasukan TNI dari Aceh.

Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB: Dengan penandatanganan kesepakatan damai ini, persoalan Aceh dapat ditangani secara komprehensif. Akar persoalan di Aceh selama ini adalah kesejahteraan, dan itu yang harus dibenahi menyusul kesepakatan damai. Jangan seperti sekarang, tanggap darurat saja tidak selesai-selesai, gara-gara Menko Kesra ngurusi konflik partai terus.

Noernikmar, Tokoh Masyarakat NAD: Selama senjata gelap masih banyak beredar di tengah masyarakat, kecil kemungkinan daerah ini aman dan tenteram seperti diharapkan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah harus bijak dalam mengambil sikap, tidak hanya pintar dalam mengambil suatu keputusan. Kesepakatan perdamaian belum tentu dapat menjamin suatu kenyamanan dan keamanan di tengah masyarakat di NAD.

Mayjen TNI Supiadin AS, Pangdam Iskandar Muda: Proses penarikan pasukan nonorganik TNI dari NAD akan dilakukan dalam empat tahap. Untuk setiap pengumpulan 210 pucuk senjata api standar milik GAM, akan ditarik 25 persen pasukan TNI nonorganik. Kalau ada 840 senjata GAM, maka per tahap harus 210 pucuk senjata yang dikumpulkan. Dan ini akan sama dengan penarikan 8.500 pasukan TNI dari Aceh.

Ahmad Farhan Hamid, Anggota Fraksi PAN DPR: Program ini sepantasnya tidak hanya diberikan kepada anggota GAM saja. Masyarakat Aceh juga harus mendapatkannya. Mereka justru yang paling menjadi

korban atas konflik di sana.

Jenderal TNI Endriartono Surtarto, Panglima TNI: Kami berharap agar semua pihak di Aceh, termasuk GAM untuk tidak mengungkit kesalahan masa



Hamid Awaluddin.

lalu. Semua pihak di n t a untuk menatap masa depan agar masyarakat Aceh dapat membangun kembali daerah mereka. Kalau memakai asas retroaktif, dalam situasi seperti itu semua pihak melakukan hal yang sama. Kita juga punya bukti tentang kuburan massal korban kekerasan GAM. Untuk itu, kalau masa lalu di Aceh terus dibiarkan, persoalan di sana tidak akan kunjung selesai. Apalagi di satu sisi, seluruh

elemen masyarakat ingin membangun kembali agar dapat hidup normal.

Usman Hamid, Aktivis HAM dari KontraS: Pendapat sejumlah orang atau pihak yang mengatakan, pengadilan HAM hanya berlaku untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi pasca perjanjian damai ditandatangani, sangat keliru. Sebab, Indonesia yang dikenal sebagai satu-satunya negara yang memiliki pengadilan HAM nasional membolehkan digelarnya suatu pengadilan HAM untuk kasus masa lalu atau asas retroaktif. Pengadilan HAM dalam nota kepastian tidak diatur secara khusus dan masih bersifat umum. Karena itu pemerintah tidak perlu bingung menafsirkannya dan cukup menggunakan UU tentang HAM sebagai acuan.

Edwin Partogi, Aktivis HAM dari KontraS: Pelanggaran HAM di Aceh tidak hanya dilakukan oleh oknum TNI namun juga oleh oknum anggota GAM. Jadi kekhawatiran pemerintah yang menganggap TNI akan menjadi obyek dari pelaksanaan pengadilan HAM tidak beralasan. Hingga saat ini belum ada suatu keputusan pasti terkait penyelenggaraan pengadilan HAM di Aceh. ■ **AF, HT**

Ada Saling Percaya pada Kedua Pihak

Tokoh masyarakat Aceh, **Sulaiman AB**, mengaku gembira atas tercapainya kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan Pimpinan GAM, di Helsinki, Finlandia.

Dalam kaca mata mantan anggota delegasi Indonesia dalam perundingan dengan GAM di Genewa, Swiss, di era Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 ini, keberhasilan perdamaian RI-GAM di Helsinki berkat adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak terhadap satu sama lain.

Berikut petikan lengkap wawancara Presiden Komisaris PT. Bank Century Tbk. dengan wartawan *Berita Indonesia*, **Haposan Tampubolon** dan **M. Subhan**, pada satu kesempatan, belum lama ini.

Apa pandangan Anda tentang kesepakatan perdamaian RI-GAM yang telah ditandatangani di Helsinki, 15 Agustus 2005?

Sebetulnya saya juga pernah mengikuti dialog dengan GAM pada saat Presiden Abdurrahman Wahid. Justru pada saat Gus Dur lah pertama sekali dicanangkan untuk mencari solusi damai antara pemerintah RI dan GAM.

Ditandai dengan ditandatanganinya kesepahaman yang disebut waktu itu *joint of understanding* dengan GAM. Saat itu tahun 2000. yang kebetulan saat itu saya duduk sebagai salah satu anggota delegasi RI untuk berunding dengan GAM di Jenewa, Swiss.

Ada perbedaan tegas antara perundingan Jenewa dan perundingan Helsinki jika dilihat dari hasil yang dicapai?

Saya dapat mengatakan, ada perbedaan antara kesepahaman dan jeda kemanusiaan di zaman pemerintahan Megawati yang disingkat CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan) dan kesepakatan Helsinki di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono yang mengarah pada terciptanya perdamaian.

Saya memang dapat melihat secara jelas, perbedaan antara jeda kemanusiaan dan kesepakatan Helsinki. Sekali lagi saya katakan bahwa Helsinki mempunyai kualitas yang lebih tinggi dan satu hasil kesepahaman antara pemerintah RI

dengan GAM yang lebih berkualitas dibanding dengan jeda kemanusiaan dan CoHA.

Kenapa Helsinki berkualitas, karena anggota perunding yang duduk di pihak pemerintah RI itu adalah para menteri. Dulu saya hanya kolonel dengan empat kolonel lainnya. Wewenang memutuskan itu tidak ada. Kami harus melapor dulu ke atasan Polkam dan lain sebagainya.

Nah sekarang ini langsung oleh menteri yang diwakili oleh Menko Polhukam yang dikendalikan langsung oleh Wakil Presiden. Jadi, apapun yang akan diputuskan oleh Delegasi RI itu akan segera di putuskan.

Karena kesepakatan Helsinki adalah upaya yang ketiga kalinya, setelah Jeda Kemanusiaan dan CoHA, saya melihat ada jalinan atau rasa percaya yang lebih dari kedua belah pihak. Pemerintah RI percaya pada pihak GAM, sebaliknya GAM juga percaya kepada RI karena sudah ada pengalaman tiga kali perundingan serupa.

Bagaimana Anda memprediksi situasi di Aceh saat ini, dan masa depan Aceh, pascakesepakatan Helsinki?

Saya melihat, setelah penandatanganan kesepakatan di Helsinki, situasi di Aceh jauh lebih baik dari sebelumnya. Kedua belah pihak mampu menahan emosi dan menahan diri sehingga semua pihak termasuk juga masyarakat Aceh sendiri sangat menyambut baik perdamaian itu.



Sulaiman AB.

Pada saat kesepakatan Helsinki ditandatangani, saya tengah berada di Aceh. Saya melihat itu dengan seksama bahwa masyarakat menyambut dengan penuh suka cita perdamaian itu.

Bayangkan 29 tahun orang itu sudah dewasa.

Itulah umur rakyat Aceh dalam suasana hidup yang tidak tenteram. Bahkan terjadi tumpah darah terhadap anak bangsa. TNI/Polri kan anak bangsa juga dan mereka jadi korban di sana dikarenakan adanya perlawanan bersenjata.

Rakyat Aceh harus menanggung resiko itu begitu juga dengan pihak GAM. TNI/Polri, GAM dan rakyat Aceh itu *kan* warga negara Indonesia semua.

Sehingga dengan adanya kesepahaman semuanya menerima dengan bagus. Karena siapa *sih* yang tidak ingin mengakhiri penderitaan yang panjang. Seperti orang yang baru dapat rezeki luar biasa itu.

Tapi ini akan bisa betul-betul terwujud apabila kedua belah pihak jujur melakukan itu. Sikap saling percaya

antara kedua belah pihak atas isi kesepakatan akan mewujudkan perdamaian yang abadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Kesepahaman Helsinki itu akan bisa menciptakan kedamaian di NAD apabila kedua belah pihak betul-betul sadar dan secara jujur mematuhi dan menjalankan komitmennya.

Tapi, apabila salah satu pihak memungkiri dan melanggar kesepakatan itu maka tidak mustahil keadaan akan kembali ke titik nol.

Kepentingan GAM tampaknya begitu diakomodasi oleh Pemerintah RI dalam kesepakatan Helsinki. Pendapat Anda sendiri?

Saya menilai, apa-apa yang diakomodasi oleh Pemerintah RI melalui berbagai substansi perjanjian Helsinki itu sungguh suatu hal yang sangat besar. Itu sebuah langkah dan kebijakan yang sangat berani. Tapi hakikatnya adalah Pemerintah RI sebenarnya memberikan itu semua kepada masyarakat Aceh. Bukan kepada GAM. Isi dari kesepakatan itu adalah suatu hal yang sangat besar, karena pemerintah memberikan wewenang dan hak yang luas. Tapi sekali lagi, saya tekankan, semua tidak akan ada artinya apabila dilanggar.

Muncul sikap pro dan kontra atas hasil kesepakatan Helsinki. Bagaimana Anda menyikapi fenomena itu?

Menurut saya, pihak yang pro dan kontra itu mungkin salah mempresepsikan kesepakatan itu. Jadi memang pemerintah terus lebih giat lagi untuk menjelaskan dan mensosialisasikan kepada semua pihak. Karena, jika kesepakatan ini tidak disosialisasikan dengan benar oleh kedua belah pihak, maka akan timbul persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda tentang maksud substansi-substansinya.

Itu tugas pemerintah dan kita semua untuk mensosialisasikannya. Kalau ini semua dipahami dengan baik, saya kira, tidak ada yang kontra lagi.

Sebab, satu hal yang paling utama adalah GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan. Tidak ada ucapan merdeka lagi dari mereka, tidak ada keinginan merdeka dan itu yang ditangkap oleh tim kita.

Dikatakan GAM tidak lagi ingin memerdekakan Aceh itu sudah jawaban final. Artinya dengan demikian pemerintah

tidak lagi melihat ada masalah sebab GAM tidak lagi berjuang untuk memerdekakan Aceh.

Adalah kewajiban pemerintah pusat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan mengembalikan hal-hal yang selama ini, katakanlah, belum dinikmati oleh rakyat Aceh.

Perdamaian, ketenteraman, dan keselamatan adalah hak rakyat Aceh untuk dinikmati. Tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak pribadinya seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan tertib.

“Karena kesepakatan Helsinki adalah upaya yang ketiga kalinya, setelah Jeda Kemanusiaan dan CoHA, saya melihat ada jalinan atau rasa percaya yang lebih dari kedua belah pihak.”

Di Aceh selama 29 tahun itu hampir sebagian besar rakyat Aceh itu tidak mendapatkan hak-hak dasarnya tersebut. Kadang-kadang hak asasi yang paling tinggi sebagai manusia, hak untuk hidup, pun harus diambil. Tapi kadang-kadang nyawanya rakyat Aceh melayang dengan sangat mudah akibat konflik bersenjata.

Karena itu, semua pihak seharusnya berintrospeksi: apakah kita memang tidak punya keinginan terciptanya perdamaian dan kedamaian di Aceh yang sudah lama didambakan oleh rakyat Aceh selama 29 tahun?

Logika lainnya, tidak ada lagi yang namanya GAM?

Sebenarnya, pemahaman kita sejak tanggal 15 Agustus lalu dengan tidak ada lagi niat untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh maka tentu sudah tidak lagi ada gerakan.

Tidak ada lagi gerakan untuk memerdekakan Aceh. Tidak ada lagi keinginan untuk itu. Kini, keinginan mereka adalah berjuang dan memperjuangkan kepada siapapun agar rakyat Aceh itu

berada dalam keadaan aman, sejahtera dan bermartabat. Itu sebenarnya yang perlu ditekan.

Menurut Anda, masihkah ada rasa takut menghinggapai perasaan rakyat Aceh?

Rasa takut itu pasti ada. Karena mungkin trauma, karena itu tadi ada yang pro dan kontra, kemudian ada orang yang mengatakan masih ingin merdeka misalnya, menurunkan bendera dan sebagainya, mungkin ini yang menjadikan rasa takut.

Ini suatu proses. Menurut saya, saat ini masih dalam masa transisi, kadang mengakhiri, kadang konflik, kadang damai. Masa transisi ini memang suatu masa yang tentu tidak bisa segera terhapuskan, tapi ini mudah-mudahan bisa segera berakhir.

Banyak orang Aceh yang berada di luar negeri dan berkewarganegaraan asing?

Bagi orang-orang Aceh yang menjadi warga negara asing kemudian dia dalam GAM memang saya tidak tahu persis apa rencana mereka. Tetapi dalam MOU itu disebutkan, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali, tentu saja dia melepaskan kewarganegaraannya di luar negeri.

Dan mereka betul-betul berkewarganegaraan disini. Han tidak mungkin satu orang mempunyai kewarganegaraan ganda. Sekarang seperti Hasan Tiro, Zaini Abdullah, Mahmud Zakariah dan sebagainya itu, mereka ada yang warga negara Swedia, Thailand, Malaysia, dan ada yang warga negara Singapura.

Saya berharap kalau mereka tidak lagi menyebut dan berjuang untuk kemerdekaan kemudian menganggap sudah cukup apa yang diberikan pemerintah yang saya katakan luar biasa besar, tentunya mereka kita harapkan pulang.

Lepaskan kewarganegaraan asing yang selama ini dia anuti, kembali jadi warga negara Indonesia dan membangun Aceh, bahkan tidak hanya di Aceh mungkin juga pada posisi di tingkat nasional.

Kembali membangun bangsa ini. Kita harap seperti itu. Dalam arti apabila mereka betul-betul jujur tidak lagi mengatakan tidak lagi berjuang untuk kemerdekaan Aceh. Oleh karena itu tidak ada niat maka Ingat karena masalah Aceh sebenarnya sudah berada pada titik-titik perdamaian yang abadi. ■ **af, HT**

Jangan Ada Lagi Darah Mengalir

Bukan saatnya lagi menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan. Perjanjian damai di Helsinki harus menjadi titik tolak penghentian konflik dan kekerasan di Aceh.

Wajah Teuku Kamaruzzaman berseri-seri begitu menuruni tangga pesawat khusus Garuda Airways yang berusan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

Mantan juru runding GAM itu, bersama sekitar 413 anggota GAM lainnya, pada Rabu (31/8) silam, dibebaskan sebagai tahanan dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Pulau Jawa.

Bukan hanya Kamaruzzaman, pada hari yang sama ada sebanyak 527 anggota GAM lainnya yang ditahan di Jawa, Bengkulu dan Aceh Besar juga dibebaskan.

Suasana haru namun ceria pun merebak. Terlebih ketika rombongan anggota GAM itu disambut hangat oleh pejabat Pemda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang sejak pagi hari menunggu kedatangan mereka.

Sekda NAD Thantawi Ishak, mewakili Pelaksana Tugas Gubernur NAD, Azwar

Abubakar, menyambut mereka dengan kedua tangan terbuka. “Sesungguhnya kita bersaudara, tidak ada permusuhan di antara kita,” ungkap Azwar Abubakar dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Thantawi, seperti dikutip *Republika* (1/9).

Kepulangan para anggota GAM yang sempat ditahan dan menjalani hukuman di sejumlah LP di Pulau Jawa ini merupakan realisasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No.22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam GAM.

Keppres itu diterbitkan pada 30 Agustus 2005 atau 15 hari setelah Nota Kesepahaman (MoU) RI-GAM ditandatangani di Helsinki, Finlandia.

Seperti dipahami, pemberian amnesti kepada seluruh anggota GAM adalah satu butir yang disepakati pemerintah RI dan GAM. Ketua Tim Perunding RI, yang juga Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awa-

ludin, memberikan penegasan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada anggota GAM, termasuk aktivis yang dijerat pasal-pasal makar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebenarnya, sewaktu menjabat presiden, BJ Habibie telah lebih dulu menawarkan amnesti kepada GAM sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik di Aceh.

Menteri Kehakiman saat itu, Muladi, mengatakan pemerintah berjanji akan memberikan amnesti umum kepada pelaku gerakan separatis Aceh, di antaranya kepada narapidana, mereka yang sedang dituntut, dan mereka yang masih di hutan.

Sayang gagasan itu tak bisa direalisasikan lantaran ditolak oleh pihak GAM karena dinilai rencana dan konsep amnesti mengandung banyak masalah.

Seperti dilansir majalah dan situs *Acehkita.com*, 28 Agustus 2005, pada rubrik “Analisis”, Al Araf berpendapat rencana pemberian amnesti dalam konteks kesepakatan Helsinki, pada satu sisi, patut didukung sebagai satu langkah maju mencapai upaya damai.

Namun, “Sisi lain, pemberian amnesti harus diperjelas dan dipertegas lebih lanjut oleh kedua belah pihak: siapa saja yang akan mendapatkan amnesti dan bagaimana realisasi pasca kesepakatan tersebut,” cetus peneliti Imparsial itu dalam artikel opini berjudul “Membuka Selubung Amnesti”.

Menurut Araf, secara harfiah amnesti berasal dari kata “amnesio” yang berarti melupakan. Amnesti diterapkan sejak dulu kala sebagai bentuk kebaikan hati penguasa (raja) untuk memaafkan mereka yang telah melakukan kejahatan. Dalam perkembangannya, di beberapa negara modern, amnesti telah menjadi hak kepala negara yang dituangkan dalam konstitusi.

Di Indonesia pemberian amnesti tertuang dalam hasil amendemen UUD 1945 Pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pemberian amnesti oleh kepala negara hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara” (*crime against state*) seperti subversi, kudeta ataupun separatisme.

Dengan asumsi negara yang menjadi korban—negara dalam hal ini kepala negara—memiliki wewenang meniadakan akibat hukum yang mengancam atas suatu perbuatan atau sekelompok yang



Pasukan Gerakan Aceh Merdeka wilayah Batee Iliiek berpose saat ditemui wartawan di pegunungan Kabupaten Bireuen, kemarin. Mereka mengaku siap menyerahkan semua senjata yang dimiliki, menyusul kesepakatan damai dengan Indonesia.

melakukan kejahatan terhadap negara. Dengan demikian, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang bersangkutan dalam kejahatan terhadap negara menjadi hapus.

Pemberian amnesti terhadap mereka yang memberontak pernah diterapkan di Indonesia. Di masa Soekarno ada surat Keputusan Presiden RI No 449 Tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada "orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan". Pemberian Amnesti dan abolisi tersebut ditujukan kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan Daud Beureuh, PRRI/Permesta, Kahar Muzakar, Kartosuwirjo (DI/TII), Ibnu Hajar dan RMS.

Terkait perundingan Helsinki, pemberian amnesti sebaiknya diterapkan secara hati-hati dan ditujukan kepada individu ataupun kelompok yang memang patut diberikan amnesti.

"Terhadap anggota GAM, pemberian amnesti sepatasnya ditujukan kepada seluruh anggota GAM, baik yang berada di dalam maupun di luar tahanan," ujar Al Araf.

Dalam konteks Kesepakatan Helsinki, lanjutnya, amnesti sepatasnya menjadi modalitas yang tak tergantikan untuk merintis dan mengisi perdamaian di Aceh. Praktik dan implementasi pemberian amnesti harus seluruhnya tunduk pada makna dan tujuan politik itu.

Menkum dan HAM, Hamid Awaluddin, menyebutkan ada sebanyak 1.424 orang anggota GAM yang telah diputus bersalah secara hukum.

Sementara itu, menurut Menkominfo, Sofyan Djalil, pemberian amnesti berlaku secara umum, baik untuk anggota GAM yang ada di hutan, yang masih warga negara Indonesia, maupun yang lari ke luar negeri.

"Pokoknya semua anggota GAM," kata Sofyan Djalil, menanggapi permintaan Komisi Hukum DPR agar pemerintah memberikan amnesti hanya kepada anggota GAM yang masih WNI.

"Kalau (anggota GAM) yang menjadi warga negara asing ingin mendapat amnesti harus menjadi warga negara Indonesia dulu," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Akil Mochtar, di Jakarta (25/8).

Rencana pemberian amnesti tidak cukup hanya dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah RI dan GAM, tapi juga perlu diatur secara jelas dan tegas dalam satu kebijakan politik pemerintah (Keppres) agar ada kepastian hukum. ■ **RF, SF**



Dua Batalyon TNI dari Kesatuan 330 dan 321 yang telah bertugas selama 15 bulan di Aceh, dipulangkan kembali ke markas masing-masing melalui pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Senin (22/8).

JANGAN ADA DUSTA Antara TNI/Polri dan GAM

TNI siap menarik 30 batalyon pasukannya dari Aceh. Sebaliknya, ada 840 pucuk senjata GAM yang harus dimusnahkan.

Pada saat nota kesepakatan damai RI-GAM ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto justru berada di NAD.

Bersama sejumlah pejabat teras Mabes TNI dan para Kepala Staf Angkatan, Panglima TNI menyaksikan acara penandatanganan MoU yang disiarkan televisi secara langsung di ruang tunggu Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

TNI memang mendukung keputusan pemerintah dengan menjalin kesepakatan damai dengan GAM. Karena itu, pada hari itu pula, Panglima TNI langsung memberikan pengarahan (*briefing*) kepada seluruh jajarannya yang bertugas di kawasan 'Tanah Rencong' itu berkaitan dengan implementasi penandatanganan nota kesepahaman damai antara RI-GAM.

Satu pesan di balik kedatangan Pang-

lima TNI beserta tim lengkap ke NAD tak lain dan tak bukan untuk meyakinkan masyarakat Aceh, dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa TNI akan mematuhi konsekuensi kesepakatan damai Helsinki, yakni penarikan mundur secara bergelombang seluruh pasukan TNI non-organik dari bumi Serambi Mekkah untuk kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Batas waktu penarikan sampai 31 Desember 2005.

Panglima TNI juga berharap, GAM juga bersikap konsekuen menjalankan isi kesepakatan, yakni melucuti senjata mereka. Sebab, menurut Endriartono, kesepakatan akan sia-sia belaka jika tidak diikuti implemetasi di lapangan.

Malah, mendahului pihak GAM dan tanpa menunggu penyerahan senjata dari GAM, sejak 22 Agustus silam, Mabes TNI telah menarik sebanyak 1.300 personel, gabungan dari dua batalyon pasukannya, masing-masing Batalyon Infanteri (Yonif) 321 dan Yonif 330 Kostrad. Kedua batalyon ini diberangkatkan dari Pelabuhan Krung Guekuh, Lhok Seumawe untuk kembali ke kesatuannya masing-masing.

Dalam upaya mengamankan rakyat Aceh, Mabes TNI selama ini menugaskan sekitar 30 batalyon pasukannya ke NAD. Pasukan organik yang ada di sana berjumlah 14.700 personel.



Senjata GAM yang dilucuti.

Untuk mengangkut pasukan TNI dari Aceh ke daerah asal masing-masing, TNI-AL sudah menyiapkan 11 kapal miliknya. “Kami siap dan tinggal tunggu perintah saja”, ujar KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto.

Kepada tabloid mingguan “*OPINI*” (edisi 18-24 Agustus 2005), Kadispenum Mabes TNI, Kolonel Inf. Ahmad Yani Basuki, mengatakan setelah seluruh pasukan TNI nonorganik ditarik ke daerah asal masing-masing di wilayah NAD hanya ada 14.700 personel TNI organik. Keberadaan pasukan organik itu terkait dengan pelaksanaan tugas pertahanan. Mereka akan disebar ke batalyon-batalyon yang ada di Korem dan Kodim yang tersebar di beberapa kabupaten NAD.

Bagaimanapun, seperti ditegaskan Jenderal TNI Endriartono Sutarto, kepada para wartawan, termasuk dari *Berita Indonesia*, di Mabes TNI Cilangkap, (18/8), penarikan pasukan TNI nonorganik merupakan indikasi dan sinyal kuat betapa TNI benar-benar taat mematuhi kesepakatan Helsinki.

Sebagaimana halnya TNI, pihak Polri secara bertahap juga menarik personelnnya yang di BKO-kan di Aceh sebanyak 6.781 orang. Diperkirakan, penarikan seluruh personel Polri di sana baru tuntas sekitar Desember 2005.

Sejalan dengan kebijakan Mabes TNI, menggunakan kapal milik TNI, KRI Teluk Saleh, dari Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhok Seumawe, Mabes Polri juga telah menarik sebanyak 703 personilnya, dua hari menjelang kesepakatan damai ditandatangani.

Personel Polri yang ditarik pada tahap pertama itu berasal dari Polda Kaltim, Polda Kalsel, Polda Kalbar, Polda Sumut,

Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Bangka Belitung, Polda Bengkulu, Polda Lampung, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda DIY, Polda Metro Jaya, dan Polda Banten.

Pada tahap kedua, 25 Agustus 2005, sebanyak 1.300 personel Brimob Polri telah ditarik. Dengan ditariknya pasukan nonorganik Polri itu maka personel organik dari Polda NAD akan melanjutkan tugas menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah 22 kepolisian resor yang ada di NAD.

Pelucutan senjata GAM

Panglima TNI berharap, sikap patuh TNI pada kesepakatan Helsinki diikuti oleh GAM. Dia pun memberi apresiasi terhadap pihak GAM yang telah menyerahkan tiga pucuk senjata miliknya beberapa waktu lalu. “Harapan kita akan semakin banyak senjata yang mereka serahkan,” ujar Panglima TNI.

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Supiadin AS, dan Kapolda NAD Irjen Pol. Bachrumsyah, seperti diberitakan *Waspada* (20/8) telah mengadakan pertemuan dengan pihak AMM berkaitan dengan mekanisme penarikan pasukan TNI/Polri dan penyerahan serta pemusnahan senjata GAM.

Proses penarikan pasukan nonorganik TNI dari NAD, kata Supiadin AS, akan dilakukan dalam empat tahap. Untuk setiap pengumpulan 210 pucuk senjata api standar milik GAM, akan ditarik 25 persen pasukan TNI nonorganik. Bila ada 840 senjata GAM, maka dari empat tahap itu, setiap tahap penarikan pasukan nonorganik TNI mensyaratkan pelucutan sebanyak 210 pucuk senjata GAM. Itu akan sama dengan penarikan 8.500 pasukan TNI dari Aceh.

Penarikan pasukan TNI nonorganik akan dilakukan secara bertahap selama 3,5 bulan sejalan dengan jumlah senjata GAM yang diserahkan.

“Yang jelas TNI dalam posisi sudah siap untuk ditarik setiap saat. Sesuai ukuran-ukuran, penarikan TNI sejalan dengan penyerahan senjata GAM,” tandas Kolonel Ahmad Yani Basuki, seperti dikutip langsung *OPINI*.

Di samping itu, masih kata Pangdam Iskandar Muda, semua anggota GAM yang akan turun gunung dan keluar hutan terlebih dahulu akan dicatat dan didata, termasuk pada senjata mereka yang diserahkan, setelah itu baru dilaporkan ke AMM.

Setiap anggota GAM yang menyerahkan diri tetap akan diperhitungkan bagian dari 3.000 anggota GAM yang diperkirakan masih bertahan dan tersebar di berbagai wilayah di NAD.

Koran *Media Indonesia* (19/8) memberitakan pernyataan Tengku Cut Kafrawi, juru bicara GAM wilayah Peureulak, Aceh Timur, bahwa pihaknya siap melucuti senjata dan menyerahkannya kepada AMM, wujud dukungan pada kesepakatan damai RI-GAM.

“Kami mendukung perjanjian damai Helsinki dan siap menyerahkan senjata kepada AMM,” kata Kafrawi. Kafrawi tidak menyebutkan berapa jumlah milik GAM.

Namun, informasi menyebutkan, hingga akhir Agustus lalu, tujuh anggota GAM dari pasukan TNA di Aceh Timur dan Utara sudah “turun” dengan menyerahkan tiga pucuk senjata (dua AK dan satu M-16) beserta ratusan amunisi.

Sesuai nota kesepahaman damai, jumlah senjata GAM yang akan dimusnahkan tercatat 840 pucuk. Batas akhir penyerahan senjata pada Desember 2005.

Menurut anggota Tim Perunding RI yang juga Menkominfo Doktor Sofyan Djalil, proses pelucutan senjata milik GAM berbeda dengan saat ada Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement/CoHA*). Ketika itu senjata yang dilucuti dari GAM diletakkan di sebuah gudang. Nah, kali ini, senjata lucutan itu akan langsung dimusnahkan.

“Jadi tidak ada kunci-kuncian. Senjata-senjata itu akan langsung dimusnahkan. Diharapkan, proses pelucutan senjata itu bisa selesai pada akhir Desember 2005,” jelasnya.

Semoga antara TNI dan GAM ada rasa saling percaya dalam mengimplementasikan kesepakatan Helsinki. ■ **RF, SF**

Berdamai Tanpa Prasangka

Tuhan/Jangan lagi biarkan/
Dendam membakar Aceh/
Jangan lagi biarkan/ Darah
melumuri Aceh/Kembalikan
Aceh seperti adanya dahulu.

Lewat sepenggal puisi saya ingin mengungkap perasaan dan keinginan untuk melihat Aceh yang damai di masa datang. Semoga ini juga mewakili perasaan dan keinginan seluruh bangsa Indonesia—bangsa besar yang menyatukan berbagai daerah, suku, aliran politik dan agama.

Hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh mengalami pasang dan surut. Tetapi kenapa “perkawinan” yang semula berlumur madu berubah menjadi racun?

Rakyat Acehlah yang mengumpulkan emas—disumbangkan ke pusat untuk membeli sebuah pesawat tatkala RI baru merdeka (1945), dan belum punya apa-apa. Rakyat Aceh memutuskan tetap bergabung dengan NKRI ketika negara terkoyak-koyak menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), tahun 1950-an.

Namun masih dalam tahun 1950-an, Aceh tiba-tiba menjadi ajang pemberontakan, dipimpin oleh tokoh ulama karismatik, Teuku Daud Bureauh. Mereka memproklamkan Republik Islam Aceh lantaran kecewa dan sakit hati. Aceh tidak diberi status provinsi, digabung di dalam provinsi Sumatra. Daud Bureauh dan para pengikutnya menyerah setelah melalui perundingan panjang. Presiden Soekarno datang langsung ke Aceh, bertemu dengan Daud Bureauh. Lantas Aceh diberi status Daerah Istimewa.

Aceh kembali bergolak setelah tenang dua dekade lebih. Tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro, menghidupkan kembali Republik Islam Aceh. Alasan mereka, Aceh tidak mendapatkan apa-apa dari status istimewanya, ditelantarkan, diperlakukan tidak adil, sementara kekayaan alamnya dikuras. Sebagian besar rakyat Aceh tetap bodoh dan miskin. Hasan Tiro menggalang perlawanan bersenjata lewat sayap militer Gerakan Aceh Merdeka. Tak kurang dari seribu pemuda GAM dikirim ke Libya untuk mengikuti latihan militer. Ia juga menggalang dukungan dana dari

luar negeri.

Pemerintahan Presiden Soeharto menafikan kata berunding dengan para pemberontak, dan harus diredam dengan kekuatan senjata. Maka Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Buntutnya, ribuan pendukung dan pemimpin GAM, termasuk Hasan Tiro, lari ke luar negeri.

Tahun 1998, reformasi bergulir, kendali pemerintahan pusat berganti tangan. Momentum tersebut tidak disia-



siakan oleh para pemimpin dan simpatisan GAM. Gerakan mereka meluas. Hampir seluruh desa dilikuidasi oleh GAM. Mereka benar-benar mendapat angin ketika pemerintahan pusat dipimpin Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1999-2001).

Difasilitasi oleh sebuah LSM internasional, perundingan-perundingan damai dilangsungkan di Swiss. Gus Dur keburu jatuh sebelum perundingan damai itu rampung, namun dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Perundingan di Tokyo (2003) mengalami jalan buntu, karena para pihak berangkat dari dua titik yang bertolak belakang. GAM tetap menuntut kemerdekaan bagi Aceh. Sedangkan pemerintah bersikukuh, Aceh tetap dalam bingkai NKRI.

Namun Aceh diberi status otonomi khusus yang cukup luas; menyelenggarakan pemerintahan sendiri, pem-

bagian kekayaan daerah yang cukup adil (70:30), penerapan syariat Islam bagi para pemeluknya, dan sejumlah perlakuan istimewa lainnya.

Ketika tekanan GAM melemah, Aceh diobrak-abrik gempa bumi dan tsunami, 26 Desember 2004. Tak kurang dari 150.000 orang tewas, 94.000 hilang, dan 500.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Bantuan dan empati mengalir dari saudara-saudara mereka di seluruh penjuru Indonesia. Puluhan negara dan LSM luar negeri mengulurkan bantuan. Terkumpul bantuan tunai Rp 4 triliun lebih untuk pembangunan kembali Aceh.

Dalam pada itu, perundingan damai dibuka kembali di Helsinki, dimediasi oleh sebuah tim yang mewakili negara-negara donor. Para perunding GAM mengalah, tidak lagi menuntut kemerdekaan. Tanpa restu DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju kesepakatan damai ditandatangani di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Di dalam kesepakatan itu, Aceh diberi status; pemerintahan sendiri dengan UU Khusus, punya bendera, himne dan lambang sendiri, boleh menetapkan suku bunga bank sendiri, setiap peraturan (UU) pemerintah pusat tentang Aceh, harus mendapat persetujuan DPRD Aceh, dan masih ada sejumlah butir lainnya yang patut dipertanyakan.

Tim perunding Indonesia dipimpin oleh dua menteri, doktor lulusan Amerika—Sofyan Djalil dan Awaluddin Hamid—yang sangat faham istilah-istilah Inggris, tetapi begitu ceroboh meloloskan butir-butir yang menimbulkan perdebatan. Seperti banyak orang menduga, naskah kesepakatan itu telah disiapkan oleh pihak sponsor. Ibarat ujian, soal-soal disuguhkan dengan sistem *multiple choice*, tinggal menjawab: ya, tidak, dan atau.

Namun apa pun lebih dan kurangnya, proses perdamaian yang langgeng di Aceh tidak boleh ditunda, apalagi gagal. Tentu perdamaian di dalam bingkai: nasionalisme, toleransi, kesetaraan dan keadilan yang dijiwai semangat saling percaya, dan tidak saling men-curigai. ■ SH

Awas... 'Bom Waktu' Papua

Sejumlah persoalan tengah menyelimuti Papua. Mulai dari kekecewaan atas pelaksanaan UU Otonomi Khusus, provinsi Irian Jaya yang ditentang, sampai intervensi Kongres AS. Pemerintah jangan salah langkah?

Ribuan warga Papua, mulai dari orang tua, anak-anak, pemuda, pemudi, dan ibu-ibu menggendong bayinya melakukan *long march*, Jumat (12/8). Konvoi massa yang tergabung dalam Dewan Adat Papua (DAP) itu dimulai dari Lapangan Trikora, Abepura, menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura.

Tujuan mereka, "menyerahkan kembali" UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua kepada pemerintah pusat melalui DPRP. Alasannya, UU Otsus hanya membawa penderitaan bagi masyarakat dan menguntungkan pejabat daerah.

Persoalan Otsus ini tidak hanya menyangkut DAP, tapi juga Provinsi Irian Jaya Barat (Irianbar), yang landasan hukum keberadaannya dipertanyakan Gubernur Papua JP Solossa.

Dia minta pemerintah pusat konsisten menjalankan Otsus Papua yang mengatur pemekaran provinsi. "Ini harus ditata kembali, sesuai PP No.54/2004, pemerintah harus mengambil langkah bijak agar tidak timbul persoalan baru," katanya seperti dikutip *Media Indonesia* (9/8).

Menurut Solossa, dengan Otsus yang diberikan kepada rakyat Papua, sejumlah perbaikan telah dirasakan masyarakat. Ada peningkatan yang signifikan pada kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya.

Dia membenarkan, di Papua saat ini ada sekelompok pendukung Papua Merdeka yang dimotori DAP dan sejumlah anggota Presidium Dewan Papua. Pemprov Papua sudah berusaha merangkul

mereka tapi selalu tidak mendapat titik temu.

Pandangan berbeda ditegaskan Ketua DPRD Irianbar, Jimmi Demianus Ijie, yang mempertanyakan dana Otsus dari pusat sebesar Rp 5,6 triliun yang tidak sampai ke masyarakat.

Jimmi menduga sebagian dana Otsus dipakai membiayai kegiatan separatis di Papua.



"Kita lihat para separatis bisa ke luar negeri, pulang pergi. Dari mana uangnya? Kenapa tim KPK yang ke Jayapura belum juga bertindak? Presiden jangan mau dibohongi JP Solossa seolah mau kembalikan Otsus."

Irianbar juga minta dana Otsus seperti yang diberikan kepada Papua. Selain itu, hasil sumber daya alam yang selama ini masuk ke Papua dikembalikan ke Pemprov Irianbar. Persoalan itu akan dibicarakan tim kecil gabungan dua provinsi (masing-masing lima orang) yang difasilitasi Kementerian Koordinator Politik.

Menanggapi gejolak di Papua, Pre-

siden SBY mengingatkan segala persoalan akan diselesaikan berdasarkan kepentingan bersama.

Saat bertemu sejumlah tokoh Papua di Istana Kepresidenan, 9 Agustus 2005, SBY menegaskan, Otsus pilihan masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Jika masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya, pemerintah akan terus memperbaikinya.

Penegasan serupa kembali dilon-tarkan SBY dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, 16 Agustus 2005, dan sidang paripurna DPD 23 Agustus 2005.

Terkait dengan mencuatnya RUU 2601 versi Kongres AS, SBY meminta Gubernur Papua menjelaskan kepada masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi perkembangan di Kongres AS. Kongres dan Presiden AS mendukung integritas Indonesia dan Papua adalah bagian integral dari NKRI.

Ketua DPR Agung Laksono pun menilai, bangsa Indonesia tidak perlu resah asal pemerintah konsekuen menjalankan Otsus Papua. Ketua DPD Ginandjar Kartasmita tidak menganggap RUU 2601 Kongres AS sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena hanya berupa laporan dan bersifat tidak mengikat.

"HouseReport 2601 hanya permintaan Kongres AS kepada pemerintah untuk memberikan laporan," tegas Ginandjar se usai bertemu dengan Staf Kongres AS Jonah Blank, di Jakarta.

Baik Senat maupun Kongres AS berhak memanggil pemerintah untuk memberikan laporan mengenai hal apapun yang diminta parlemen. Karena itu judulnya *House Report* (laporan kongres) bukan *Act* (UU). ■ **AF, SP**

LEMHANNAS TETAP KRITIS

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) punya 'pilot' baru. Adalah Prof. Dr. Muladi SH yang menjadi gubernur lembaga pengkajian strategis tersebut. Mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara itu dilantik Presiden SBY, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/8).

Muladi dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, Ermaya Suradinata. Presiden juga melantik M. Yasin sebagai Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wanhannas).

Pria yang dilahirkan di Solo, 26 Mei 1943, ini ingin menjadikan Lemhannas sebagai lembaga kajian strategis dan kritis terhadap masalah aktual yang dihadapi negara serta pengembangan wawasan kebangsaan, yang tidak saja dikenal di



dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Kendati ada suara yang meragukan netralitas Lemhannas di bawah kepemimpinannya, Ketua DPP Partai Golkar Korbud Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah ini bertekad untuk tetap kritis dan memisahkan dirinya sebagai petinggi Golkar.

"Sejak dulu kalau saya menjabat, masalah kepartaian selalu saya singkirkan," ungkap mantan Rektor dan

Guru Besar Universitas Diponegoro ini.

Presiden SBY berharap, Lemhannas mampu merespons berbagai masalah strategis yang dihadapi bangsa dan ada perubahan signifikan di lembaga ini dalam dua-tiga tahun mendatang. ■ **SP**

JATI DIRI Yang Terabaikan

Presiden Susilo meminta masukan dari para mantan manggala Pancasila untuk menemukan kembali simpul yang terpendam.

Lancar, akrab, dan penuh kekeluargaan. Memasuki ruangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa dengan ramah para tamunya, 43 bekas manggala nasional BP-7. Dia didampingi Menko Polhukam Widodo AS dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Silaturrahmi 13 Juni lalu, merupakan kelanjutan pertemuan pertama, 22 Februari. Waktu itu, Presiden SBY meminta mereka menyiapkan makalah yang intinya mengandung saran-saran untuk membangun kembali bangsa ini dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Menanggapi permintaan Presiden, para eks manggala yang bergabung di dalam Lembaga Pengkajian Pancasila dan Kesadaran Berbangsa (LPPKB), menyusun makalah singkat, berjudul: "Membangun Kembali Bangsa Indonesia (*Rebuilding the Nation*)".

Makalah itu mengandung pokok-pokok pikiran sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintahan Presiden SBY. Mereka merangkumnya di dalam; "Nation and Character Building, Konstitusionalisme, dan Etika Kehidupan Bernegara.

Dari aspek karakter bangsa, para sesepuh itu mengkritik tindakan sebagian anggota masyarakat, termasuk para elit politik, yang seolah-olah lupa pada jati diri bangsanya, yaitu Pancasila. Dari aspek konstitusional, kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dan pejabat pelaksana hukum, sehingga dambaan akan terselenggaranya keadilan masih jauh dari realitas. Mereka juga melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain, terutama dengan prinsip dan nilai Pembukaan UUD 1945.

Dari aspek etika kehidupan bernegara, mereka melihat maraknya euforia kebebasan yang dianggap sebagai esensi demokrasi. Orang bebas berbicara namun mengabaikan kesantunan dan keadaban.

Ketua LPPKB, Soeprapto, MEd. memaparkan, bangsa Indonesia sudah memiliki potensi kekuatan yang andal untuk menanggulangi segenap tantangan, yakni Pancasila dan UUD 1945.



Soeprapto.

Pancasila, sebuah landasan yang kokoh dan penuntun yang dinamis bagi bangsa ini untuk mencapai cita-citanya. Ideologi negara itu mengandung nilai-nilai yang hidup, memberi harapan dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan jaman.

Menurut Soeprapto bangsa Indonesia semestinya bersyukur karena memiliki UUD 1945 yang orisinal, disusun oleh *the founding fathers* dengan arif dan bijaksana, berdasarkan ekologi negara, sejarah bangsa, struktur sosial, serta budaya dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat.

LPPKB mengutip disertasi doktoral Susilo Bambang Yudhoyono sebelum menjabat Presiden RI, untuk mengatasi krisis segenap komponen bangsa harus mempunyai komitmen kuat melaksanakan secara konsisten delapan kesepakatan dasar.

Pertama, Pancasila dasar negara, ideologi nasional dan falsafah bangsa. Kedua, UUD 1945 cermin jati diri dan kepribadian bangsa. Ketiga, NKRI sebagai kesepakatan final. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika wujud konsep pluralistik. Kelima, menolak ekstrimisme kiri. Keenam, menolak ekstrimisme kanan. Ketujuh, menolak separatisme. Ketujuh, menolak terorisme.

Di dalam pertemuan itu, SBY me-

ngakui perlunya aktualisasi Pancasila di era reformasi. Indonesia tidak boleh tercabut dari jati dirinya; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Reformasi adalah kesinambungan dan perubahan.

Perhatian Susilo cukup besar kepada LPPKB. Praktiknya, Widodo membuka akses via Deputi VI yang menangani masalah kesatuan bangsa. ■ SH

AMANDEMEN UUD '45 KEBABLASAN ?

Amandemen UUD 1945 oleh MPR masa bakti 1999-2004 masih menuai kritik. Sejumlah tokoh menilai, amandemen itu kebablasan dan karenanya harus dikembalikan kepada naskah aslinya. Tokoh lainnya berpendapat berbeda, UUD 1945 hasil amandemen perlu diperbaiki tapi tidak ada alasan kembali ke naskah asli.

Tuntutan pengembalian UUD '45 ke naskah asli teretus dalam Apel Kesetiaan di Tugu Proklamasi (11/8). Hadir dalam acara itu, antara lain, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua DPR/MPR Kharis Soehod, mantan Menteri Keuangan Frans Seda, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeirto, tokoh "Petisi 50" Ali Sadikin, Ketua DPP PDI-P Guruh Soekarnoputra, Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Edi Sudradjat dan Koordinator Gerakan Jalan Lurus, Sulastomo.

Ketua Panitia Apel Kesetiaan, Saiful Sulun mengingatkan betapa banyak masalah yang mendera Indonesia dewasa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan keamanan, utang luar negeri dan korupsi. Di atas itu semua, katanya, persoalan yang paling krusial adalah amandemen UUD'45 yang kebablasan.

Soenardi dari Gerakan Rakyat Marhaen yang membacakan Ikrar Kesetiaan kepada NKRI, Pancasila dan UUD'45, meminta agar diadakan peninjauan ulang terhadap berbagai UU yang merupakan turunan dari UUD '45 hasil amandemen.

Guruh Soekarnoputra dalam pidatonya menyatakan, seandainya Bung Karno dan Bung Hatta masih hidup akan menagis karena apa yang diproklamasikan pada 17 Agustus '45 telah diobrak-abrik. "Kita perlu memurnikan Pancasila dan UUD '45," tandasnya.

Ali Sadikin menyoroti peranan asing yang mendorong amandemen UUD'45. Menurutnyanya infiltrasi asing sudah mulai sejak Indonesia merdeka, tepatnya ketika Wapres Bung Hatta mengeluarkan Maklumat X November 1945.

Di lain pihak, dalam sebuah seminar di Jakarta, pertengahan Agustus, seperti dikutip *Media Indonesia*, pengacara senior Adnan Buyung Nasution mengakui UUD '45 hasil amandemen perlu diperbaiki namun jika dikembalikan ke UUD '45 yang asli sangat tidak logis. Tuntutan itu diwarnai nostalgia atau sindroma pada kekuatan otoriter dan totaliter yang pernah dinikmati pada masa lampau.

Buyung membenarkan, amandemen UUD '45 membawa perubahan yang mendasar seperti membatasi masa jabatan presiden, memperkuat kedudukan DPR, menambah pasal-pasal hak asasi manusia dan mengurangi kewenangan MPR, konstitusi hasil amandemen ini masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.

Namun, "MPR waktu mengamandemen tidak memiliki konsep ketatanegaraan yang jelas tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan amandemen itu," ujarnya. ■ SP

◆ WIDYA PURNAMA

Dirut BUMN Pemberani

Inilah peta perjalanan karir Widya Purnama, Direktur Utama PT Pertamina yang "kursinya" diobok-obok karena berani berkata tidak kepada kemauan sekelompok orang. Padahal sebagai pegawai ia jujur tetap akan berujar "yes, Sir" manakala nanti dipaksa meninggalkan kursi panas itu.

Widya Purnama menjadi sorotan media massa sejak Juni tatkala merebak isu kelangkaan BBM. Ia sering bersitegang dengan Menkeu Jusuf Anwar. Keduanya banyak berbeda sudut pandang menilai harga dan jadwal pencairan uang pembelian BBM.

Widya juga bersikukuh menolak membayar klaim Karaha Bodas Company. Perusahaan asal AS itu dinilainya mengajukan klaim terlalu besar, 300 juta dolar AS, padahal setelah dihitung oleh penilai independen asal Italia, dan BPKP, kerugian tak lebih dari 50 juta dolar AS.

Widya mengibaratkan klaim Karaha Bodas seperti kematian kambing, 20 tahun kemudian dihitung akan punya anak sekian padahal kambingnya laki-laki.

Yang terbaru Widya disebut-sebut menolak menjalankan pengelolaan ladang minyak Blok Cepu, sumur berisi 1,4 milyar barel minyak di Blora, Jawa Tengah.

Widya, sejak 26 Agustus 2004 menghentikan operasi Blok Cepu setelah melihat ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) tidak beritikad baik melanjutkannya. EMOI mengajukan perpanjangan kontrak 20 tahun, setelah konsesinya berakhir pada tahun 2010 nanti, dengan alasan sudah menghabiskan biaya 450 juta dolar AS.

Widya kemudian segera menghitung sendiri dan ketemu pengeluaran itu ternyata tak lebih dari 147 juta dolar AS.

Persoalan Cepu kemudian naik ke tingkat paling atas. "Sang Presiden" George Walker Bush membicarakannya secara khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono, tatkala keduanya bertemu di KTT APEC November 2004 di Cile.

Itulah, kemudian pada 25 Juni 2005 disepakati sebuah MoU baru sebagai dasar pengelolaan Blok Cepu. Tapi Widya tetap *ogah* menjalankan. Ia lebih tunduk kepada keputusan RUPS PT Pertamina 30 Juni 2005.

Berbuat yang Terbaik

Widya tampak lebih suka mengawal kepentingan negara daripada menuruti apa kata dan kemauan sekelompok orang yang ingin mengobok-obok Pertamina. Widya berani berkata *tidak* jika memang hati nurani meminta dia untuk harus mengatakan demikian.

Sesungguhnya Widya tak pernah bermaksud menyakiti hati siapapun. Namun karena kekukuhannya untuk berpihak kepada kebenaran, banyak pihak yang lalu kelimpungan jadinya. Ia tak peduli kalau-kalau kursinya sebagai Dirut Pertamina digoyang terus.

Jabatan dianggapnya amanah, dan bekerja adalah ibadah,



sebuah prinsip hidup yang menuntun ayah empat orang anak ini selalu berupaya berbuat yang terbaik bagi perusahaan, bangsa, negara dan bagi siapapun.

Putra Pare-Pare kelahiran 26 Juli 1954, ini begitu lulus dari Teknik Elektro ITS Surabaya membangun karir dari bawah di PT Indosat. Dengan prinsip berbuat yang terbaik karirnya terus menanjak.

Widya kemudian diangkat menjadi Manager Area Indosat Medan. Di sana, tepatnya di Pantai Cermin, terdapat satu titik koneksi telekomunikasi global Indosat dengan dunia internasional.

Sukses dari Medan Widya kembali ke kantor pusat, menduduki jabatan General Manager Divisi Pengembangan Strategis. Pernah, setelah berkali-kali mengikuti *fit and proper test* sebagai calon direksi, dan selalu tak pernah terangkat, Widya lalu bersikap untuk tak perlu bermimpi jauh menjadi Dirut.

Tapi amanah kepada Widya seolah tak pernah berhenti. Sejak tahun 1997 ia ditempatkan di anak perusahaan, PT Electronic Data Interchange (EDI). Ia bertugas menyediakan jasa pertukaran informasi dan dokumen bisnis kepabeanaan secara elektronik. EDI meminimalisasi kontak personal. Di sini Widya sudah menjalankan konsep bisnis *good corporate governance*.

Widya kembali lagi ke kantor pusat. Sebuah kejutan baru muncul di alam reformasi, ia akhirnya berkesempatan mengemban amanah sebagai Dirut Indosat, sejak tahun 2002. Begitu tiba di pucuk ia bertekad bekerja sebaik mungkin, transparan kepada siapapun, serta tidak mau diintervensi oleh siapa juga. Ia juga bertekad menjadikan Indosat sebagai lembaga

WIDYA PURNAMA

Jabatan: Direktur Utama PT Pertamina **Lahir :** Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 26 Juli 1954 **Agama:** Islam
Isteri: Sri Hetty Indiyah **Anak:** Batara Indra, Batara Wisnu (almarhum), Annisa Purnama dan Auliana Purnama
Pendidikan: S-1, Teknik Elektro ITS Surabaya, S-2, Magister Manajemen ITB Bandung **Pengalaman Kerja :**
 Dirut PT Pertamina (11 Agustus 2004 - Sekarang), Dirut PT Indosat (2002-11 Agustus 2004), Dirut PT EDI, General Manager Pengembangan Strategi Bisnis, Manager Indosat Medan Area.



yang bersih dari berbagai intrik.

Kursi baru Dirut ternyata sangat panas. Ia banyak didemo karyawan hingga dihujat oleh berbagai kelompok kepentingan. Pendemo tak setuju keputusan pemerintah menjual saham terbesarnya kepada investor asing.

Widya akhirnya berhasil mengamankan kebijakan pemerintah. Divestasi berlangsung Desember 2002. Tanpa banyak berbicara ia berhasil menepis berbagai tuduhan negatif yang sempat terlontarkan kepadanya. Widya hanya berkeyakinan telah melakukan yang terbaik.

Bisnis Indosat yang nyaris karam tergerus kemajuan teknologi, kembali dibangkitkannya. Ia mengorbitkan Indosat menjadi penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara penuh (*full network and service provider/FNSP*) berkelas dunia. Ia juga merestrukturisasi bisnis Indosat dari semula hanya mengandalkan SLI, menjadi penyelenggara jasa *business mobile communications, fixed communications, MIDI (Multimedia, Datacom and Internet)*, serta *backbone network services*.

Sejak Mei 2002 bersama keenam anak perusahaan Widya meluncurkan identitas baru Grup Indosat. Filosofi pendekatan bisnis digeser lebih berorientasi memenuhi kebutuhan pelanggan.

Lawan Mafia Minyak

Widya Purnama sangat layak dipercaya menangani segala perkara mulai dari yang kecil hingga besar. Sejak Rabu 11 Agustus 2004 ia diangkat menjadi dirut PT Pertamina.

Sikapnya sebagai dirut baru tak kalah galak. Situs internet WWW.TokohIndonesia.Com,

sebuah plasa web para tokoh menggambarkan gebrakan awal Widya yang berani pada judul nukilan biografi singkatnya, "Akan Lawan Mafia Minyak".

Situs ini berhasil mendokumentasikan beberapa butir pernyataan pertama Widya. Seperti, dalam 100 hari berjanji akan mewujudkan perbaikan di tubuh Pertamina. Jika tidak, ia akan mundur.

Ia juga berjanji akan melawan mafia minyak dan menjaga agar Pertamina tidak "diobok-obok" lagi oleh oknum tertentu, serta akan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas nomor satu di kawasan Asia Tenggara, mengalahkan Petronas, Malaysia.

Widya juga menegaskan akan membuat perubahan budaya perusahaan di Pertamina sehingga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Namun, seperti sudah disebutkan di muka, karena kekukuhan berpihak kepada kebenaran berbagai kerikil muncul mengganjal langkah maju Widya Purnama. Ia seolah dianggap berbahaya jika bercokol di situ terus. Terlebih jika sudah memasuki tanggal 23 November 2005.

Saat itu posisi monopolistik Pertamina sebagai penyedia dan distributor BBM di dalam negeri berakhir, hanya menyisakan 70 persen saja, sesuai ketentuan UU No. 22/2001 tentang Migas.

Berbagai alasan kemudian dikelola agar 'pemberesan' Widya terkesan alami. Seperti pernyataan dari seorang tinggi pemerintah yang menye-

but kinerja direksi Pertamina buruk.

Tanpa bermaksud membuat serangan balik, bersama seluruh direksi pada Jumat 19 Agustus Widya Purnama segera meresponsnya dengan mengundang sejumlah besar wartawan.

Widya mengumumkan kinerja terbaru Pertamina.

Kepada wartawan yang menginginkan konfirmasi langsung dan segera darinya, tentang isu pergantian direksi



Pertamina, Widya dengan tenang menjelaskan bahwa Pertamina pada semester I 2005 mencatat laba bersih Rp 8,533 triliun, naik dari target Rp 6,103 triliun yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2005. Total pendapatan Pertamina 2005 mencapai Rp 328,468 triliun, meningkat dari RKAP 2005 yang Rp 193,391 triliun.

Kemudian *Suara Pembauran* berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dihubunginya, Selasa (23/8),

semuanya disebutkan sumber yang sangat layak dipercaya, menulis bahwa pergantian dan pelantikan direksi baru Pertamina sudah pasti akan dilakukan pada hari Selasa (23/8) itu juga. Bahkan dalam *lead* dituliskan, pergantian dimaksudkan untuk memperlancar penandatanganan kesepakatan Blok Cepu.

Pembaruan mengutip pula pernyataan sebelumnya dari Staf Ahli Menko Perekonomian, Rizal Mallarangeng, tentang pergantian direksi Pertamina yang memang harus secepatnya dilakukan, setidaknya sebelum tanggal 29 Agustus.

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie pun disebutkan pernah berujar, siapapun direktur utama Pertamina penandatanganan kontrak Cepu harus dilakukan.

Namun hingga majalah *Gatra* edisi 27 Agustus 2005, habis masa edarnya, kursi panas direksi Pertamina masih aman-aman saja. Majalah ini menurunkan laporan utama "Pertamina Mbalelo/Menteri Kok Dilawan" delapan halaman penuh termasuk dua halaman wawancara eksklusif dengan Widya. Demikian pula dengan *Trust*, yang menurunkan rubrik interviu tiga halaman.

Meneg BUMN, Sugiharto, tulis *Gatra*, ikut pula memastikan nasib Widya dengan menyebut, "Insya Allah, akan diganti sebelum akhir bulan ini."

Peta perjalanan karir Widya belum berakhir. Ia seolah terselamatkan oleh sejumlah agenda ekonomi nasional untuk mengatasi lonjakan nilai dolar AS, seperti rencana kenaikan harga BBM. Pertamina adalah BUMN pengguna dolar terbesar, melebihi 1 miliar dolar AS/bulan. ■ HT

Bali Contoh Terbaik Pilkada

Bali Contoh Terbaik Pilkada Bali memberi contoh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terbaik. Pemilih mampu bersikap dewasa, mengedepankan stabilitas wilayah sehingga kualitas demokrasi pun meningkat. Pilkada di sejumlah kabupaten dan kota Bali berjalan lancar, aman dan tertib. Bali Pos, surat kabar terbesar Bali memberitakan (12/8), Gubernur Dewa Beratha sudah melantik para kepala daerah terpilih. Gubernur memuji ketokohan dan jiwa besar para politisi dalam mengelola pilkada. Mereka adalah Walikota Denpasar dan wakilnya Drs. Puspayoga/IB Rai D. Mantra, SE, M.Si, Bupati Badung



dan wakilnya AA G Agung/K.Sudikerta, serta Bupati Bangli dan wakilnya Nengah Arnawa/I Made Gianyar. Sementara, Mendagri Moch Ma'ruf selama Agustus

melantik lima pasangan gubernur dan wakilnya yang terpilih selama Pilkada berlangsung Juni lalu.

Yakni, Gubernur Jambi dan wakilnya Drs. Zulkifli Nurdin/Drs. Antony Zeadra Abidin (3/8), Gubernur Kalimantan Tengah dan wakilnya Agustin Teras Narang/Achmad Diran (4/8), daaan Gubernur Sulawesi Utara dan wakilnya Drs. Sinyo Harry Sarundajang/Freddy H Sualang (13/8).

Kemudian Gubernur Sumatera Barat dan wakilnya H. Gamawan Fauzi, SH, MM/Prof. Dr. Marlis Rahman, M.Sc (15/8), dan Gubernur Kepulauan Riau dan wakilnya Ismeth Abdullah/Muhammad Sani. ■ SP

AGAP Bandung Tutup Gereja



Waspada, koran nasional asal Medan selama dua hari berturut-turut (25-26/8) memuat peristiwa penutupan 23 gereja yang terjadi di wilayah Jawa Barat, sebagai berita utama. Penutupan dilakukan oleh Aliansi Gerakan Anti Permutadan (AGAP), pimpinan Komandan AGAP Muhamad Mukmin, karena gereja dituduh telah memurtadkan ribuan Muslim. AGAP menganggap penutupan gereja tidak melanggar hukum karena didirikan tanpa memiliki izin dan bertentangan dengan SKB Menag dan Mendagri No. 01/BER/MDN-MA/1969.

Menanggapi hal itu Wapres HM Jusuf Kalla, meminta pimpinan umat untuk menghentikan aksi penutupan gereja. "Mereka bagian dari bangsa Indonesia juga," tutur Kalla, dalam dialog dengan ormas Islam di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta (29/8). Akan tetapi Kapolda Jabar, Irjen Pol Drs Edi Darnadi, menyebutkan tidak ada penutupan paksa sejumlah gereja di wilayah Jabar. "Di Jawa Barat, tidak ada penutupan paksa sejumlah gereja. Mohon dicatat, ya!" ujar Edi, Rabu (24/8), sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat (25/8). ■ HT

Bupati Karangayar Wajibkan Bersepeda

Suara Merdeka dari Semarang Sabtu (20/8) memberitakan Bupati Karangayar, Jawa Tengah, Rina Iriani, menginstruksikan seluruh PNS di jajarannya wajib bersepeda *onthe/ke* kantor, setiap hari Jumat.

Ia sudah memulainya, Jumat (19/8), bersama ratusan karyawan Kantor Bupati dan siswa-siswa dari puluhan sekolah bersepeda mengelilingi beberapa ruas jalan sebelum akhirnya menuju tujuan masing-masing.

"Sebaiknya setiap karyawan yang rumahnya dekat kantor menggunakan sepeda untuk transportasi harian, terutama setiap Jumat. Selain menghemat energi, juga bermanfaat untuk kesehatan. Kami harap langkah tersebut juga diikuti oleh masyarakat," kata Rina Iriani.

Tetapi Ketua DPRD Karanganyar, Juliatmono, menanggapi berbeda. Katanya, kalau Bupati ingin berhemat seharusnya dilakukan dengan menekan sejumlah anggaran pembiayaan, bukan sekedar bersepeda ke kantor. ■ SP



Solo: Kemelut Keraton Surakarta yang sudah berlangsung cukup lama, Senin (29/8) malam mencapai puncaknya. Ratusan massa pendukung Pakubowuno XIII Tejawulan berhasil memasuki keraton secara paksa, setelah mendobrak pintu Dalem Purwosasono di sisi barat Kori Kamandungan dengan menggunakan sebuah sepeda motor.

Kalimantan Selatan: Ulama kharismatik asal Kalimantan Selatan, Kyai Zaini Gani, lebih dikenal Abah Sakumpul, Rabu (10/8) dini hari meninggal dunia. Ratusan ribu pelayat terdiri warga dan murid almarhum yang tergabung dalam jamaah pengajian Abah Sakumpul dari berbagai kota sangat histeris sejak jasad dibawa dari rumah menuju mushola Al Raodah, persis di depan rumahnya di Jalan Sakumpul, hingga dimakamkan. Abah Sakumpul meninggalkan dua orang putra Muhammad Amien Badali dan Muhammad Hafi Badali, tiga orang istri, meninggal dunia karena menderita penyakit ginjal.

Lombok: Petani secara histeris melakukan aksi menghadang kedatangan rombongan Muspida Pemda Lombok Tengah, yang hendak mempersiapkan areal upacara peletakan batu pertama pembangunan bandara inter-



nasional Lombok Baru pada 1 September 2005. Petani menolak rencana kedatangan Presiden karena pembayaran pembebasan lahan pertanian milik mereka belum tuntas. Mereka mematok lahan dengan bambu dan menancap papan plang di lahan tersebut.

Surabaya: Pembangunan proyek jembatan yang menghubungkan Surabaya-Madura (Suramadu), tersendat akibat belum cairnya dana bantuan dari Cina. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, dana bantuan asing sudah ada hanya saja pencairannya masih menunggu dana pendamping dari pemerintah. Wapres berjanji akan membawa persoalan Suramadu untuk dibahas dalam sidang kabinet terbatas.

Banda Aceh: Lembaga Bantuan Kemanusiaan AS, USAID, Kamis (25/8) meresmikan dimulainya pembangunan jalan sepanjang 240 kilometer yang menghubungkan Banda Aceh-Meulaboh. Di sini, Pemerintah AS memberikan komitmen bantuan 245 juta dolar AS kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

Proyek direncanakan selesai Maret 2009.

DKI Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Sabtu (27/8) pagi bersepeda santai dari Balaikota menuju Bundaran Hotel Indonesia, dan kembali lagi ke Balaikota. Ia bergabung bersama ratusan anggota komunitas bersepeda untuk bekerja, atau "Bike to Work". Di situ, ia mengatakan akan terus mengkaji keinginan warga agar disediakan jalur khusus bersepeda.

Banyumas: Sejumlah petani, bekerjasama dengan Polres Banyumas, Jawa Tengah, menggelar aksi pemecahan rekor gula terpanjang. Gula merah yang terbuat dari nira kelapa, merupakan komoditi unggulan Kabupaten Banyumas. Sejumlah pengrajin dalam kelompok petani penderes nira asli sepakat membuat gula dengan ukuran yang tidak biasanya, 59,40 meter, lalu dipamerkan pada puncak peringatan Hari Bhayangkara di Mapolres Banyumas. Muri mencatatnya sebagai rekor gula terpanjang di Indonesia, bahkan dunia. ■ MLP

Ulah Daging "Misterius" Sukabumi

Sekitar 100 warga Desa Bojonginduk dan Desa Selagombong, Kabupaten Sukabumi, tergeletak lemas dan pingsan setelah mengkonsumsi daging 'misterius'.

Pikiran Rakyat Senin (22/8) menulis, menurut penuturan Ketua RT 3/12 Desa Bojonginduk, Ocen Wiganda, musibah bermula dari kedatangan seorang pedagang daging keiling Jumat (19/8) dan Sabtu (20/8), yang menawarkan daging seharga Rp 1.500-2.500 perkantong.

Berat perkantong ditaksir seperempat kilogram, sehingga dihitung-hitung sekilo harganya Rp 8.000-10.000, jauh lebih murah dari harga pasar Rp 36.000-38.000 perkilogram.

Ocen sebenarnya sudah menaruh curiga sejak awalnya, karena pedagang membawa daging dalam karung yang sudah dibungkus dalam kantong-kantong kecil. Dan kalau ditanya asal-usul dagingnya, laki-laki berusia sekitar 40 tahun yang mengaku berasal dari Cibadak itu selalu menghindar.

Karena murah, kendati Ocen sudah sempat memperingatkan agar tidak membeli, warga tetap saja membeli lalu memasaknya. Barulah beberapa jam setelah mengkonsumsi warga merasa pusing, mual-mual dan beberapa diantaranya jatuh pingsan.

Untung jiwa mereka bisa cepat diselamatkan oleh sejumlah petugas kesehatan yang mulai berdatangan malam harinya. Kadinkes Sukabumi dr. H. Buhono Thahadibrata M.Kes, menduga korban mengalami keracunan. ■ SP

Kala Sultan Yogya Mencari Pinjaman

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mencari pinjaman ke luar negeri. Dana akan digunakan mengembangkan pendidikan berbasis teknologi informasi (TI). Sultan mengajukan pinjaman 150 juta dolar AS, setara Rp 1,4 triliun, ke Bank Kerjasama Internasional Jepang (Japan Bank for International Cooperation/JBIC).

Namun niat baik Sri Sultan, sebagaimana ditulis Kedaulatan Rakyat (22/8), segera disanggah sejumlah anggota DPRD DIY dan kalangan lainnya. Mereka mengatakan, pinjaman harus dikaji lebih jauh terutama menyangkut manfaat dan beban yang harus ditanggung oleh APBD.

Utang harus disesuaikan dengan kemampuan daerah agar APBD tidak defisit di masa mendatang. Ekonom Dr. Mudradjad Kuncoro, menilai pinjaman harus melihat kemampuan anggaran mem-back up pembayaran cicilan dan bunga di kemudian hari. Anggota Komisi C DPRD DIY, Imam Sujagi, menyebutkan, pendapatan asli daerah (PAD) DIY dalam APBD 2004 hanya Rp 374 miliar, bahkan total nilai APBD-nya cuma Rp 700 miliar. Sultan menjelaskan, pinjaman akan digunakan pula untuk pengembangan *e-government*, kesehatan dan sebagainya. "Semua tujuannya ke situ", kata Sri Sultan. ■ SP

BBA MULAI MENDUNIA



Tatkala harga minyak mentah menembus atap, minyak tumbuhan, bisa menjadi bahan bakar alternatif (BBA) bagi bensin dan minyak diesel. Majalah *Berita Indonesia* dan *Newsweek* edisi Agustus 2005, menurunkan laporan sampul dengan topik yang hampir sama, BBA.



Pemilik armada taxi udara, Joel Rosado, ketika harga minyak mulai menukik dua tahun lalu, tidak mau berpikir dua kali. Pemilik 12 pesawat berkebangsaan Brazil itu, berbuat sebisanya untuk menekan biaya bahan bakar—dua puluh persen dari total pendapatannya.

Rosado menelpon pabrik pesawat Embraer, mengorder pesawat propeler tunggal Ipanema, model terbaru yang berbahan bakar alkohol. Menerbangkan pesawat Ipanema berbahan bakar ethanol, alkohol yang diproses dari tetes tebu, bisa menghemat 40% konsumsi bahan bakar.

Sekarang Rosado membeli sebuah lagi pesawat baru Ipanema dan meng-

Pabrik Bahan Bakar

Para penemu yang visioner seperti Henry Ford dan Rudolf Diesel mengharapkan mesin-mesin baru mereka berbahan bakar murah tetapi merakyat populer.

Seabad kemudian, dengan semakin meroketnya harga minyak bumi, bahan bakar dari minyak tumbuhan mulai mendapat tempat, dan menjadi bahan bakar sedan, truk dan pesawat.

Seperti minyak tumbuhan (biodiesel) atau alkohol (ethanol), minyak bumi, dibuat dengan mengambil sumber energi yang disimpan oleh makhluk hidup. Perbedaan utamanya, alam membutuhkan waktu miliaran tahun untuk membuat minyak bumi. Juga ada sejumlah perbedaan yang jauh lebih penting:



Ethanol di China.

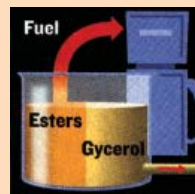
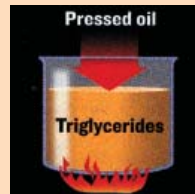
BIODIESEL

Beberapa pabrik mobil Jerman menawarkan mesin yang bisa dilarikan dengan 100 jenis bahan bakar biodiesel yang dibuat dari minyak tumbuhan atau lemak binatang. Untuk mesin-mesin konvensional, biasanya dicampur dengan minyak diesel. Berikut bagaimana minyak itu dibuat menjadi bahan bakar.

1 Minyak diperas dari tanaman seperti memeras minyak kedele, kemudian dipanaskan.

2 Sewaktu pemanasan, minyak disuling, ditambahkan bahan pencampur, seperti potasium hidroksida.

3 Bahan-bahan kimia ini mengurai uap minyak menjadi benda-benda yang disebut gliserol dan ester. Ester ini yang membentuk bahan bakar biodiesel.



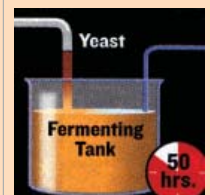
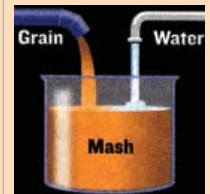
ETHANOL

Ethanol yang dikenal sebagai etil atau alkohol, dapat murni digunakan atau ditambahkan dengan bensin untuk mengurangi pencemaran udara (emis). Berikut ini, bagaimana membawanya dari pertanian ke tanki bahan bakar.

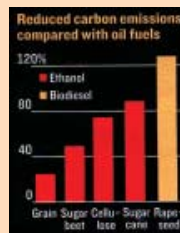
1 Bubur, misalnya jagung, dicampur dengan air. Bubur itu harus direndam sampai 48 jam.

2 Enzym mengubah bubur tepung menjadi gula yang disebut dekstrosa. Ragi bertambah dan fermentasi dimulai.

3 Setelah 40 sampai 50 jam, produk sampingan disaring dan ethanol disuling lagi sebelum dialirkan ke tanki.



Bahan bakar tumbuhan bersih dan membantu mengurangi pemanasan global, menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan dengan minyak bumi. Bahan bakar dari tumbuhan juga memangkas emisi dari racun-racun, seperti nitrogen oksida yang memberi andil bagi peningkatan penyakit per-



nafasan di banyak kota.

Produksi biodiesel dibatasi hanya oleh tingkat pertumbuhan tanaman dan ketersediaan lahan pertanian. Pemanfaatan bahan buangan untuk biodiesel mengurangi keterbatasan tersebut; minyak goreng jelantah di Eropa dapat menghasilkan setara satu miliar liter biodiesel.



ganti bahan bakar 11 pesawatnya dengan alkohol. Masalahnya, Embraer, satu-satunya pabrik pesawat berbahan bakar alkohol di dunia, saat ini kebanjiran permintaan, sehingga harus menunggu dua tahun untuk mendapatkan pesawat tersebut.

Perkebunan tebu Brazil, sekarang memasok kebutuhan 320 pabrik ethanol, dengan penambahan 50 lagi dalam lima tahun mendatang. Sebagian besar dari 20 juta pengemudi Brazil mengisi tanki bensin mereka, 25% dengan alkohol. Tetapi generasi baru mobil yang tumbuh pesat akan murni menggunakan bahan bakar alkohol yang harganya separuh dari bensin, di semua pompa bensin dari pusat kota Rio ke kawasan terpencil Amazon.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, para tuan kebun tebu dan perusahaan multinasional raksasa akan menginvestasi US\$ 6 miliar untuk pembangunan pabrik dan perkebunan selama lima tahun ke depan. Dan tanki-tanki ethanol Brazil akan memasok negara-

negara yang haus bahan bakar, seperti Korea Selatan dan Jepang, tatkala mereka mulai berpaling dari minyak bumi. Jangnan heran bilamana Brazil akan menjadi Arab Saudi-nya ethanol. ■ (Newsweek-SH)

KELEMAHAN ETHANOL DAN BIODIESEL

Kelemahan penggunaan biodiesel atau ethanol murni sebagai bahan bakar kendaraan adalah perlu modifikasi pada mesin karena ethanol dan biodiesel antara lain akan bereaksi dengan karet dan plastik konvensional.

Salah satu kerugian lain bila ethanol dan biodiesel diproduksi dalam skala besar adalah meningkatkan beban lingkungan karena perkebunan mono kultur atau perkebunan dengan satu jenis tanaman.

Hal ini dapat mengurangi produktivitas tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Dua Teknologi Energi Surya

Selain kedua jenis energi alternatif yang sudah disebutkan sebelumnya, sumber energi alternatif lainnya bisa diperoleh dari tenaga surya. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m. Untuk memanfaatkan potensi energi surya ada dua macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu energi surya fotovoltaik dan energi surya termal.

Energi surya fotovoltaik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang terdiri dari rangkaian panel unsur semikonduktor, misalnya lapisan unsur silikon yang tipis. Lempengan silikon itu dipasang dengan posisi sejajar dalam sebuah panel yang terbuat dari aluminium atau baja anti karat dan dilindungi oleh kaca atau plastik. Lempengan silikon itu kemudian dirangkai secara seri menggunakan kisi-kisi kabel penghantar arus listrik. Bila sel surya itu terkena matahari maka pada lapisan silikon terjadi pemisahan elektron dari atom silikon sehingga dibangkitkan arus listrik.

Efisiensi sel surya fotovoltaik komersial berkisar antara sepuluh sampai 17 persen. Artinya, hanya 10 sampai 17 persen energi matahari yang diubah menjadi arus listrik. Untuk menghasilkan energi dalam skala besar diperlukan lahan yang luas.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik terbesar di dunia saat ini berada di Jerman. Sebanyak 38.000 modul sel fotovoltaik tersebar di atas lahan seluas 24 hektar yang dapat menghasilkan daya listrik sebesar enam megawatt. Jumlah ini mencukupi kebutuhan listrik 4.000 rumah tangga Jerman dalam setahun.

Sedangkan energi surya termal menggunakan tenaga matahari untuk menghasilkan listrik secara tidak langsung. Salah satu caranya adalah dengan pemanasan rangkaian pipa secara langsung. Atau dengan menggunakan cermin untuk memfokuskan sinar matahari pada pipa berisi cairan penghantar panas seperti misalnya minyak sintesis. Cara lain adalah dengan mengatur cermin mengelilingi menara yang di puncaknya terdapat tabung kolektor cahaya matahari. Sinar matahari yang dipantulkan terfokus pada satu titik dan memanaskan cairan dalam tabung tersebut. Energi panas yang dihasilkan dalam kedua proses ini menggerakkan turbin uap yang pada akhirnya akan menghasilkan listrik.

Efisiensi kerja energi surya termal mencapai 30 persen. Sama dengan energi surya fotovoltaik, pembangkit listrik tenaga surya termal tidak menghasilkan emisi CO₂.

Sementara kelemahannya adalah pembangkit listrik ini hanya dapat digunakan pada siang hari karena membutuhkan penyinaran langsung matahari. Pemanfaatan energi surya termal yang bersifat komersial belum tersebar luas. Pembangkit Listrik Surya Termal pertama di Eropa akan dibangun di Spanyol. ■

DI JALAN DAN LABORATORIUM:

tepung dan minyak tumbuhan hanya lah dua dari sumber potensial bahan bakar biodiesel. Riset-riset terbaru menunjukkan bahwa rumput-rumput dan pohon-pohon bisa jadi bahan baku biodiesel. Sementara ini bahan bakar biodiesel sedang bergerak keluar dari laboratorium menuju tanki-tanki kendaraan bermotor di seluruh dunia.

BRAZIL: Penghasil ethanol terbesar di dunia mulai menyuling gula tebu tahun 1975. Sekarang, semua bensin yang dijual, 22 sampai 26% campuran ethanol.

AS: Penghasil ethanol persis di belakang Brazil. Negeri adidaya ini memproduksi lebih dari 10 miliar liter setahun. Ini hanya 2% dari total penggunaan bensin, tetapi legislasi baru akan meningkatkan kemampuan produksi.

SWEDIA: Percobaan pada bus-bus berbahan bakar campuran alkohol dan minyak tumb-

bahan menunjukkan bahwa kendaraan-kendaraan yang haus bensin menggunakan ethanol dan biodiesel yang lebih murah.

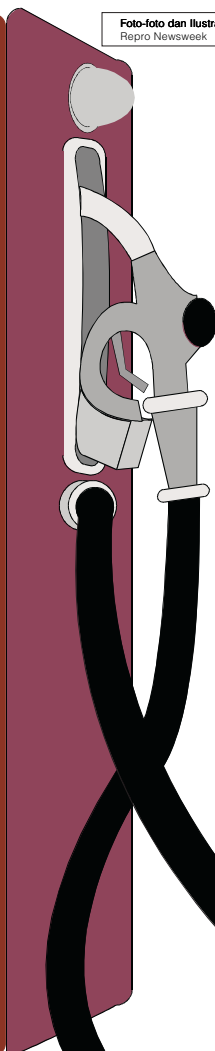
JERMAN: Dalam upaya menggalakkan penggunaan bahan bakar dari minyak tumbuhan, pemerintah telah memotong pajak terhadap produk tersebut.

AUSTRIA: Mengubah minyak jelantah yang dikumpulkan dari McDonald untuk menjadi bahan bakar armada bus umum di Graz.

CHINA: Pemerintah penghasil ethanol terbesar ketiga di dunia ini sedang mempelajari metode Brazil dan sedang membangun pabrik-pabrik baru untuk meningkatkan produksi.

GHANA: Sebuah pabrik bahan bakar dari minyak tumbuhan (biofuel) yang memanfaatkan kacang tanah, akan menghemat US\$ 240 juta dari impor minyak bumi Ghana. ■ (Newsweek-SH)

Foto-foto dan ilustrasi: Repro Newsweek



Tahun Penuh Bencana

Serentetan bencana, baik karena ulah alam maupun manusia, mengguncang Indonesia di ujung tahun 2004, berlanjut sampai 2005. Sudah banyak yang jadi korban.

Ledakan dahsyat menghentak pagi yang senyap di Jalan Rasuna Said, di jantung Jakarta, tak jauh dari Gedung Kedubes Australia. Pagi itu, 9 September 2004, masih dalam suasana kampanye pemilihan presiden putaran kedua.

Sebelas orang tewas seketika, puluhan lainnya cedera berat dikoyak ledakan bom bunuh diri dengan mobil box. Di antara para korban terdapat karyawan, pejalan kaki dan mereka yang ingin mengurus keperluannya di Kedubes Australia.

Pada pemilihan tahap kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla mengalahkan pasangan presiden yang sedang memerintah, Megawati dan KH Hasjim Muzadi. Pasangan pemenang dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, 21 Oktober 2004.

Belum genap sebulan, kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Tol Jagorawi (17/11-2004), menelan enam jiwa. Diduga kecelakaan itu terjadi, karena polisi menghentikan mendadak mobil-mobil yang sedang berlari kencang untuk memberi jalan bagi konvoi Presiden Susilo yang baru meninggalkan kediaman di Cikeas, Cibubur, menuju Istana Negara.

Susilo menerima laporan

tentang kecelakaan tersebut Rabu siang, usai sidang terbatas kabinet. Ia menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga para korban, dan memerintahkan penyelidikan atas terjadinya kecelakaan yang terkait dengan konvoinya.

Pemerintahan Susilo dan Jusuf pertama kali didera cobaan gempa bumi di Tanimbar, P. Alor, NTT, disusul oleh gempa di Nabire, Irian Jaya, 26 November 2004. Gempa, dengan episentrum di daratan 17 kilometer selatan kota Nabire, berkekuatan 7,2 Skala Richter. Presiden Susilo berkunjung ke Nabire, menginap semalam, untuk bertatap muka dengan para korban yang masih ditampung di tenda-tenda darurat.

Belum puas bertatap muka dengan para korban, Susilo, pagi 26 Desember 2004, dika-getkan oleh laporan tentang gempa bumi dan gelombang tsunami paling dahsyat di abad ini. Kekuatannya 9.0 Skala Richter. Aceh, terutama Meulaboh dan Banda Aceh, porak poranda. Nias kena imbas.

Gempa yang terjadi 10 kilometer di dasar Lautan Hindia dan 160 kilometer barat Aceh, menimbulkan gelombang pasang setinggi 10 sampai 30 meter. Tidak hanya Aceh yang disapu tsunami, tetapi juga Sri Lanka, Thailand, India, Bang-

ladesh, Malaysia dan sebagian pantai Afrika. Di Aceh, tak kurang dari 150.000 orang tewas, 94.000 hilang dan 157.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Belum cukup di Aceh, gempa bumi dahsyat berikutnya mengguncang 200 kilometer dari Sibolga. P. Nias diporak poranda oleh gempa yang berkekuatan 8,7 Skala Richter. Menurut perkiraan tidak resmi



2.000 tewas, tetapi Departemen Kesehatan hanya mengumumkan angka 300 orang. Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 60 per sen bangunan, pemerintah dan swasta, rusak berat.

Meskipun tidak sedahsyat di Aceh dan Nias, gempa (7/4-2005) mengguncang Bengkulu (4,8 SR), Jawa Barat dan Ambon (2/8-2005), berkekuatan 5,7 SR. Memang tidak ada korban jiwa, tetapi gempa-gempa

tersebut merusak berbagai fasilitas umum.

Tidak hanya gempa bumi. Semester pertama tahun 2005, ditandai oleh berbagai bencana polio, flu burung, busung lapar, ledakan bom dan tabrakan kereta api.

Bencana polio menimpa sebagian besar anak-anak di Sukabumi. Busung lapar merbak di TNB, NTT, bahkan Jakarta, dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Flu burung yang terjadi di beberapa daerah, menimbulkan bencana bagi puluhan ribu peternak ayam. Mereka terpaksa membakar jutaan ekor ternak unggas yang terjangkit wabah flu burung.

Bom yang meledak di Tenna, Poso, Juni tahun ini, menewaskan dan melukai belasan orang. Ledakan bom berikutnya terjadi di Ambon, menjelang peringatan ulang tahun Republik Maluku Selatan.

Yang juga penting dicatat, tabrakan dua rangkaian kereta api listrik Jabotabek yang dipenuhi ratusan penumpang. Tabrakan itu terjadi di dekat stasiun KA Pasar Minggu, Jakarta (30/6-2005). Dua orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka, termasuk seorang gadis ABG usia 16 tahun, keduanya kakinya terpaksa dipotong sampai di pangkal paha.

Pesawat penumpang milik Mandala Airlines, jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Polinia Medan, pukul 9.00 WIB, Senin, 5 Agustus 2005. Ratusan penumpang tewas terbakar bersama pesawat naas yang sedang terbang menuju Jakarta. Pesawat itu jatuh di perumahan Padang Bulan, menimpa beberapa bangunan dan kendaraan bermotor. Di antara para penumpang yang tewas, termasuk Gubernur Sumatra Utara T. Rizal Nurdin dan bekas gubernur Sumut Raja Inal Sirregar.

Negeri ini masih diberi cobaan kesulitan karena kenaikan harga minyak mentah di pasar tunai internasional. AP-BN terantuk emas hitam dan rupiah ikut terpuruk. ■ SH

PESAWAT MANDALA Perlu *Overhaul*

Kerusakan di bagian mesin tak mungkin diperbaiki di udara. Karena itu, "sedia payung sebelum terbang."

Langit Bandara Polonia Medan, Senin (5/9) pukul 10.06 WIB, cerah. Pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang penuh muatan penumpang dan cargo, berpacu di jalur lepas landas dengan kecepatan tinggi. Pesawat dengan nomor penerbangan R-091 itu sedang menuju Jakarta. Namun beberapa menit kemudian, pesawat yang beroperasi sejak tahun 1969

jauh dari batas landasan pacu, roda pesawat menabrak tiang lampu *instrument landing system*. Satu mesin rontok dan jatuh. Namun sang pilot masih berupaya menerbangkan pesawatnya, meskipun badan pesawat oleng, dan rodanya masih diluar.

Dalam kondisi oleng ke kiri dan ke kanan, roda pesawat menabrak atap Ruko, jatuh di Jalan Djamin Ginting,

berikutnya terjadi ledakan dahsyat, badan pesawat terbelah dua.

Pesawat itu mengangkut 112 penumpang dan 5 orang awak. Hanya 16 penumpang yang selamat, sedangkan 101 orang lainnya tewas terbakar. Pesawat itu juga menimpa dan menewaskan 40 orang yang ada di darat.

Di antara mereka yang tewas terdapat Gubernur Sumatra Utara Tengku Rizal Nurdin dan bekas Gubernur Raja Inal Siregar. Mending Rizal Nurdin rencananya akan menghadiri rapat kerja para gubernur dan presiden, di Jakarta.

Penyebab kecelakaan itu diduga baling-baling kompresor mesin rontok ketika lepas landas. Setyo Raharjo, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Udara yang dikutip *Koran Tempo* (7/11), mengatakan untuk memastikan, bangkai kompresor akan diteliti di



itu sulit menulik ke udara sebelum sampai ke ujung landasan pacu.

Tragis. Detik-detik berikutnya, pilot Askar Timur tak mampu menerbangkan pesawatnya lebih tinggi. Akibatnya, tak

kawasan Padang Bulan, Medan. Sayap pesawat menabrak dinding dua rumah penduduk, menyeret tiga penghuninya. Di depannya ada tiang listrik, tertabrak, dan pesawat naas itu terhenti. Detik-detik

PT Dirgantara Indonesia, Bandung.

Yang aneh, juga hasil investigasi KNKTU, bahwa pesawat itu memuat dua ton durian utuh. Padahal kapasitas cargo hanya 2.749 ton. Kata Setyo, memang durian itulah muatan terberat, tetapi secara keseluruhan berat muatan hanya selisih tiga kilogram dari ambang batas.

Pangkostrad Letjen Hadi Waluyo menepis kemungkinan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat teror atau sabotase. Komisaris PT Mandala Airlines itu menjelaskan bahwa pesawat tersebut dalam kondisi laik terbang.

Mandala Airlines memiliki 13 unit Boeing 737-200 buatan Amerika Serikat yang mulai beroperasi tahun 1969, atau sudah terbang selama 36 tahun. Jam terbang yang tidak pendek untuk melakukan *overhaul*. ■ SH

KECELAKAAN PESAWAT KOMERSIAL DI INDONESIA (1990-2005)

TANGGAL	MASKAPAI PENERBANGAN	JENIS PESAWAT	LOKASI	KORBAN MENINGGAL
09/09/05	Mandala	Boeing B-737-200	Medan, Sumatera Utara	147
04/12/05	GT Air	de Havilland Canada DHC 6 Twin Otter 100	Enarotali, Papua	18
30/11/04	Lion Air	Boeing Mc Donnell Douglas MD-82	Surakarta, Jawa Tengah	26
26/09/04	Garuda	Airbus A300-B4-200	Sibolangit, Sumatera Utara	234
17/07/97	Sempati	Fokker F-27 Friendship 600	Bandung, Jawa barat	30
19/12/97	Silk Air	Boeing B-737-300	Palembang, Sumatera Selatan	104
01/07/93	Merpati	Fokker F-28 Fellowship 3000	Sorong, Papua	41
09/01/93	Bouraq	Hawker Siddeley HS-748-234	Surabaya, Jawa Timur	17
18/10/92	Merpati	CASA 235-10	Garut, Jawa barat	31
24/07/92	Mandala	Vickers Viscount 816	Ambon, Maluku	70
25/10/91	Bali Air	Britten- Nouman BN2A-III-2 Trislander	Tumbang Miri, Kalimantan Tengah	17
25/01/90	Airfast	CASA 212 Aviocar 200	Mt. Rinjani, Nusa Tenggara Tengah	19

Sumber: www.planecrashinfo.com

Minggu 1

1 Agustus 2005

Raja Fahd Berpulang

Setelah 10 tahun menderita *stroke*, penguasa resmi (*de jure*) Arab Saudi Raja Fahd akhirnya Senin pagi berpulang ke pangkuan Allah SWT di RS Khusus King Faisal di Riyadh, ibukota Arab Saudi. Selama hidup almarhum dikenal sebagai teknokrat, ahli politik, dan diplomat ulung. Sesuai tradisi kerajaan, putra mahkota Abdullah otomatis menjadi pengganti Raja Fahd, kendati secara *de facto* selama 10 tahun terakhir sudah menjadi penguasa Arab Saudi.

Teten Terima Magsaysay Award

Teten Masduki, koordinator Indonesia Corruption Watch, memenangi penghargaan Ramon Magsaysay 2005. Penghargaan ini diberikan kepada dirinya yang dinilai punya keberanian dalam menentang korupsi di Indonesia. Penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan di Manila 31 Agustus mendatang.

2 Agustus 2005

Jenazah Raja Fahd dimakamkan

Setelah disalatkan di Masjid Imam Turki Bin Abdullah jenazah Raja Fahd dimakamkan di pemakaman rakyat Al-Od di Riyadh. Sejumlah kepala negara hadir melayat di Masjid Imam Turki di antaranya wapres Jusuf Kalla, Muhammad Abbas (Palestina), Husni Mubarak (Presiden Mesir), Jacques Chirac (Presiden Prancis), Raja Abdullah dari Yordania dan Pangeran Charles dari Inggris.

Penduduk RI Capai 273,65 Juta Pada 2025

Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta meluncurkan buku "Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam buku disebutkan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 diperkirakan mencapai 273,65 juta jiwa dengan usia harapan hidup meningkat menjadi 73,7 tahun dari saat ini 69 tahun.

3 Agustus 2005

Pertemuan Regional MDGs

Presiden SBY membuka pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik mengenai Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium

Development Goals/MDGs) di Jakarta Convention Center, Jakarta. SBY berharap melalui kerjasama regional ini kemiskinan absolut, kelaparan bisa dihapus dan anak-anak mendapat pendidikan secara utuh.

Mantan Sekjen KPU ditahan

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Safer C Yussac, mantan Sekjen KPU sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan buku panduan KPU yang merugikan keuangan negara Rp 17 miliar. Sebelumnya KPK telah menahan enam pejabat KPU yakni Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, anggota KPU Rusadi Kantaprawira, Mulyana W Kusumah, Plh Sekjen KPU Sussongko Suhardjo, Karo Keuangan KPU Hamdani Amin dan Karo Umum KPU Bambang Budiarto.

4 Agustus 2005

Pilkada Depok dianulir

Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) menganulir kemenangan pasangan Nurmahmudi-Yuyun Ismail yang ditetapkan KPU Depok. PT Jabar dalam putusannya menetapkan rivalnya, pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Achmad sebagai pemenang pilkada yang sah. Badrul menggugat ke PT Jabar karena ada "penggembosan" dan "penguembungan" suara.

Teras Narang & Achmad Diran Pimpin Kalteng

Mendagri M. Ma'arif melantik R.Agustin Teras Narang sebagai Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010. Mantan Ketua Komisi II DPR-RI itu dilantik bersama pasangannya, Wagub Achmad Diran dalam sidang paripurna DPRD di Palangkaraya. Dalam Pilkada 23 Juni 2005 lalu pasangan ini meraih suara terbanyak.

5 Agustus 2005

NU Minta Nonmuslim Tidak Cemas

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama minta umat nonmuslim tidak mencemaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Alasannya, fatwa Majelis Ulama Indonesia khusus untuk umat muslim.

Kader PKS Kepung PT Jabar

Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Tinggi Jabar. Mereka memprotes pembatalan kemenangan pas-

angan Nurmahmudi – Yuyun Ismail. Massa juga mendesak KPU Depok melakukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung. Ketua PT Jabar Nana Yuwana SH kepada massa menjelaskan putusan yang diambil pihaknya sudah berdasarkan pada aturan yang ada.

6 Agustus 2005

Kantor Walikota Depok didemo

Massa pendukung Nurmahmudi melakukan demo di depan Kantor Walikota Depok. Mereka menuding penganuliran kemenangan Nurmahmudi dalam Pilkada oleh PT Jabar penuh rekayasa. Demo juga terjadi di depan Kampus STPDN di Jatinnanor. Mereka minta bertemu Mendagri yang menghadiri acara wisuda program pasca sarjana.

7 Agustus 2005

Chris John Menang

Petinja Chris John berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu versi WBA untuk keempat kalinya. Ia berhasil mengalahkan Tommy Browne di Sydney. Petinja asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini melirik gelar tertinggi bagi petinja dunia dengan mengincar pertarungan melawan pemegang gelar juara kelas bulu WBA super, Juan Manuel Marquez.

Tercepat di Dunia

Pelari AS Justin Gatlin kembali menjadi pelari tercepat di dunia setelah menyabet medali emas di nomor lari 100 meter putra pada kejuaraan Dunia Atletik di Helsinki, Finlandia. Pemegang medali emas olimpiade 2004 ini menyentuh garis finis dalam waktu 9,88 detik. Medali perak direbut pelari Jamaica Michael Frater sedangkan perunggu diraih Kim Collins asal Saint Kitts.

Minggu 2

8 Agustus 2005

Ketua KPU Diadili

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengadili Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin sebagai terdakwa kasus penyimpangan dana dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan asuransi petugas Pemilu 2004. Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Tumpak Simanjuntak SH menjerat mantan dosen FE-UI ini dengan dakwaan berlipis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Akbar Tanjung Gugat Retno

Mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR, Akbar Tanjung, mendaftarkan gugatan perdata terhadap Retno Listiyarti guru SMA 13, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain Retno yang menulis buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas XI digugat juga penerbit buku Erlangga.

9 Agustus 2005

Pollycarpus diadili

Pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan menjadi otak pembunuhan aktivis HAM Munir. Pollycarpus berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diancam hukuman mati.

Mega Digugat 100 M

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan Roy BB Janis yang dipecah Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai anggota DPR. Dalam sidang perdata, Roy BB Janis menggugat Mega Rp 100 miliar. Sidang ditunda karena pihak tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Selain Mega turut digugat Sekjen PDI-P Pramono Anung dan KPU Pusat.

2,5 Tahun Untuk Nurdin

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

memvonis Ketua Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan. Nurdin juga harus membayar Rp 250 juta atau diganti dengan hukuman empat bulan penjara.

10 Agustus 2005

PKB Gus Dur Menang

Majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai I Wayan Rena memenangkan tergugat KH Abdurrahman Wahid dalam sidang kasus PKB. Dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan Alwi Shihab karena tidak satu pun perbuatan melanggar hukum dilakukan tergugat -Gus Dur, Arifin Djunaedi, Mahfud MD- ketika menandatangani pemberhentian Alwi Shihab dari Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB. Atas putusan ini kuasa hukum Alwi mengajukan kasasi ke MA.

11 Agustus 2005

Sindikatis Ijash Palsu Digulung

Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI berhasil mengungkap kasus jual beli ijazah yang dilakukan lembaga pendidikan ilegal bernama Institut Manajemen Global Indonesia (IMGI). Penjualan gelar S1, S2, dan S3 ini telah berlangsung sejak tahun 2000, IMGI sendiri telah menjual gelar palsu tersebut kepada 5.000 orang.

Heathrow Lumpuh

Sedikitnya 70 ribu penumpang terdampar di Bandara Heathrow, Inggris. Ini disebabkan maskapai penerbangan British Airways (BA) terpaksa membatalkan seluruh jadwal penerbangan akibat adanya pemogokan karyawan British Airways. Pemogokan disebabkan berlarut-larutnya perselisihan manajemen Gate Gourment penyedia jasa catering untuk British Airways dan para pekerjanya.



Minggu 3

► 12 Agustus 2005

DAP Tolak Otsus

Sekitar 15 ribu orang pendukung Dewan Adat Papua (DAP) berunjuk rasa menolak pemberlakuan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua di kantor DPRD Papua di Jayapura. Massa mengusung peti mati yang ditutupi bendera dengan tulisan "OTSUS" sebagai tanda dukacita atas ketidakberhasilan pelaksanaan Otsus di Papua.

Temu Tokoh

Sejumlah tokoh nasional kembali mengadakan pertemuan di kediaman mantan Presiden Abdurrahman Wahid di Ciganjur. Hadir di antaranya mantan Presiden Megawati dan suaminya Taufik Kiemas, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, mantan Menhankam/Pangab Jenderal TNI (purn) Wiranto, Hariman Siregar, Pramono Anung, Tjahyo Kumolo dan Wimar Witoelar.

► 13 Agustus 2005

Sarundayang-Sualang Pimpin Sulut

Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf secara resmi mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik Drs Sinyo Harry Sarundayang dan Freddy Harry Saundayang sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara periode 2005-2010.

Zulkifli Bupati Terpilih

Pasangan Zulkifli Muhadli SH dan Drs Mala Rahmah dilantik sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs HL Serinata.

► 14 Agustus 2005

Kecelakaan Pesawat di Athena

Sebuah pesawat Boeing 737 milik maskapai penerbangan Siprus hancur dan terbakar setelah menabrak bukit di utara Athena, Yunani. 115 penumpang dan 6 awak pesawat tewas. Dugaan sementara pesawat mengalami kecelakaan setelah pilot dan co-pilot pingsan atau tak sadarkan diri karena kekurangan oksigen (dekompresi) di kabin.

► 15 Agustus 2005

RI-GAM Tandatangani MoU

Pemerintah RI dan GAM menandatangani MoU kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia. Penandatanganan itu dilakukan Ketua Delegasi Indonesia Hamid Awaluddin dan Malik Mahmud dari GAM. Disaksikan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

► 16 Agustus 2005

GAM Serahkan Senjata

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai menyerahkan senjata dan personilnya, dua hari pasca perjanjian kesepakatan damai. Tiga anggota GAM bersama dua pucuk senjata jenis M-16 dan GLM diserahkan ke Koramil di Gayo Lues, NAD.

► 17 Agustus 2005

Rekonsiliasi 17 Agustus Gagal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan suatu ajang rekonsiliasi dengan para mantan presiden dan wakil presiden. Namun rencana itu tidak dapat berjalan lancar karena dari undangan yang direncanakan hanya mantan presiden Abdurrahman Wahid yang datang, sedangkan wakil presiden yang hadir hanya Try Sutrisno dan Hamzah Haz.

► 18 Agustus 2005

Jakarta Nyaris Lumpuh

Lebih dari enam jam listrik di Jakarta dan sebagian Jawa-Bali padam. Menurut Dirut PT PLN Eddie Widiono, padamnya aliran listrik ini akibat adanya gangguan transmisi pada sistem interkoneksi Jawa-Bali.

► 19 Agustus 2005

Mendarat Darurat

Pesawat Boeing 747 milik Northwest Airlines yang membawa 325 penumpang dan 16 awak pesawat dari Tokyo mengalami kerusakan pada bagian roda depan ketika mendarat di Bandara Internasional Guam. Dalam insiden ini tiga orang mengalami cedera. Para penumpang terpaksa keluar melalui pintu darurat.

► 20 Agustus 2005

Panti Rehabilitasi Narkoba

Presiden SBY meresmikan Panti Rehabilitasi Narkoba Kedaton Parahita yang didirikan Yayasan Kasih Mulia di Bukit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden minta seluruh kepala daerah ikut bertanggungjawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing.

► 21 Agustus 2005

Rupiah 10.000 per Dolar

Nilai tukar rupiah turun menembus level Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg kurs

rupiah di pasar uang Jakarta ditutup melemah 29 poin dari posisi akhir pekan lalu Rp 9.975 per dolar menjadi Rp 10.004 per dolar. Ini kurs terendah sejak 8 Maret 2002, ketika rupiah turun ke level 10.010 per dolar.

Indonesia Berzikir

Indonesia berzikir, bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara diisi taushiyah oleh KH Abdullah Gymnastiar dan Ustad Arifin Ilham.

► 22 Agustus 2005

Taufik Ukir Sejarah

Pebulutangkis Taufik Hidayat mengukir sejarah dengan mengalahkan Lin Dan (Ciona) 15-3, 15-7 di final kejuaraan dunia AS. Dengan kemenangan ini Taufik memegang dua gelar juara dunia. Satunya lagi adalah juara Olimpiade Athena 2004. Pasangan Nova Widianto/Liyanara Natsir juga tampil sebagai juara, mengalahkan pasangan Cina Xie Zhongbo/Zhang Ya-wen 13-15, 15-8, 15-2.

► 23 Agustus 2005

Presiden SBY di DPD

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato di depan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini merupakan yang pertama kalinya Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota DPD hasil Pemilu secara langsung tahun 2004 lalu.

► 24 Agustus 2005

Presiden Janjikan Dana Pensiun bagi Mantan Atlet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan mengadakan dana pensiun bagi para mantan atlet Indonesia yang berprestasi. Rencana akan diadakannya dana pensiun bagi para atlet berprestasi ini dinyatakan Yudhoyono setelah juara dunia dan juara Olimpiade Athena 2004, Taufik Hidayat meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka setelah tidak menjadi atlet.

Pesawat Peru Jatuh

Sebuah pesawat penumpang Boeing 737-200 dari maskapai Trans Atlantik, Peru jatuh saat melakukan pendaratan darurat dalam cuaca badai di dekat kota Pucallpa, Amazon. Sedikitnya 41 orang tewas. Pesawat yang mengangkut 92 penumpang dan 8 awak itu terbang dari Lima, ibukota Peru.

Minggu 4

► 25 Agustus 2005

Bom Meledak di Ambon

Sebuah bom meledak di jalan masuk menuju terminal Mardika Ambon sekitar pukul 14.30 WIT. Ledakan berasal dari dua kardus yang diletakkan di sebuah becak di depan sebuah kios. Akibatnya delapan orang luka terkena sepihan bom. Polisi menahan seorang tersangka dan memeriksa enam saksi.

► 26 Agustus 2005

TNI-GAM Baku Tembak

Kontak senjata kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Kontak senjata terjadi di Kawasan Ara Lipheh-Tanjung Mulia, kecamatan Makmur Bireun. Baku tembak sekitar 5 menit itu mengakibatkan Mustafa Bin Muhamad, anggota GAM wilayah Bate Ilik kabupaten Bireun tertembak kepala belakangnya oleh anggota TNI.

► 27 Agustus 2005

Pak Harto Jenguk Pak Dhar

Mantan Presiden Soeharto menenguk mantan Wapres Sudharmono yang dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Pak Dhar dirawat sejak 26 Agustus karena menderita infeksi paru-paru.

► 28 Agustus 2005

TNI-GAM Baku Tembak

Proses perjanjian damai RI-GAM terganggu menyusul terjadinya baku tempak antara pasukan TNI dan anggota GAM di Desa Mereu, Kec.Indrapuri, Kab.Aceh Besar. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa.

► 29 Agustus 2005

Nurcholish Madjid Wafat

Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid (Cak Nur) meninggal dunia pukul 14.05 WIB dalam usia 66 tahun di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Cak Nur telah mengakhiri penguangannya setelah lebih dari satu tahun menderita gagal ginjal dan gagal hati. Jenazah almarhum disemayamkan di Universitas Paramadina sebelum dimakamkan di TMP Kalibata keesokan harinya.

► 30 Agustus 2005

Muladi Gubernur Lemhannas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara melantik Muladi SH sebagai Gubernur Lemhannas menggantikan Ermaya. Bersamanya, Presiden SBY juga melantik M.Yasin sebagai Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

► 31 Agustus 2005

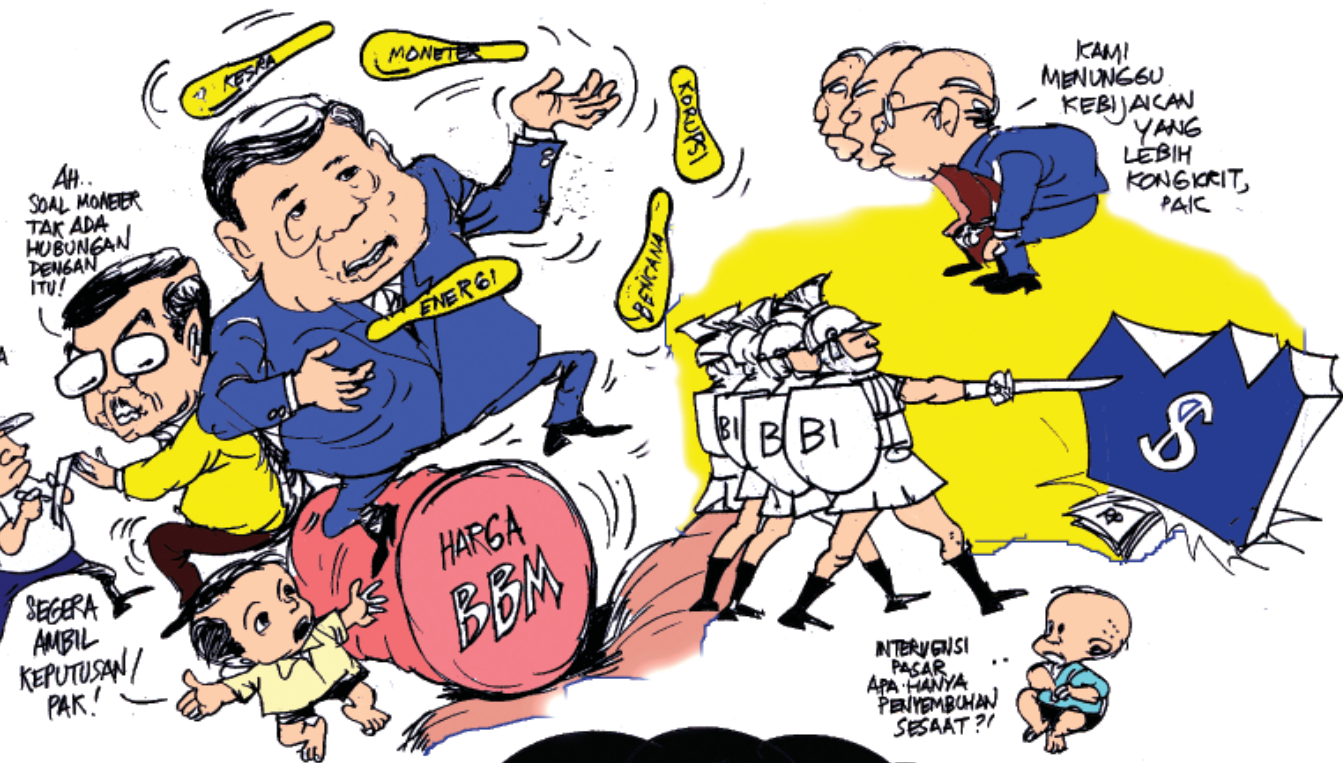
650 Warga Syiah Irak Tewas Terinjak-injak

Sedikitnya 650 orang tewas dan 322 lainnya cedera akibat terinjak-injak atau hanyut saat jemaah Syiah melintasi jembatan di sungai Tigris, Bagdad, karena panik akibat isu bom bunuh diri. Kepanikan terjadi setelah seorang berteriak bahwa ada pengebom bunuh diri di tengah rombongan kaum Syiah yang menuju Masjid Kadhimiya.

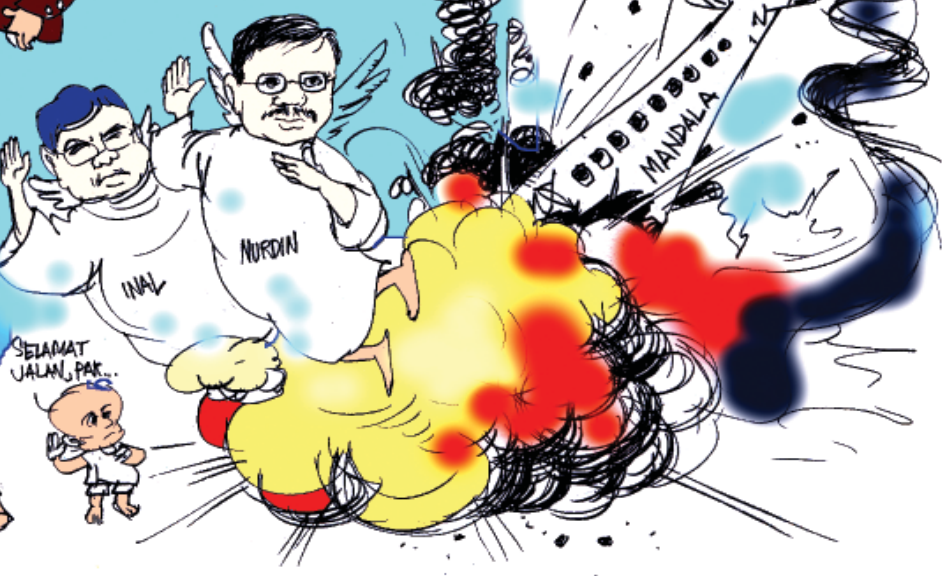
Seluruh Mantan GAM Pulang Kampung

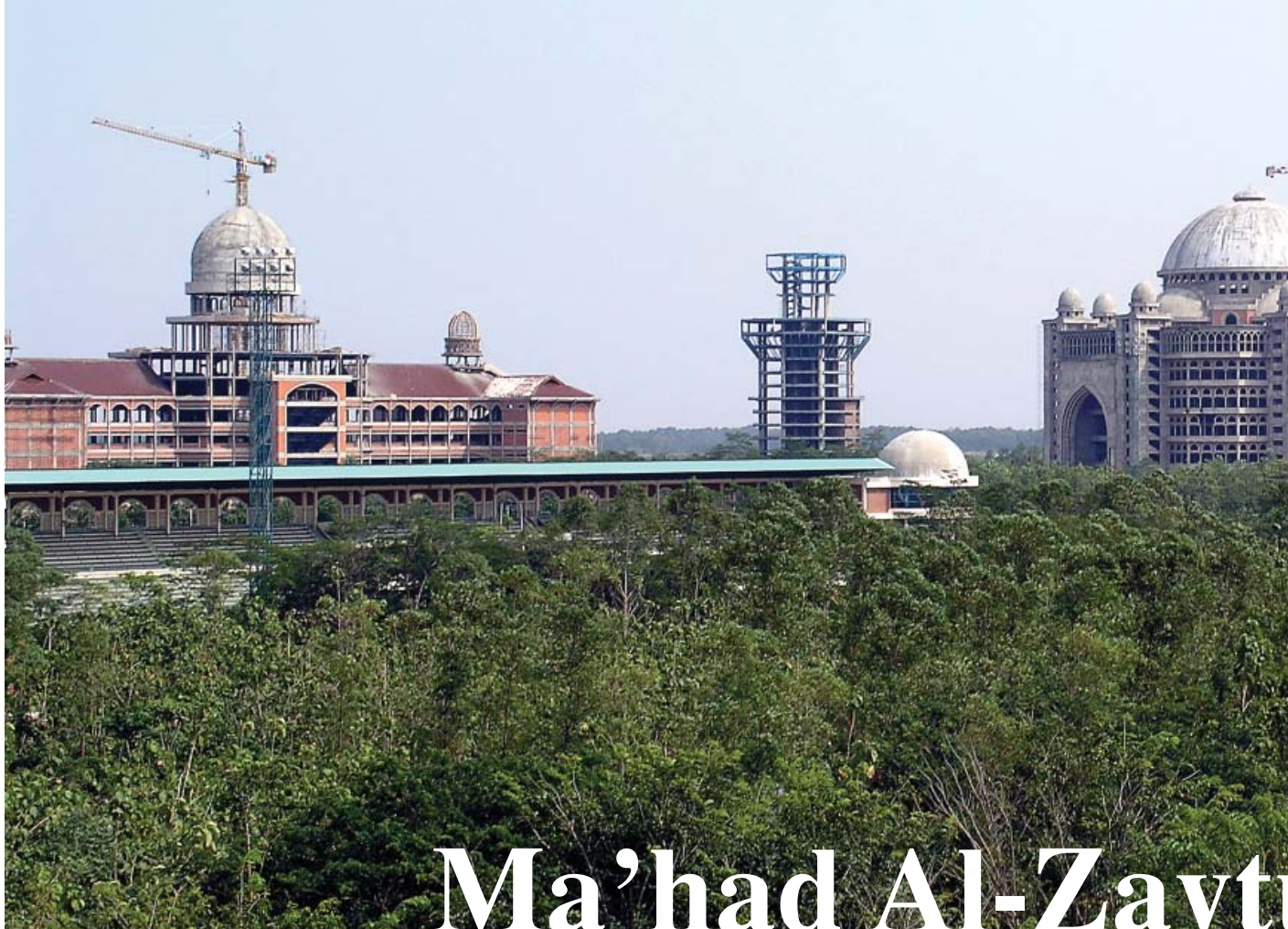
Seluruh mantan narapidana anggota GAM yang ditahan di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Jawa tiba di Banda Aceh. Mereka tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dalam empat gelombang. Di antara mereka, terdapat empat mantan juru runding GAM, yaitu Teuku Kamaruzzaman, Muhamad Usman Lampoh Awe, Amni Marzuki dan Tengku Nasiruddin, serta koordinator Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) Muhamad Nazar.





WAH. LISTRIK PADAM!!!





Ma'had Al-Zaytun

“Give people a handout or a tool, and they will live a little better. Give them an education, and they will change the world.”

MODEL PESANTREN ISLAM MA

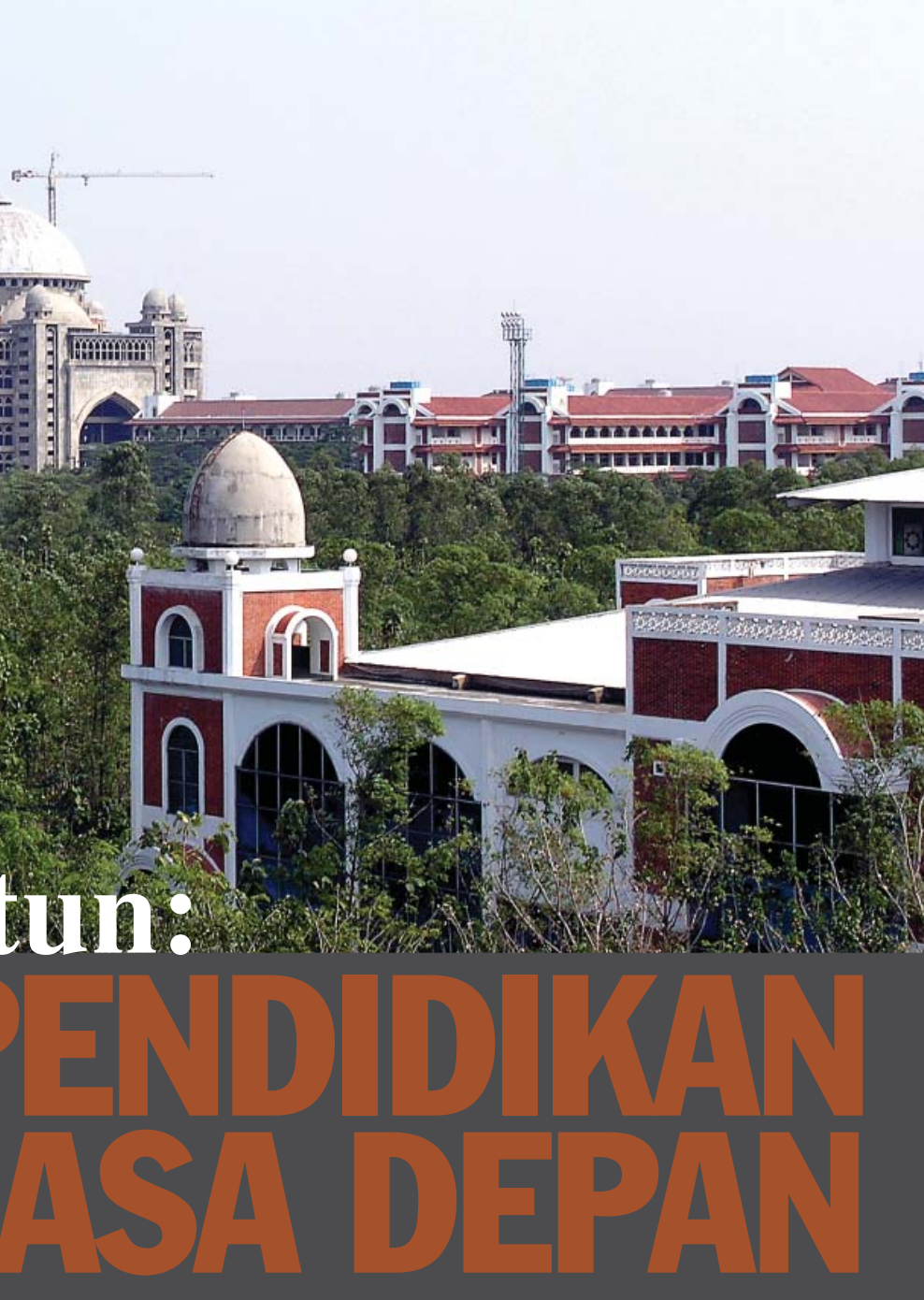
Oleh Amich Alhumami

LENTERA

Bagi banyak kalangan, Ma'had Al-Zaytun sungguh menjanjikan harapan baru bagi pendidikan Islam di masa depan. Secara fisik, pesantren ini memang sangat menawan yang memunculkan rasa takjub. Sebagai sebuah pesantren, Ma'had Al-Zaytun adalah fenomena spektakuler. Jika selama ini citra umum yang melekat pada pesantren adalah tradisional, terbelakang, dan berkelas rendah, maka tidak demikian halnya dengan Ma'had Al-Zaytun. Sebab, pesantren ini dibangun sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat modern, maju, elite, dan berkelas. Ma'had Al-Zaytun memang sengaja dibangun untuk menjawab tantangan modernitas zaman, dengan tetap berakar pada tradisi khas pesantren yang merujuk pada nilai-

nilai dasar Islam. Moto utamanya adalah: *“pesantren spirit but modern system.”* Ma'had Al-Zaytun telah mengubah secara drastis citra lama pesantren. Inilah contoh ideal sebuah lembaga pendidikan Islam modern dan canggih. Ma'had Al-Zaytun adalah pesantren *par excellence*.

Ma'had Al-Zaytun adalah lembaga pendidikan Islam yang ramah lingkungan. Keindahan Ma'had Al-Zaytun bisa dilihat dari tata ruangnya yang sangat apik, dikelilingi berbagai macam tanaman pohon langka: jati emas, meranti, ulin, dan aneka jenis pepohonan lain, yang mulai tumbuh menghijau sehingga menambah keasrian lingkungan pesantren. Setelah mendapat sentuhan tangan-tangan bertalenta dari aneka bidang keahlian, daerah yang semula gersang dan tandus itu ternyata dapat berubah menjadi sebuah ladang yang sangat subur. Pertanian berkembang sangat baik, peternakan segala jenis satwa berbiak amat cepat, dan perkebunan aneka macam buah-buahan tumbuh subur. Bahkan buah langka seperti Tin dan Zaytun yang sangat terkenal dan hanya bisa



Al-Zaytun: PENDIDIKAN ASA DEPAN

tumbuh di daerah tertentu di tanah Arab itu pun dapat tumbuh di tanah pesantren yang penuh berkah ini.

Sejak masa perintisan di pertengahan tahun 1990-an, telah dibangun gedung-gedung indah bertingkat sebagai tempat belajar para santri, dengan arsitektur bangunan bergaya paduan Eropa, Mediteranian, dan Timur Tengah. Sampai sekarang, pembangunan prasarana fisik dan berbagai fasilitas pendukung lain masih terus dilakukan, terutama untuk melengkapi gedung-gedung perkuliahan bagi universitas dengan enam fakultas (Pertanian, Kedokteran, Teknik Informatika, Teknik, Bahasa, dan Pendidikan), yang baru saja didirikan. Peresmian pendirian Universitas Al-Zaytun telah

dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, pada tanggal 27 Agustus 2005, yang menaruh harapan besar agar Universitas Al-Zaytun dapat berkembang menjadi universitas riset bertaraf internasional (*world class university*). Setelah melakukan kunjungan lapangan dan pengamatan secara langsung (*first hand observation*), Mendiknas tampak meyakini bahwa Universitas Al-Zaytun mampu mengemban tugas berat yakni mewujudkan cita-cita mulia membangun lembaga pendidikan tinggi berkualitas.

Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, Ma'had Al-Zaytun merekrut tenaga-tenaga pendidik berkualifikasi sarjana menurut disiplin ilmu

yang relevan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti ITB, IPB, UI, UGM, ITS, IKIP dan IAIN. Selain memiliki banyak tenaga pengajar berkualitas, pesantren ini dilengkapi pula dengan fasilitas pendidikan yang sangat bagus seperti perpustakaan dengan ribuan judul buku, laboratorium, dan pusat pengembangan bahasa (Inggris, Arab, Jerman, Prancis, dan Mandarin). Prasarana pendukung pun tersedia lengkap seperti asrama, rumah sakit, lapangan olahraga, taman rekreasi, dan tentu saja masjid. Dilihat dari kelengkapan prasarana fisik, pesantren ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan universitas negeri/swasta paling besar mana pun di Indonesia. Ma'had Al-Zaytun adalah model ideal lembaga pendidikan Islam yang menjadi dambaan banyak orang di masa depan.

Ma'had Al-Zaytun menawarkan satu model pendidikan Islam dengan kualitas unggul. Pendidikan yang berkualitas itu mencakup berbagai kompetensi dan kecakapan baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Atau, meminjam istilah yang seringkali dikemukakan oleh Mendiknas, bahwa pendidikan harus mampu membangun manusia secara utuh, yang meliputi (i) olah-pikir, (ii) olah-hati, (iii) olah-rasa, dan (iv) olah-raga. Untuk membangun manusia yang demikian itu, Ma'had Al-Zaytun telah menyediakan segala fasilitas pendidikan, yang memungkinkan lahirnya individu-individu dengan kualitas tersebut. Ma'had Al-Zaytun telah membuktikan, bahwa lembaga pendidikan Islam ini telah melahirkan lulusan bermutu. Pada tahun 2005 ini, Ma'had Al-Zaytun telah mengeluarkan lulusan Aliyah/SMU angkatan pertama sebanyak lebih dari 1,250 orang. Santri sejumlah itu mencatat sukses lulus mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Hal yang sangat membanggakan adalah, Ma'had Al-Zaytun sukses pula mengantar enam orang santri menempati enam posisi dari 10 peringkat teratas se-Provinsi Jawa Barat. Jadi, dari 10 besar terbaik lulusan Ujian Akhir di Jawa Barat, enam di antaranya diraih oleh santri-santri Ma'had Al-Zaytun. Ini jelas merupakan prestasi gemilang yang mengagumkan, sehingga tak berlebihan bila Ma'had Al-Zaytun memang menjadi pusat pembinaan santri-santri cemerlang.

Ma'had Al-Zaytun jelas bukan sembarang pesantren, karena lembaga ini dibangun berdasarkan konsep pem-



Masjid Rahmatan Lil 'Alamin.



Kehadiran Ma'had Al-Zaytun yang sangat fenomenal tak lepas dari figur Syaikh Abdul Salam Panji Gumilang, yang menjadi tokoh utama yang memainkan peran sentral dalam merumuskan cetak-biru lembaga pendidikan Islam terbesar dan termegah di Asia Tenggara ini.

bangunan pendidikan Islam yang cemerlang, dengan visi yang menjangkau ke masa depan yang sangat jauh. Bahwa lembaga pendidikan Islam harus mampu melahirkan insan-insan yang terpelajar, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan menguasai segala jenis ketrampilan teknis yang bermanfaat. Falsafah dasar pendidikan yang dikembangkan adalah membekali para santri dengan nilai-nilai Islam yang kuat, membimbing mereka agar dapat mendalami berbagai bidang pengetahuan dan beragam disiplin keilmuan, serta menguasai aneka macam kecakapan praktis yang bernilai guna bagi kehidupan di masyarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan teknologi tepat-guna. Dengan demikian, setelah tamat dari Ma'had Al-Zaytun nanti para santri dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan segala potensi yang dimilikinya secara baik.

Mungkin tak berlebihan bila dikatakan bahwa Ma'had Al-Zaytun merupakan pertanda awal bagi kebangkitan Islam di Indonesia yang berwawasan modern. Almarhum Fazlur Rahman, mantan mahaguru Filsafat Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat, yang sangat masyhur itu, suatu kali pernah meramalkan bahwa kebangkitan kembali umat Islam akan bermula dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ia merujuk Pakistan dan Indonesia sebagai dua wilayah strategis yang paling potensial, karena keduanya sangat kaya sumber daya manusia berkualitas. Namun, khusus bagi Indonesia, selain mempunyai banyak SDM bermutu, juga didukung oleh sumber daya alam yang

berlimpah dan modal sosial yang kuat, sehingga negara ini dipandang paling mampu menjadi motor utama penggerak kebangkitan kembali peradaban Islam.

Dalam perspektif demikian, ikhtiar untuk memperkuat basis pendidikan di kalangan umat Islam merupakan strategi yang sangat tepat. Sebab, melalui pendidikan akan lahir generasi baru Islam terpelajar, yang kemudian akan membentuk formasi sosial baru di masyarakat. Lapisan elite terdidik dari kalangan santri inilah, yang pada gilirannya nanti akan menentukan masa depan peradaban Islam. Dilihat dari kesiapan infrastruktur, barangkali Ma'had Al-Zaytun adalah salah satu, jika bukan satu-satunya, dari sedikit institusi Islam yang paling siap mengemban misi mulia dan menyongsong tugas sejarah yang amat berat ini.

Kehadiran Ma'had Al-Zaytun yang sangat fenomenal tak lepas dari figur Syaikh Abdul Salam Panji Gumilang, yang menjadi tokoh utama yang memainkan peran sentral dalam merumuskan cetak-biru lembaga pendidikan Islam terbesar dan termegah di Asia Tenggara ini. Alumnus Pondok Modern Gontor, yang kini menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini memang dikenal memiliki pemikiran maju dan berpandangan visioner. Ia adalah figur pemimpin berkarakter, berkharisma, brilian, dan mempunyai jaringan luas serta lobi ekonomi politik yang sangat kuat dan canggih, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Terlahir di daerah pantai utara Jawa Timur, yang dikenal sebagai kantong-kantong santri yang sangat kuat, sejak

muda Syaikh Abdul Salam Panji Gumilang terlibat secara total dalam dunia pergerakan Islam di Indonesia. Keterlibatannya dalam pergerakan Islam itu menjangkau wilayah geografi yang sangat luas: dari semenanjung Malaysia, Filipina, dan Thailand sampai ke Timur Tengah bahkan melintasi Afrika Utara, Afrika Barat, dan Eropa (Spanyol, Inggris, Prancis, Belgia). Mata rantai jaringan gerakan Islam yang melintas batas-batas negara dan menjangkau belahan dunia yang sangat luas itulah, yang menjadikannya amat mudah membangun akses dan mengembangkan lobi ke berbagai negara, untuk kepentingan pembangunan pendidikan bagi umat Islam di Indonesia.

Setelah sekian lama bergumul dalam gerakan Islam, Syaikh Abdul Salam Panji Gumilang sampai pada kesimpulan bahwa strategi yang paling efektif untuk membangun peradaban Islam adalah melalui pendidikan. Tokoh berwibawa yang menguasai bahasa Arab dan Inggris, serta sedikit Prancis dan Parsi ini, akhirnya mendirikan Ma'had Al-Zaytun.

Ma'had Al-Zaytun yang menawan itu adalah produk dari pengembaraan intelektual yang sangat panjang, kerja keras, ketekunan, dan keikhlasan untuk sebuah pengabdian bagi kepentingan bangsa. Yakni menyiapkan anak-anak bangsa

sebagai generasi penerus yang terdidik dan berkualitas, agar siap memasuki era global yang sangat kompetitif di masa depan. Syaikh Abdul Salam Panji Gumilang menginsyafi sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan persoalan strategis bagi sebuah bangsa. Pendidikan bukan saja penting bagi upaya melan-

hirkan individu dan masyarakat yang terpelajar, tetapi juga untuk membangun generasi baru yang siap menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, pendidikan juga menjadi bekal utama sebagai persiapan memasuki kompetisi global, sebuah persaingan antarbangsa yang demikian ketat dan berpengaruh terhadap semua dimensi kehidupan: ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada akhirnya pendidikan juga akan menentukan kualitas sebuah bangsa, serta berpengaruh secara signifikan dalam

mendorong proses transformasi sosial menuju kehidupan yang maju, modern, dan bermartabat. Benar nian ungkapan yang dikutip di atas: *"Give people a hand-out or a tool, and they will live a little better. Give them an education, and they will change the world."*

Demikianlah, Ma'had Al-Zaytun adalah contoh dari kisah sukses pembangunan pendidikan Islam di Indonesia. Ma'had Al-Zaytun telah membuktikan suatu hal yang sangat penting: pesantren dengan basis manajemen profesional dan kepemimpinan yang baik, sehingga dapat membuahkan lembaga pendidikan Islam yang sangat modern, canggih, dan berkelas. Ma'had Al-Zaytun laksana kawah candradimuka tempat persemaian bibit-bibit unggul pemimpin bangsa yang berkualitas. Dari Ma'had Al-Zaytun diharapkan akan lahir generasi baru Muslim yang tangguh, sehingga siap menyongsong masa depan yang penuh tantangan serta mampu menjawab berbagai persoalan umat Islam yang sangat kompleks. Di bawah kepemimpinan Syaikh Abdul Salam Panji Gumilang yang kuat dan tangguh, semua cita-cita luhur itu, *insya Allah*, dapat diwujudkan. ■

Amich Alhumami, peneliti di *Research Institute for Culture and Development [RICED]*, Jakarta.

Ma'had Al-Zaytun laksana kawah candradimuka tempat persemaian bibit-bibit unggul pemimpin bangsa yang berkualitas.



Pak Harto di Al-Zaytun

HADIAH PALING BERTERHARGA

dalam SEJARAH MA'HAD AL-ZAYTUN

Mantan Presiden RI, Bapak Pembangunan Nasional, H.M. Soeharto meresmikan ruang kuliah mahasiswa/mahasiswi Universitas Al-Zaytun, yang diberi nama Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soeharto.



Selasa, 23 Agustus 2005, merupakan momen yang sangat bersejarah dan monumental bagi seluruh sivitas akademika Ma'had Al-Zaytun (MAZ). Betapa tidak. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-6, Pondok Pesantren Peradaban Berskala Dunia itu mendapatkan kehormatan yang tak akan terlupakan dalam sejarah kehidupannya.

Meski secara fisik nyarus rapuh termakan usia dan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, H.M. Soeharto—yang sangat akrab disapa dengan Pak Harto— tetap berkenan memenuhi undangan untuk mengunjungi MAZ, bersilaturahmi dengan santriwan/santriwati, dan bahkan menginap satu malam di pusat pendidikan budaya toleransi dan perdamaian itu.

Sejatinya, ada satu hajat besar di kampus peradaban terpadu, *pesantren spirit but modern system*, pada hari itu.

Pak Harto meresmikan Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soeharto, salah satu gedung yang dimiliki Universitas Al-Zaytun (UAZ).

UAZ sendiri diresmikan pada Sabtu, 27 Agustus 2005 oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, pejabat negara yang ditunjuk Wakil Presiden (Wapres) H.M. Jusuf Kalla.

Sedianya, Wapres Jusuf Kalla sendiri yang akan meresmikan UAZ namun batal lantaran pada hari yang bersamaan beliau harus mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cirebon, Jawa Barat.

Sejak pukul 7:30 pagi, segenap aktivitas pesantren yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, itu telah dipusatkan di Masjid Rahmatan Lil 'Alamin, sebuah Monumen Millennium Ketiga, yang memiliki daya tampung 150.000 jamaah.

Spanduk besar berkain warna hijau dengan tulisan



dan Bapak Pembangunan Indonesia menghadiri, mengunjungi, dan bermalam di kampus Ma'had Al-Zaytun. Ini merupakan suatu pendorong yang sangat bermakna bagi kader-kader bangsa Indonesia yang sedang belajar di Ma'had Al-Zaytun ini," ucap Syaykh AS Panji Gumilang mengawali sambutannya.

"Pada Bapak kita Bapak Haji Muhammad Soeharto, Jenderal Besar TNI, kita sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kepedulian Bapak terhadap anak bangsa yang sedang membangun, yang sedang meneruskan cita-cita pembangunan yang selama ini Bapak rintis. Doakan kami semua Bapak, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ini mampu meneruskan apa yang menjadi cita-cita dan visi Bapak selama merintis pembangunan Indonesia dari sejak diamanatkan menjadi pemimpin bangsa ini sampai detik ini, dan sampai kapan pun."

Seusai pidato Syaykh MAZ, acara dilanjutkan pembacaan pidato Pak Harto yang dibacakan oleh putrinya Mbak Tutut. Sebelum menyampaikan pidato dari Pak Harto, Mbak Tutut menyampaikan permohonan maaf Pak Harto yang tulus karena tidak bisa berkomunikasi secara langsung, dan membacakan langsung pidatonya.

Mbak Tutut juga mengisahkan sedikit latar belakang sejarah pembangunan gedung perkuliahan tersebut. Pembangunan Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soeharto Universitas Al-Zaytun diprakarsai Syaykh AS Panji Gumilang, selaku pimpinan MAZ. Di satu kesempatan, Syaykh MAZ meminta ijin langsung

kepada Pak Harto agar nama beliau dapat dicantumkan sebagai nama gedung tersebut, yang akan dibangun oleh MAZ,

Pak Harto memberi izin dan menunjuk Yayasan Purnabakti Pertiwi untuk membantu proses pembangunan. Masih kata Mbak Tutut, Yayasan Purnabakti Pertiwi didirikan oleh almarhumah Ibu Hajjah Siti Fatimah Hartinah (Ibu Tien Soeharto), pada 23 Agustus 1983.

Yayasan yang bertujuan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pendidikan sosial maupun agama itu diketahui oleh Ibu Tien Soeharto sampai akhir hayatnya.

Tanggal 23 Agustus kiranya punya makna khusus bagi MAZ. Alasannya, tanggal dan bulan peresmian Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soe-

"Perasmian Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soeharto Universitas Al-Zaytun oleh Bapak Jenderal Besar H.M. Soeharto" terbentang di atas Mihrab Masjid Rahmatan Lil 'Aalamin, MAZ.

Sekitar lima ribu orang santri MAZ memenuhi lantai dasar masjid terbesar di dunia, yang pembangunannya menelan biaya sebesar kurang lebih 14 juta dolar AS atau Rp 135 miliar itu. Sementara itu, di bagian luar masjid, sebanyak dua ribu santri berseragam kepanduan berbaris memanjang dua lajur saling berhadapan, dari gerbang luar sampai pintu masuk masjid. Di hadapan mereka terbentang karpet merah yang berakhir di depan panggung kecil, persis di depan mihrab.

Waktu menunjuk tepat pukul 9.30 pagi. Suasana seketika khidmat. Yang dinanti-nantikan rupanya datang jua. Iring-iringan kendaraan yang membawa Pak Harto beserta rombongan memasuki halaman Masjid Rahmatan Lil 'Alamain.

Pak Harto dengan perlahan-lahan sekali menuruni tangga bis milik MAZ yang ditumpanginya. Bertopangan pada tongkat di tangan kanannya, dan tangan kiri dipegang oleh Syaykh Ma'had AS Panji Gumilang, Pak Harto berjalan dengan langkah tertatih-tatih memasuki masjid.

Senyum karismatis Pak Harto menubar ke seluruh hadirin yang menyesaki ruang dalam masjid. Ribuan bendera merah-putih dilambai-lambaikan oleh seluruh santriwan dan santriwati MAZ yang hampir dua jam menanti dengan penuh sabar di dalam masjid yang me-

miliki luas 99 meter x 99 meter itu, sebagai bentuk penyambutan atas kedatangan Jenderal Besar H.M. Soeharto.

Di barisan belakang, berjalan seiring mengikuti langkah perlahan Pak Harto dan Syaykh MAZ, selain rombongan keluarga, tim medis, para pengawal, dan para ekponen MAZ tampak

antara lain dua putri beliau, Hajjah Siti Hardiyanti Rukmana (akrab disapa Mbak Tutut) dan Hajjah Siti Hediati (akrab disapa Mbak Titik), mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat/mantan Kepala BKKBN/Ketua Yayasan Daman-diri Haryono Suyono, mantan Menteri Koperasi Soebijakto Cakrawardoyo, Ketua Yayasan Super Semar Subagio.

Iptek Harus Selaras dengan Ilmu Agama

Mengawali acara, pembacaan kitab suci Al Quran dan pembacaan sari tilawahnya oleh dua santriwan/santriwati MAZ. Selanjutnya, Syaykh AS Panji Gumilang langsung tampil ke atas mimbar, menyampaikan pidato sambutan selaku pimpinan MAZ.

"Anak-anakku pelajar putri dan pelajar putra yang saya dicintai, para guru, dosen, karyawan yang disanjung tinggi, pada hari ini Ma'had Al-Zaytun dalam memasuki umur yang keenam tahun mendapatkan satu karunia besar dari Tuhan Yang Mahaesa. Perintis, pelaku

Tidak sedikit kelompok dalam masyarakat kita yang mulai ragu terhadap ajaran dan nilai-nilai yang selama ini kita yakini.



harto Universitas Al-Zaytun (23 Agustus 2005) bertepatan dengan ulang tahun Yayasan Purnabakti Pertiwi yang ke 32. Dan lebih kebetulan lagi, menurut Mbak Tutut, tanggal 23 Agustus adalah hari kelahiran almarhumah Ibu Tien Soeharto.

Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soeharto memiliki luas 25.000 m2 dan berlantai delapan itu direncanakan akan dipergunakan sebagai ruang kuliah laboratorium Fakultas Pertanian Terpadu, laboratorium Fakultas Teknik, laboratorium Fakultas Kedokteran, laboratorium Fakultas Teknologi Informasi, laboratorium Fakultas Bahasa dan Ilmu Pendidikan, ruang pimpinan perkantoran serta ruang serba guna.

Pak Harto berharap, seperti disampaikan oleh Mbak Tutut, dengan adanya gedung itu akan bertambah lengkaplah sarana pendidikan MAZ sehingga tidak hanya akan dihasilkan ahli-ahli agama tetapi juga akan dilahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Dalam pidatonya, Pak Harto tak lupa menyampaikan petuah kepada generasi muda MAZ khususnya dan Indonesia umumnya. Pak Harto melihat, dewasa ini Indonesia menjadi tempat berkumpulnya

berbagai macam cita dan nilai serta berbagai macam faham ideologi.

“Bahkan Indonesia juga menjadi tempat perebutan kepentingan berbagai kekuatan dunia. Akibatnya tidak sedikit kelompok dalam masyarakat kita yang mulai ragu terhadap ajaran dan nilai-nilai yang selama ini kita yakini,” tandas Pak Harto.

“Sebaliknya, mereka juga masih bimbang untuk mengambil nilai-nilai yang baru. Keadaan yang demikian itu menyebabkan timbulnya kelompok masyarakat yang tidak stabil.”

Kondisi tersebut, Pak Harto memercati, jelas akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan bangsa dan negara Indonesia yang telah dibangun, yang telah dipertahankan kemerdekaannya, dan yang telah dikembangkan sebagaimana wujudnya sekarang secara bersama-sama oleh rakyat Indonesia.

Khusus kepada segenap civitas akademika Ma’had yang dalam keseharian dinamikanya dihuni sekitar 12.691 orang itu, Pak Harto menitipkan pesan yang sangat bermakna: “Ilmu pengetahuan dan agama tidaklah harus bertentangan. Ilmu pengetahuan membawa kenyamanan hidup, agama membawa kebahagiaan hidup. Tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi kita akan selalu hidup dalam keterbelakangan. Tanpa

agama kita akan hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Saya sangat berharap siswa-siswi Ma’had Al-Zaytun di bawah bimbingan para pimpinan dan guru yang profesional akan dapat mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai



bersama ini.”

Sebagai tanda peresmian Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soeharto Universitas Al-Zaytun, Pak Harto didaulat untuk membuka tabir prasasti.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan mengunjungi dan membuka pintu Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H.M. Soeharto di Universitas Al-Zaytun, sekitar 300 meter dari Masjid Rahmatan Lil ‘Alamin. Pak Harto membuka pintu gedung tersebut sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung tersebut. ■ AF, MS, LPS

Ilmu pengetahuan dan agama tidaklah harus bertentangan. Ilmu pengetahuan membawa kenyamanan hidup, agama membawa kebahagiaan hidup.

Tetangga Seberang MENUAI ASAP

Malaysia protes karena polusi udara akibat pembakaran hutan. Ternyata, beberapa perusahaan perkebunan negeri jiran itu ikut terlibat.

Pertengahan Agustus, Port Klang dan Kuala Selangor, Malaysia, bak kota hantu. Tak banyak penduduknya yang lalu lalang di luar rumah. Bahkan, sekolah dan sebagian perkantoran diliburkan. Siang hari cuaca masih gelap. Kabut tebal di mana-mana.

Kebakaran hutan di wilayah pulau Sumatera, khususnya Riau, Indonesia, lagi-lagi membuat negeri itu kalang kabut. Tingkat polusi udara di kedua kota itu bahkan sudah mencapai level di atas 500 alias "Berbahaya."

Seperti dilansir media massa di Indonesia maupun di negeri jiran itu sendiri, Minggu, 14 Agustus lalu, sekelompok warga Malaysia berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Bahkan sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi sempat menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, perkembangan berita tentang kabut asap yang melanda Malaysia berujung pada hasil investigasi Kementrian



terian Lingkungan Hidup, bahwa delapan dari sepuluh perusahaan perkebunan yang diketahui membuka lahan dengan pembakaran adalah perusahaan asal Malaysia.

Menanggapi hal itu, seperti dilaporkan harian *Media Indonesia*, 14 Agustus 2005, Per-

dana Menteri Abdullah Badawi pun langsung berjanji menghukum pengusaha perkebunan asal Malaysia yang terbukti melakukan pembakaran lahan di Indonesia itu. Menurut Badawi, seharusnya para pengusaha itu sadar bahwa pembakaran lahan yang mereka

lakukan akan berdampak pada negeri mereka sendiri.

Beberapa harian lainnya, di antaranya *Kompas* menulis, Setelah pembicaraan darurat Menteri Kehutanan RI MS Ka'ban dengan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Adenan Satem, disusul penandatanganan kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi RI Kusmayanto Kardiman dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia Dato Jamaludin Jarjis, maka antar kedua negara sepakat bekerja sama mengantisipasi dan menanggulangi kejadian yang sering terulang itu.

Kerjasama itu, antara lain mengirim bantuan *bomba* (pemadam kebakaran) Malaysia, modifikasi cuaca untuk hujan buatan dan meningkatkan penginderaan deteksi jarak jauh atas titik panas (*hot spot*) yang lebih dini dan akurat, selain dengan satelit juga dengan pesawat terbang. Sejauh ini, kerjasama modifikasi hujan buatan dilakukan Indonesia bersama Malaysia dan Singapura.

Amat disayangkan, bahwa seperti ditulis majalah *Forum Keadilan*, 28 Agustus 2005, bahwa kebakaran hutan juga disebabkan pembalakan haram (*illegal logging*) oleh penduduk setempat. Di mana kayu-kayu curian itu ditampung oleh sindikat dari Malaysia dan China. ■ RH

RIMBA MAKIN MERANGGAS

Selain kebakaran hutan, ancaman paling serius terhadap hutan di Indonesia adalah pembalakan atau penebangan secara liar. Hutan Indonesia terancam musnah. Dari sudut ekologi, kerusakan parah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang harus ditanggung dalam jangka panjang. Dari sisi ekonomi, dua tahun terakhir saja, negara dirugikan lebih dari Rp 90 triliun.

Sayangnya, seperti dibahas harian *Media Indonesia*, 1 September 2005, dari ratusan tersangka pelaku *illegal logging* yang diserahkan ke pengadilan, belum satupun yang divonis.

Pembalakan terjadi di seantero Nusantara. Bukan hanya di Sumatera, Papua, Kalimantan dan Sulawesi saja, namun juga terjadi di Jawa, khususnya di kawasan Nusakambangan.

Banyak faktor yang menyebabkan pemberantasan *illegal logging* tidak pernah berhasil. Diantaranya jumlah personel Polisi Kehutanan yang tidak memadai. Misalnya, di Papua hanya ada 188 orang personel yang sebagian hampir pensiun. Dana insentifnya hanya Rp 100.000 per bulan. Sementara luas wilayah kerja di Papua 3,5 kali luas pulau Jawa.

Selain itu, kurangnya sarana pendukung seperti kapal-kapal patroli. Padahal jalur sungai rawan penyelundupan kayu hasil tebangan liar. Diperparah dengan permainan para oknum pejabat kehutanan dan kepolisian yang berkolusi dengan para cukong kayu. ■ RH

KERUGIAN ILLEGAL LOGGING

TAHUN	Kerugian
2002	Rp 27.771.220.000
2003	Rp 195.655.570.000
2004	Rp 99.839.666.000

CATATAN:

Tahun 2004, kasus yang sudah ditangani 530 kasus. Rata-rata hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Kerugian tercantum hasil dari kasus yang tertangkap basah. Yang tidak tertangkap bisa 3-4 kali lipat.

IJAZAH PALSU: JALAN PINTAS Menjadi 'TERHORMAT'

Sejak pertengahan Agustus media massa sibuk menulis keberhasilan Polri mengungkap dugaan penipuan pemberian ijazah palsu, yang dilakukan oleh Intitute Management Global of Indonesia (IMGI), Jakarta. Sebagian pelakunya sudah ditahan.

Polri, yang mulai melempem memberantas perjudian menemukan terdapat 9.237 orang Indonesia yang mengantongi gelar akademis palsu setingkat S-1, S-2 dan S-3 hingga profesor keluaran IMGI.

Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Soenarko Danu Ardanto, kepada *Kompas* (23/8) memerinci peraih doktor 1.060 orang, Ph.D 288 orang, MBA 2.999 orang, MSc 948 orang, MHA 33 orang, MA 93 orang, MBL 4 orang, MPA 9 orang, BBc 1.228 orang, MPC 5 orang, BSc 112 orang dan DBA 42 orang serta

Untuk menjadi 'terhormat' siapapun bebas mencantumkan gelar akademis yang diraih tak secara akademis. Inilah ironi feodalisme baru yang muncul kembali di tengah-tengah modernitas global. Depdiknas perlu membersihkannya.

profesor 103 orang yang semuanya palsu.

Nama-nama mereka, jika saja Depdiknas mau terbuka mengungkapkannya demi pembersihan, sungguh menceangkan. Karena terdiri para petinggi dan mantan petinggi negara, serta mereka yang selama ini dikenal hidup terhormat

dan terkenal. Mereka adalah lulusan 1997 sampai Mei 2004, jadi di luar itu tentu ada banyak lagi beredar pemilik ijazah palsu.

IMGI yang berkantor di Century Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, memiliki 60 kantor cabang di berbagai kota, disebut-sebut berafiliasi dengan Northern California Global University (NCGU), California, AS. Setiap orang yang ingin mencantumkan gelar palsunya di depan namanya, cukup membayar sekitar Rp 10-25 juta, sudah termasuk biaya wisuda dan toga yang semuanya tentu palsu.

Feodalisme Baru

Sejumlah pakar pendidikan dan etika menuangkan pendapatnya usai dugaan pemberian ijazah palsu terbongkar. Mereka, umumnya memaknai kasus ini sebagai momentum untuk mendidik masyarakat supaya kembali berlaku jujur, percaya diri, dan tidak perlu larut dalam alam feodalisme modern.

Mereka juga melihat mulai muncul kembali kecenderungan buruk baru di masyarakat. Demi kehormatan semu, gengsi dan pamer diri para tokoh memakai gelar (kalau yang ini tidak palsu, *Red*) tidak pada tempatnya. Karena itu perlu kebesaran hati para pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara untuk memakai gelar akademik secara proporsional.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, misalnya, mengatakan, penggunaan gelar akademik dalam kegiatan birokrasi sehari-hari tidaklah mendidik masyarakat. Karena akan menumbuhkan-suburkan pencarian identitas diri yang semu.

"Tanpa gelar akademik pun pejabat setingkat presiden, menteri dan anggota DPR akan dihormati oleh masyarakat sepanjang kinerja dan moralitasnya baik", kata



Azyumardi, kepada *Kompas* (30/8).

Dosen etika Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Alois Agus Nugroho, memberi contoh lain kebesaran hati para petinggi militer sejak dahulu. "Dulu, jenderal yang dikaryakan di lembaga pemerintahan rela menanggalkan pangkat di depan namanya. Pangkat hanya dipakai ketika yang bersangkutan berada di lingkungan militer."

Pengamat pendidikan, Prof Dr Muhamad Ali, menilai kasus jual beli gelar mencoreng wajah pendidikan di Indonesia, termasuk pemberian gelar doktor honoris causa yang tidak jelas keabsahan siapa lembaga pendidikan dan apa konsep penyelenggaraannya. "Lalu, apa yang dapat diharapkan dari penyandang gelar doktor tersebut," kutip *Suara Pembaruan* (13/8).

Mendiknas Bambang Soedibyo, kepada *Suara Karya* (23/8) menyebutkan terdapat sekitar 50 lembaga pendidikan tinggi (PT) ilegal yang mengeluarkan ijazah palsu. Nama-namanya sudah diserahkan kepada polisi untuk segera ditindak.

Kepala Bidang Perizinan Ditjen Dikti Depdiknas, Ir. Arief, menyatakan, Yayasan IMGI hanya memiliki izin kursus keterampilan yang dikeluarkan Kanwil Depdiknas DKI Jakarta.

IMGI disangka melanggar UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengamat pendidikan Prof Dr Anwar Arifin kepada *Suara Pembaruan* (13/8) mengutip pasal 67 ayat (1), yang menyebutkan perorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi tanpa hak dipidana paling lama 10 tahun atau denda Rp 1 miliar. Arifin menyebutkan sudah menjadi tugas pemerintah untuk melaksanakan UU tersebut.

Sementara ayat (3) menyebutkan, terhadap orang yang membantu terselenggaranya praktek melanggar hukum itu dapat dihukum selama lima tahun penjara dengan denda maksimal Rp 500 juta. Dan kepada pihak yang menerima dan memakai gelar tersebut bisa dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 500 juta.

Jika sangkaan turut diberikan berdasarkan ketentuan KUHP pasal 378 tentang penipuan, dan pasal 263 tentang pemalsuan, maka baik penyelenggara maupun mereka yang ikut membantu khususnya yang ikut menerima ijazah palsu, semuanya dapat dijerat secara hukum. ■ SP

Buruk rupa cermin dipecah. Perum pamaan inilah yang kini sama-sama dilakukan oleh pihak kampus dan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Kampus menyalahkan mahasiswa, sebaliknya mahasiswa mencela kampus.

(19/8).

Ia menyebut pula banyak mahasiswa tidak bisa beradaptasi dengan sistem pendidikan yang berlaku di ITB. Budaya membaca di kalangan mahasiswa masih rendah dan menganggap sistem belajar di ITB sama dengan di

RATUSAN MAHASISWA ITB DI-DO

Pihak rektor menyatakan 190 mahasiswa harus di-DO (*drop out*) alias keluar. Mereka sejak pertengahan Agustus tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademis karena prestasi mereka di bawah standar.

"Indek Prestasi Kumulatif (IPK) mereka tak memenuhi syarat," kata Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB Adang Surahman, kepada *Republika*

SMA.

Keputusan kebijakan DO segera menandai protes. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa ITB, menggelar aksi keprihatinan. Mereka menilai banyaknya mahasiswa yang *drop out*, terjadi justru karena buruknya sistem pendidikan dan pengajaran di Kampus Ganesha tersebut. ■ SP

GURU BANTU TAK LAGI 'MEMBANTU'

Setelah didesak melalui sejumlah demonstrasi Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengangkat semua 236.011 guru bantu di seluruh tanah air menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tahun ini terhadap 100.000 dulu, sebagai bagian bersama dari rekrutmen 300.000 PNS yang dilakukan Kementerian PAN, sisanya dirapel tahun depan.

Kepada guru bantu yang tahun ini belum diangkat, tetap ikut berbahagia sebab mendapat kenaikan honorarium dari Rp 461 ribu menjadi Rp 710 ribu.

Kesepakatan yang terjadi pada rapat kerja DPR dengan Depdiknas dan Kementerian PAN (24/8), adalah angin segar baru buat Asep Hidayat, guru bantu yang sudah 11 tahun bertugas di SD Negeri Rejeng, Tangerang, Banten.

Asep yang tahun ini sudah berusia 41 tahun, semakin bisa bernafas lega setelah mengetahui usia guru bantu yang akan diangkat diijinkan maksimal 46 tahun, jauh melewati plafon calon PNS maksimal 35 tahun.

Pada guru bantu belakangan ini sempat resah, terutama yang akan habis kontraknya akhir tahun 2005 ini dan mengabdikan di daerah pula. Nasib mereka memang telah lama terkatung-katung.

Di Sukabumi, ratusan guru bantu yang tergabung dalam Forum Komu-

nikasi Guru Bantu (FKGB) menggelar doa bersama (19/8) di halaman masjid Agung Pelabuhan Ratu. Isi doa meminta pemerintah mengangkatnya menjadi PNS.

Di Tangerang, Kadisdik Muhyi Syahrifudin menyebutkan, di daerahnya terdapat 3.850 guru bantu. Mereka dikontrak selama tiga tahun, terhitung sejak 2002 dengan gaji Rp 46 ribu/bulan.

Kata Muhyi kepada *Koran Tempo* (11/8), jika guru bantu tidak diangkat menjadi PNS baru, atau kontrak mereka tak diperpanjang maka angka pengangguran di Tangerang akan semakin membengkak.

Anggota DPD asal Bali, I Wayan Sudirta, ketika melakukan kunjungan kerja ke Karangasem, Bali, tulis *Sinar Harapan* (15/8), merasa prihatin atas nasib guru kontrak. Apalagi, banyak diantara mereka sudah berusia diatas 40 tahun.

Ketua Forum Komunikasi Guru Kontrak Daerah (FKGKD) Karangasem-Bali, I Made Widastra, menyebutkan pula selama menjadi guru kontrak terkesan mereka diperlakukan diskriminatif. Jumlah mereka yang 835 orang, gajinya sangat minima Rp 400 ribu per bulan, di bawah UMP Rp 447.000 perbulan. ■ SP

Kurikulum 2004 Tanpa 'PEMBERONTAK'

Di setiap pergantian rejim adalah mahfum apabila yang dahulu pemberontak menjadi pahlawan, dan pejabat menjadi penjahat.

Akan tetapi materi pelajaran bidang studi Sejarah Nasional pada Kurikulum 2004 aneh, sebab tidak mencantumkan siapa pemberontak dan penjahat yang berperan dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Peran pahlawan yang menyelamatkan bangsa menjadi samar pula jadinya.

Karena kekisruhan itu Mendiknas, melalui keputusannya Nomor 7/2005 menunda penerapan Kurikulum 2004 khusus untuk bidang studi Sejarah, untuk kembali ke Kurikulum 1994 beserta Suplemennya (1999).

Sejarahwan Asvi Warman Adam, APU LIPI menanggapi secara segera kebijakan Mendiknas tersebut. Dalam tulisannya, Kurikulum Sejarah 1994 "versus" 2004"



(*Kompas*, 1/7), Asvi menilai Mendiknas terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan.

AA Padi, pengajar Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam tulisannya di *Kompas* (22/8) menyebutkan Kurikulum Sejarah 1994 dan Suplemennya 1999 tak lagi mencantumkan nama PKI di belakang G30S. Apalagi, menyebut PKI sebagai pelaku atau dalang.

AA Padi berkesimpulan, dalang G30S bisa saja Amerika Serikat/blok Barat, bisa saja PKI, bisa Soekarno, dan bisa saja Angkatan Darat/Soeharto. "Siapa pelaku yang benar, belum jelas, karena memang keterbatasan sumber," sebut AA Padi.

Kurikulum Sejarah Nasional 2004, yang sudah diujicobakan pada siswa SD, SMP,

dan SMA berikut sejumlah buku resminya, sebelum ini banyak menuai protes keras terutama dari berbagai kalangan Muslim.

"Kami menegaskan penolakan atas Kurikulum Sejarah 2004, di mana dalam kurikulum itu telah dihapus kata-kata PKI pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun dan Gestapu (G30S/PKI)," kata KH Yusuf Hasyim, Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

Republika (22/6) mengutip pernyataan Pak Ud itu, sapaan khas KH Yusuf, saat bersama sejarahwan Taufik Ismail dan tokoh Islam Fadli Zon dan Ahmad Soemargono menemui Ketua DPR Agung Laksono. "Ada konspirasi untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia," kata Taufik Ismail.

"Sangat disayangkan jika Kurikulum Sejarah 2004 menghapus fakta sejarah pemberontakan PKI," respon Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Era reformasi memang telah memberi angin sangat segar kepada para eks anggota PKI. Semangat pengampunan banyak mereka terima, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 60 (g) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tidak berlaku lagi.

Pasal itu, adalah larangan bagi anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau yang terkait dengan G30S/PKI, untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal itu dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945

yang tidak membenarkan diskriminasi terhadap warga negara.

Walau ada semangat pengampunan, karena baik pelaku maupun korban pastinya adalah saudara-saudara sebangsa setanah air, bukan berarti dua kali peristiwa pemberontakan di tahun 1948 Madiun dan 1965 di Jakarta dinafikan begitu saja.

Pengampunan juga bukan berarti menjadi tak ada pelaku pemberontakan. Jika alasan penghilangan nama PKI karena keterbatasan sumber sejarah yang tidak kuat, seperti disebut AA Padi, maka dengan semangat pengampunan yang sama pula ada baiknya dokumen negara yang sudah kadaluarsa berusia di atas 30 tahun dibuka untuk memastikan siapa pelaku. ■ **RF, SP**

ANGGARAN PENDIDIKAN TERBESAR TAPI MASIH KECIL

Anggaran pendidikan tahun 2006 diusulkan Rp 31,5 miliar, naik Rp 10 triliun dibanding tahun 2005 yang Rp 21,5 triliun.

Pendidikan adalah sektor terbesar penerima anggaran dalam RAPBN 2006. Kenaikan dimaksudkan untuk membiayai program sekolah gratis terbatas, pengangkatan ratusan ribu guru bantu menjadi PNS, serta untuk meningkatkan kesejahteraan pada pendidik.

Walau sudah naik Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, menilainya tidak realistis. "Seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas Rp 50 triliun," ujar mantan Ketua Umum KNPI ini.

Tjahjo, menyebutkan, anggaran sebesar itu masih belum cukup untuk memberi subsidi program wajib belajar sembilan tahun, memenuhi gaji guru bantu dan guru honorer di daerah, serta untuk merehabilitasi 800.000 sekolah yang rusak.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjoguritno. Ia menyebut anggaran itu tidak akan pernah direalisasikan. "Realisasi anggaran itu nantinya hanya wacana saja".

Penilaian berbeda diberikan Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar. Ia menyebutnya sudah realistis karena arahnya sudah jelas, yakni mengejar target yang ditetapkan UU anggaran pendidikan nasional harus mencapai 20 persen dari APBN.

Emir Moeis, Ketua Panitia Anggaran DPR menilai anggaran sebesar itu sudah cukup besar. Jika masih ingin ditingkatkan, sesuai usulan FPDI-P, harus dilihat dulu kemampuan anggaran negara. ■ **SP**

SIMBOL SOLIDARITAS GELANG KARET

BENTUKNYA MEMANG SEDERHANA DAN WARNA-WARNI. TAPI MAKNANYA LEBIH DARI SEKEDAR AKSESORI BUAT BERGAYA.



Belakangan ini, banyak anak muda memakai gelang karet berwarna-warni di tangannya. Media massa mengamati gejala itu sebagai suatu fenomena mode yang menarik untuk dibahas. Maka, sejak Juli sampai Agustus, berita-berita tentang gelang karet ini banyak dimuat di harian-harian maupun berbagai majalah.

Kebanyakan menilai fenomena gelang karet sebagai simbol terbaru kepedulian global yang dipakai jutaan penduduk dunia saat ini. Di Amerika, bukan hanya rakyat biasa, namun juga politikus dan kaum selebriti yang memakai simbol ini. Robin Willian, Sheryl Crow dan John Kerry memakai gelang kuning untuk mendukung penelitian kanker. Bono (vokalis U2) dan Bob Geldof memakai gelang putih

“Make Poverty History” untuk memerangi kemiskinan.

Pesepakbola David Beckham memakai gelang biru untuk kampanye *anti-bullying*. Thierry Henry dan Ronaldinho memakai gelang hitam dan putih untuk kampanye anti rasialisme.

Maka, jadilah gelang karet itu bukan sekedar aksesoris, melainkan menjadi gelang kepedulian (*support wrist-band*). Banyak yayasan sosial menggunakannya untuk menggalang dana. Cara ini berawal dari kampanye “Wear Yellow” yang digagas pembalap sepeda kelas dunia Lance Armstrong melalui yayasanya.

Ditulis harian “Kompas”, 28 Agustus 2005, gelang berwarna kuning

bertuliskan “Live Strong” itu dijual 17 Mei 2004 bekerja sama dengan Nike, sebagai dukungan untuk penderita kanker, penyakit yang pernah didap Armstrong. Sekitar 50 juta gelang kini berhasil dijual ke seluruh dunia.

Kesuksesan itu kemudian diikuti pula oleh beberapa yayasan sosial di Indonesia. Yayasan Tunas Cendekia (YTC) menggagas gelang warna merah bertuliskan “Solidaritas Kebersamaan” untuk mendukung peningkatan pendidikan anak-anak Indonesia. Yayasan Santosa Lestari (YSL) juga menjual gelang warna oranye dengan slogan “K a m i P e d u l i,” untuk menyumbang pendidikan anak-anak Aceh dan Nias. Yayasan Jantung Indonesia juga menjual gelang biru “I Love My Heart. Let It Beat” untuk mendanai operasi anak-anak tak mampu yang punya kelainan jantung bawaan. Ada juga gelang untuk menggalang dana bagi korban tsunami Aceh.

Para produsen barang tak melewatkan kesempatan itu untuk berpromosi dengan hadiah gelang karet setiap pembelian produknya. Sebuah produk sampo bahkan berhadiah gelang karet anti narkoba. Produksi massal demi komersialisme juga tak ketinggalan. Harganya dari Rp 10.000 sampai Rp 50.000, tetapi tentu saja semua keuntungannya masuk ke kantong si penjual. Sekarang terserah kepada konsumen. Mau beramal atau hanya mau mengikuti tren. ■ RH

BEBERAPA TEMPAT PEMESANAN GELANG KEPEDULIAN ASLI:

- ◆ Gelang Solidaritas Kebersamaan: Situs YTC, www.tunascendekia.org, Perpustakaan Diknas, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta.
- ◆ Gelang Kami Peduli: Yayasan Santosa Lestari, Wisma Millenia Lt. 6, Jl. MT Haryono Kav. 16, Jakarta 12810. Tlp. (021) 8310256 Ext: 1437
- ◆ Gelang Tsunami Aid/Bantuan Korban Tsunami: www.wearstunamiband.org
- ◆ Gelang Jantung Sehat: Yayasan Jantung Indonesia, Jl. Teuku Umar No. 8, Jakarta Pusat.

Selalu Bimbang Ya?

Kebetulan atau tidak, huruf awal (kapital) dari tiga kata yang terangkai menjadi kalimat “Selalu Bimbang Ya?” dan diwarnai kuning tebal itu, bila diamati dengan seksama merupakan singkatan dari SBY, panggilan paling akrab yang ditujukan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Majalah *Tempo* (edisi 29 Agustus-4 September 2005) sengaja memasang kalimat tersebut sebagai judul pada sampul mukanya. Sesuai judulnya terpampang gambar karikatur SBY yang sedang bingung seraya memegang timbangan: tumpukan rupiah di sisi yang satu dengan drum minyak di sisi lainnya.

Dalam rubrik “Opini”, majalah ini menyikapi secara kritis langkah Presiden SBY yang terkesan bimbang dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan yang sangat terbatas namun tidak bisa ditunda-tunda: hapus subsidi BBM yang membebani negara; hapus persepsi tentang inkompetensi beberapa menteri bidang ekonomi dan keuangan dengan *me-reshuffle* beberapa menteri terkait.

“Sendi stabilitas rupiah, untuk saat ini, adalah pada rasa percaya kepada pemerintah. Jika momentum memulihkan kepercayaan ini dilewatkan, akibatnya pada nilai rupiah akan lebih gawat,” tulis majalah ini berpendapat.

Pada edisi 8-14 agustus 2005, *Tempo* menurunkan berita tentang heboh rekening 15 perwira kepolisian yang dianggap mencurigakan. Dengan judul “Rekening Panas Tuan Polisi,” majalah ini menulis sejumlah jenderal polisi diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Dari laporan yang disorongkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, ke meja kerja Kapolri Jenderal Sutanto, ditemukan bahwa rekening para perwira itu mencapai angka miliaran rupiah. Jumlah yang tak mungkin dicapai para

polisi jika hanya mengandalkan gaji bulanan. Siapa saja mereka? Bagaimana gaya hidup mereka? Betulkan mereka menerima setoran di luar gaji itu kebiasaan polisi?

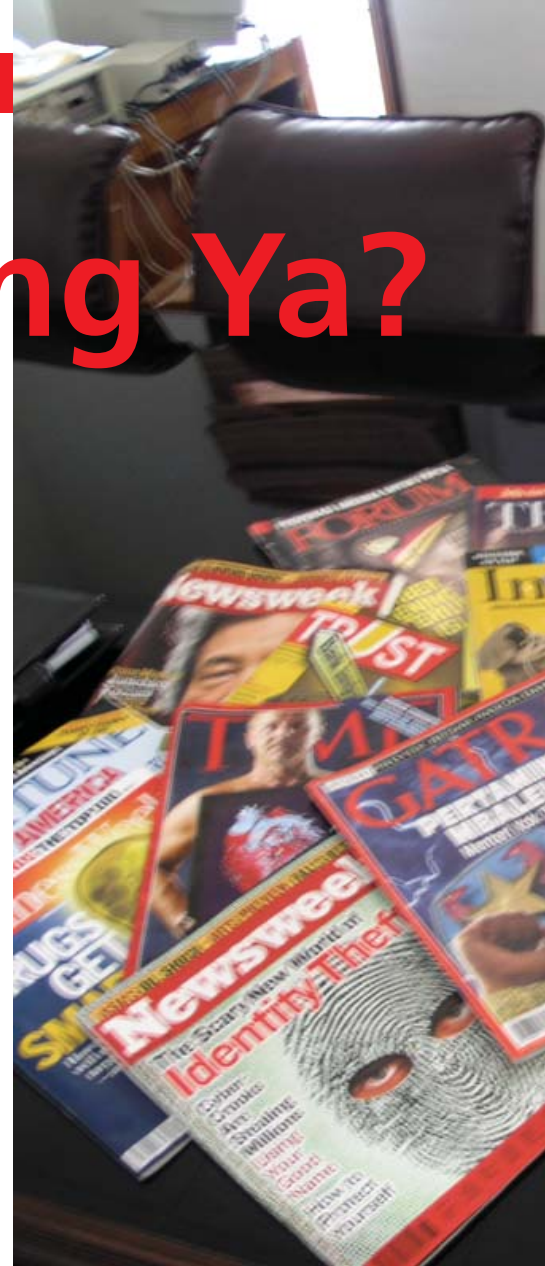
“**Menepis Hepatitis**” adalah judul sampul majalah *Gatra*, (edisi 3 September 2005) dan ulasannya dimuat dalam rubrik laporan utama. Majalah ini berangkat dari penyakit yang diderita almarhum cendekiawan muslim Nurcholis Madjid, setelah liver hasil cangkokan di Cina terserang tumor.

Penyakit ini menempatkan Indonesia di urutan ketiga untuk kawasan Asia Pasifik untuk ditumpas. Sekarang para ilmuwan dan para dokter tengah memfokuskan pada terapi berbasis interferon. Semanjur apa terapi yang selain membunuh virus juga mendongkrak kekebalan tubuh itu, masih ditunggu hasilnya.

Gatra juga menulis tentang jual beli gelar seperti kasus Institut Management Global Indonesia (IMGI) yang menyeret beberapa pejabat dan jenderal. Polisi mulai bertindak tegas terhadap perguruan tinggi ilegal.

Pada edisi 20 Agustus 2005, *Gatra* menurunkan sajian khusus berjudul “Jejak Ekonomi Indonesia”, edisi khusus dalam rangka memperingati 60 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan, Indonesia tertinggal jauh di belakang. Jika ekonomi Indonesia tumbuh 5% setahun, berarti 25 tahun lagi baru akan setara dengan ekonomi Malaysia saat ini. Dibutuhkan kerja keras dan perencanaan yang matang dan konsisten, serta tidak tambal-sulam dalam



menata ekonomi Indonesia ke depan.

Majalah TRUST, dengan laporan utamanya berjudul “Awat Krisis Ke-2 di Depan Mata”, menyoroti perkembangan dua pekan terakhir yang menyedot energi dan pikiran Presiden SBY dan jajarannya terutama dengan tim Ekonomi, dan Gubernur Bank Indonesia. Masalahnya sejak nilai tukar rupiah yang terus anjlok melampaui batas psikologis Rp 10.400 per dolar. Tak heran bila kalangan dunia usaha dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Para pelaku ekonomi pun panik dan berburu dolar.

Pada edisi 15-21 Agustus 2005, majalah ini menurunkan judul, “Pri-Nonpri di Persimpangan Jalan”, dengan tekanan bahwa setelah 60 tahun merdeka ternyata belum cukup bagi bangsa ini untuk mengenali dirinya sendiri.

Wapres Yusuf Kalla pun melontarkan



tapi prospeknya sangat menggiurkan. Lihat saja apa yang terjadi di PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk yang merupakan dua pemain utama di bisnis telekomunikasi Indonesia.

“Membidik Jantung Korupsi” adalah judul majalah *Konstan* (Edisi Agustus 2005) dalam mengulas upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi yang terjadi di jantung pusat pemerintahan yaitu Sekretariat Negara (Setneg), salah satu lembaga yang tak pernah tersentuh hukum.

Kekebalan dan kesan angker Setneg bakal sirna oleh tangan Presiden SBY sendiri. Tak tanggung-tanggung, Surat Perintah Penyidikan No 33/F2/FD.1/05/2005 telah dikeluarkan Presiden, yang memang sejak awal berniat untuk ‘bersih-bersih rumah’.

Majalah Berita Newsweek, (Edisi 5 September 2005) dalam laporan utamanya berjudul, “Matinya Reformasi di India”, menulis, PM Manmohansing, dalam setahun pemerintahannya, telah melakukan upaya untuk menghidupkan kembali reputasinya sebagai bapak reformasi ekonomi India, tanpa dukungan partai-partai sayap kiri yang dibutuhkan oleh pemerintahan koalisinya untuk bertahan. Belakangan, saat Partai Kongres bermain mata dengan Partai Komunis, keseimbangan mulai goyang. Satu persatu reformasinya mati atau terkubur. Hari-hari ini, Sing berbicara tentang perlunya para politisi berkompromi untuk mempertahankan jabatannya.

“**Bin Laden Baru**” itulah laporan utama yang ditulis Majalah *Time* (Edisi 5 September 2005). *Time* melaporkan, pemimpin Al Qaida di Irak, Abu Mousab Al Zarqawi, diisukan menderita luka parah atau tewas beberapa bulan lalu. Organisasi yang dipimpinnya diduga berada di balik serangan-serangan barbar di Irak dan bertanggungjawab terhadap serangan roket yang gagal yang diarahkan ke sebuah kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Amatlah sulit untuk memisahkan Abu Mousab dari mitos tersebut. Tetapi laporan-laporan intelijen Eropa mengisyaratkan, jaringan Al Qaida Irak berkembang jauh di luar perbatasan Irak dan dia sekarang menjadi saingan Osama Bin Laden dalam merebut pengaruh di Timur Tengah dan di kalangan penganut jihat Eropa. ■ #F, SB

pernyataan, pengusaha pribumi akan didorong demi adanya keseimbangan di antara pelaku ekonomi. Selama ini, menurut Kalla, pengusaha pribumi masih belum bisa menandingi kecepatan perkembangan bisnis nonpribumi.

“**Ketika Preman Berdasi Berdaulat**” itulah judul utama dari majalah *Forum Keadilan* (Edisi 4 September 2005). Berita lain: ‘*Kakap’ Dibidik ‘Teri’ Didapat*. Menerima cibiran bahwa jajarannya hanya mampu menggaruk preman kelas teri, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Firman Gani sesumbar akan menyikat 40 preman kelas kakap.

Pada edisi 21 Agustus 2005, laporan utama *Forum* menyoroti misteri kematian seorang jaksa yang menjabat Wakil Kejati Sultra Umu Lage Lozara. Banyak ditemukan kejanggalan atas kematiannya. Spekeluas yang berkem-

bang, almarhum saat meninggal tengah menyidik beberapa kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat daerah setempat.

Akankan dengan kematiannya akan menutup pengusutan korupsi di wilayah hukum Sultra? Dalam catatan daftar riwayat hidupnya almarhum memang banyak berkutat dengan kasus pengungkapan korupsi. Dan pada bagian akhir dari catatan riwayatnya disebutkan “Tak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri sipil”.

Majalah Investor (Edisi 23 Agustus, 5 September 2005) menulis dinamika persaingan bisnis telekomunikasi selama lima tahun terakhir. Lewat judul “Semakin Sengitnya Persaingan Bisnis Telekomunikasi,” majalah ini mencatat bisnis telepon seluler mencapai angka pertumbuhan 1000 %. Persaingan ketat

DPR DEBAT KESEPAKATAN DAMAI

Sejumlah butir kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM menuai kritik. Media massa cetak Jakarta terbelah pro-kon.

Era damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka dimulai, menutup lembaran berdarah bertahun-tahun sejak 1976. Harian *Media Indonesia*, milik baron media Surya Paloh, di dalam editorialnya (25/8) menyambut baik kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM yang ditandatangani di Helsinki (15/8).

Namun koran ini mengkritik komplikasi atas pelaksanaan kesepakatan tersebut akibat perdebatan antara pemerintah dan DPR yang mengabaikan hasil dan prosedur. DPR tidak saja ngotot pada keagungan prosedur, tetapi juga cerewet dengan hasilnya. Sementara itu pemerintah masih bimbang antara penghormatan pada proses dan hasil, harus ditangkap sekarang atau tidak sama sekali.

Perdamaian, tulis *MI*, menuntut dua kerelaan pokok: memaafkan dan melupakan,

sembari mengingatkan DPR bahwa dengan mempersoalkan terus kesepakatan tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa rakyat di negeri ini tidak setuju berdamai. Karena itu koran ini berasumsi bahwa perdamaian di Aceh jauh lebih penting daripada ego kelembagaan, tirani prosedur dan hasil.

Sebaliknya, *Koran Tempo*, menilai: "Hak DPR meminta penjelasan kepada pemerintah tidak patut dihambat, apalagi dicurigai sebagai pernyataan tidak suka melihat kenyataan Aceh yang damai." Di dalam editorial (18/8), harian ini melihat bahwa bagi Indonesia, harga kesepakatan tersebut kelewat mahal. Pasalnya, banyak lubang di dalam pengaturan ketatanegaraan dan ekonomi, dikhawatirkan bisa menimbulkan rasa tidak adil bagi daerah-daerah lain. Tidak berarti, harian ini tidak mengharga perjanjian yang dicapai kedua pihak yang bertikai.

Hal-hal yang dianggapnya menimbulkan masalah di belakang hari, misalnya, GAM tak pernah dinyatakan bubar dan dibolehkannya Aceh punya bendera sendiri, atau identik dengan bendera GAM. Sedangkan di bidang ekonomi, Aceh boleh menetapkan suku bunga bank sendiri. Yang dipertanyakan oleh harian ini, apakah ini berarti Aceh boleh punya bank

sentral dan mata uang sendiri, sementara Aceh tetap jadi bagian RI?

"Semua ini layak dipersoalkan secara terbuka supaya daerah lain tidak merasa ditinggalkan. Pemerintah harus adil terhadap semua daerah, jika tidak, ini ibarat bisul, sembuh di satu tempat, muncul lagi di tempat lain," tulis harian ini.

Harian sore, *Suara Pembaruan* sependapat dengan *Koran Tempo* bahwa di dalam kesepakatan tersebut terdapat titik-titik rapuh, terutama menyangkut interpretasi masing-masing pihak, biasanya muncul pada tahap pelaksanaan. Harian ini menyalkan hak putus yang diberikan kepada Kepala Misi Monitoring untuk penyelesaian sengketa, padahal soal Aceh adalah masalah dalam negeri Indonesia.

"Masih terdapat kemungkinan munculnya berbagai perdebatan yang membuat pelaksanaan makin tidak mudah," tulis *Suara Pembaruan* dalam editorial (18/8). Namun ditambahkan, setiap konflik baru yang muncul dari kesepakatan hendaknya diselesaikan lewat dialog, bukan dengan senjata.

Harian sangat berpengaruh, *Kompas*, juga mempersoalkan banyak hal. Kenapa naskah kesepakatan itu tidak disiarkan sebelum ditandatangani, padahal mewujudkan perdamaian di Aceh, mesti memasyarakatkannya terlebih dahulu. "Soalnya, setelah ditandatangani dan disiarkan, muncul reaksi, persepsi dan



prasangka antara pemerintah dan berbagai pihak di masyarakat," tulis *Kompas* di dalam editorial (22/8).

Menurut *Kompas* pasal-pasal yang menimbulkan kecamasan dan prasangka, misalnya, Aceh punya lagu, lambang dan bendera sendiri, dan bisa membuat utang luar negeri sendiri. Tidak secara eksplisit menyebut UUD 1945. Tulis harian ini, kecuali menjerihkan perbedaan tafsir serta kecemasan tersebut, harus pula dihindari pendekatan, pernya-

Tajuk Lain

Pikiran Rakyat

Masa jaya industri rotan sedang memasuki senja kala. Nama Cirebon, sebagai pusat industri rotan, termashur di seluruh. Kini tinggal sebuah kenangan, tulis *Pikiran Rakyat*, harian sangat berpengaruh di Jawa Barat, dalam editorial (29/8).

Peraturan Menteri Perdagangan (No.12/2005) dipan-

dang harian itu telah melucuti para pelaku industri rotan. Peraturan itu membuka kran ekspor rotan setengah jadi. Padahal industri ini telah bertahun-tahun memberi sumbangan bagi lapangan kerja dan pemasukan devisa negara, karena sebagian besar produknya diekspor.

PR hanya mengingatkan jika situasi seperti itu terus dibiarkan, bukan tidak mungkin ke-

hancuran industri rotan Cirebon tinggal menunggu waktu.

Suara Merdeka

Harian ini, dalam tajuk (26/8) menyorot ketimpangan dan problem pengembangan daerah. Pembagian yang adil hasil sumber daya alam merupakan terobosan penting untuk mendorong daerah-daerah tertinggal. Di seluruh Indonesia, dari 440 kabupaten masih ada 199

daerah tertinggal.

Menurut harian yang terbit di Semarang ini, kalau kita bertekad mempertahankan NKRI, maka satu-satunya syarat adalah memperhatikan ketimpangan antar-daerah. Selain memperhatikan kebutuhan serta aspirasi yang dapat mempercepat pengembangan. Jika daerah masih merasa tidak diperhatikan dan hanya dieksploitasi oleh



KRISIS Yang DIPICU KERAGUAN

**Himpitan kesulitan ekonomi
menyisakan harapan yang menggantung.
Langkah perbaikan diawali keraguan.**

Rupiah bermasalah lagi. Tak ada yang menduga rupiah melemah secepat ini. Tiba-tiba nilai tukarnya terpuruk di titik terendah, Rp 11.600, Selasa (30/8) setelah krisis moneter 1997.

Padaحال menurut *Kompas*, dengan tingkat pertumbuhan 6,4%, perekonomian bisa segera keluar dari krisis. Harapan semakin menggumpal setelah para pengusaha Jepang berjanji memasukkan modal US\$ 20 miliar, ditambah US\$ 7,5 miliar dari China. Semua optimisme ini sirna begitu harga minyak bumi melonjak tak terkendali.

“Tidak jelasnya antisipasi yang dilakukan pemerintah membuat kita kehilangan arah,” tulis *Kompas* dalam editorial (25/8).

Apa yang harus dilakukan sekarang? Jawab *Kompas*; (1) Tenangkan pasar, tidak boleh terus gugup dan bergerak tanpa kendali. Jangan sampai muncul persepsi, pemerintah tidak mampu dan tidak kredibel. (2) Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penenangan ekonomi yang lebih lengkap. (3) Yang tak kalah penting, pemerintah menunjukkan *sense of crisis*.

Harian sore, *Sinar Harapan*, melihat kemerosotan nilai rupiah akibat banyak hal, baik di sektor moneter maupun fiskal. Lonjakan harga minyak bumi sangat membebani APBN, karena subsidi yang membengkak. Di sisi lain, BI terlambat menaikkan tingkat suku bunga SBI. Memang ini tidak mudah, karena BI harus menanggung sedikitnya Rp 400 triliun setiap kenaikan SBI 1%. Tingkat SBI yang tinggi juga akan menekan minat berinvestasi.

Keraguan menaikkan harga BBM memang berpeluang membangkitkan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Mereka melihat, menaikkan sekarang atau nanti, tidak banyak berbeda. Menunda kenaikan BBM hanya akan menimbulkan ketidakpastian.

Harian ekonomi, *Bisnis Indonesia*, melihat beberapa sebab melemahnya nilai rupiah.

(1) Kenaikan suku bunga bank sentral AS, menarik banyak pemilik uang menyimpannya dalam dolar. (2) Harga minyak mentah yang terus meroket. (3) Pelunasan utang luar negeri. (3) Pertamina butuh dolar cukup besar untuk

mengimpor minyak mentah dan olahan.

Karena itu, harian ini, dalam editorial (30/8) menunggu langkah berani Presiden: (1) Menaikkan harga BBM. (2) Merombak kabinet. (3) Meminta keringanan utang. (4) Memberantas penyelundupan BBM.

Harian ekonomi lainnya, *Investor Daily*, menilai langkah BI menaikkan suku bunga tidak banyak menolong untuk membangkitkan kembali rupiah. Pemerintah mesti belajar dari krisis moneter 1997-1998. “Jika tidak ada solusi menyeluruh, Indonesia bisa terjerumus ke krisis jilid dua,” tulis harian ini dalam editorial (31/8).

Melemahnya nilai rupiah, menurut *Investor Daily*, bukan lagi semata-mata soal teknis, tetapi sudah masuk ke *trust and confidence*. Pasar tidak percaya pada tim ekonomi.

Solusinya, antara lain; (1) Mewajibkan eksportir dan importir menggunakan L/C, eksportir menyeter hasil devisa ke BI. (2) Pemerintah dan BI mengubah sistem nilai tukar dan lalu lintas devisa. (3) Kebijakan baru Migas untuk merangsang produksi minyak. (4) Merombak tim ekonomi kabinet.

Media Indonesia, mempertanyakan dalam editorial (31/8), kenapa krisis tidak mau pergi dari negeri ini? Jawaban yang paling tepat, kita bangsa yang memorinya pendek dan tidak pernah mau belajar dari krisis masa lalu. ■ SH

taan serta kebijakan yang tidak bijak dan tidak benar.

Yang perlu dihindari, tulis *Kompas*, membuat pernyataan apalagi kebijakan yang kurang menghargai, bahkan menyudutkan, anak-anak bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa raga dalam melaksanakan kebijakan politik pemerintah yang sah. Jangan membuat kesan, yang setia seakan-akan malah dipersalahkan dan dipojokkan. “Semangat damai adalah sekaligus semangat rekonsiliasi,” tulis *Kompas*. ■ SH

pusat, maka kecenderungan separatisme akan tetap muncul.

Waspada

Harian tertua kota Medan ini, dalam ediorial (23/8) memuji gebrakan Kapolri Jenderal Sutanto untuk memberantas perjudian, premanisme, Narkoba, penyelundupan, dan penjarahan hasil hutan dan laut. Sayang sekali jika ma-

sarakat membiarkan polisi bekerja sendirian seperti yang terjadi selama ini.

Koran ini mengajak masyarakat membantu polisi. Sudah tiba waktunya masyarakat berani melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. “Tidak ada alasan untuk tidak lagi membantu tugas-tugas polisi,” tulis Waspada.

Kedaulatan Rakyat

Ternyata sampai hari ini, Dinas Pendidikan DIY belum bisa mengucurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dijanjikan pemerintah, demikian tulis harian *Kedaulatan Rakyat*, dalam tajuknya (30/8). Di tengah jeritan masyarakat tentang mahalny biaya pendidikan, wajar bilamana suntikan dana

BOS menjadi hal yang sangat sensitif.

Di tengah sulitnya ekonomi dan keluhan mahalny biaya pendidikan, secara logika semestinya dana itu tidak scurkan. “Agaknya ada mata rantai yang belum tersambung,” tulis KR. Agaknya Pemda masih mengalami kendala petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. ■ SH

LAHIRNYA TRADISI BARU

Pada 23 Agustus setiap tahun, Presiden akan berpidato di depan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Perasaan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), hasil Pemilu 5 April 2004, berbunga-bunga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi undangan pimpinan DPD untuk menyampaikan nota keterangan pemerintah, dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung MPR, pada 23 Agustus 2005.

Selain para anggota DPD dari 32 provinsi, sidang itu juga dihadiri para menteri, gubernur, bupati, dan walikota, ketua-ketua DPRD, ketua pemangku adat, rektor, organisasi keagamaan, duta besar, kalangan LSM, dan pimpinan pers nasional di seluruh Indonesia.

Pidato Presiden itu merupakan konvensi baru dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, setelah sebelumnya ada konvensi tahunan pidato kenegaraan presiden berisi nota keuangan dan RAPBN yang disampaikan di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setiap tanggal 16 Agustus. Sidang paripurna DPD itu menjadi acara tahunan, sekaligus merupakan sidang pertama kali sejak keberadaan lembaga perwakilan wilayah itu.

Sejenak menengok ke belakang, pidato presiden di sidang DPD itu bisa disebut sebagai kompensasi atas terjadinya 'perbedaan pendirian' antara DPD dan DPR, yang bernuansa egosentrisme kelembagaan. DPR menganggap, sudah menjadi konvensi sejak lama bahwa Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang DPR. Dalam konteks ini, para anggota DPD hanya sebatas undangan pada acara itu. Tuan rumah tetap DPR.

Pasalnya, selama ini Presiden hanya menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR karena sebelumnya lembaga negara DPD ini



memang belum ada.

Di lain pihak, DPD menilai mereka memiliki hak yang diatur UUD 1945 untuk memberikan masukan terhadap RAPBN yang disampaikan presiden (pemerintah).

Apalagi, bersandar pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPD memiliki sejumlah tugas dan wewenang.

Disebutkan, antara lain, anggota DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Mengingat sulit dicapai titik temu, DPD mengusulkan solusi agar pidato presiden tanggal 16 Agustus 2005 disampaikan di hadapan seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD, di satu waktu dan pada satu tempat.

Akibat dari tidak adanya titik temu dan kesepakatan politis antara dua lembaga negara itu, Presiden SBY akhirnya berpidato di tempat dan waktu yang berbeda untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing lembaga.

Pada 16 Agustus 2005, Presiden SBY berpidato di hadapan paripurna DPR. Seminggu kemudian, tepatnya 23 Agustus 2005, beliau berpidato di depan pleno DPD.

Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita sangat memuji kearifan dan kenegarawanan Presiden SBY. "Kesediaan saudara Presiden memenuhi undangan ini merupakan salah satu bukti kearifan dan sikap kenegarawanan beliau," kata mantan Wakil Ketua MPR-RI, periode 1999-2004 itu, dalam pidato sambutan selaku pimpinan sidang.

Sementara itu, dalam pidatonya, Presiden SBY menyampaikan visi dan arah pembangunan serta kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah berkaitan dengan RAPBN 2006, termasuk berbagai tantangan yang harus daerah hadapi di masa depan, permasalahan di Papua dan Irian Jaya Barat, penandatanganan perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM, serta penanganan daerah perbatasan dan daerah konflik serta daerah-daerah tertinggal. ■ **AF, SP**

TELADAN Menyerahkan Diri

Lebih baik menjalani hukuman yang diputuskan hakim daripada menjadi buronan. Maka contolahlah Rahardi Ramelan.

Berbeda dengan penampilannya di persidangan yang selalu berjas rapi dengan warna serasi, Rahardi Ramelan memakai kaos oblong di dalam penjara. Tetapi ia kelihatan tenang dan biasa-biasa saja. Bahkan, ia masuk ke penjara pun atas inisiatifnya sendiri.

Rahardi memang datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan minta dieksekusi hari itu juga, Senin, (15/8). Berbagai media massa menganggap hal itu istimewa sehingga memberitakannya serentak, bahkan mewawancarainya. Soalnya, jarang sekali ada terpidana korupsi yang bersikap demikian. Biasanya, mereka menunggu dijemput paksa atau kabur ke luar negeri.

Majalah *Trust* termasuk yang beruntung berhasil mewawancarai mantan Kepala Bulog itu sehari sebelum ia menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

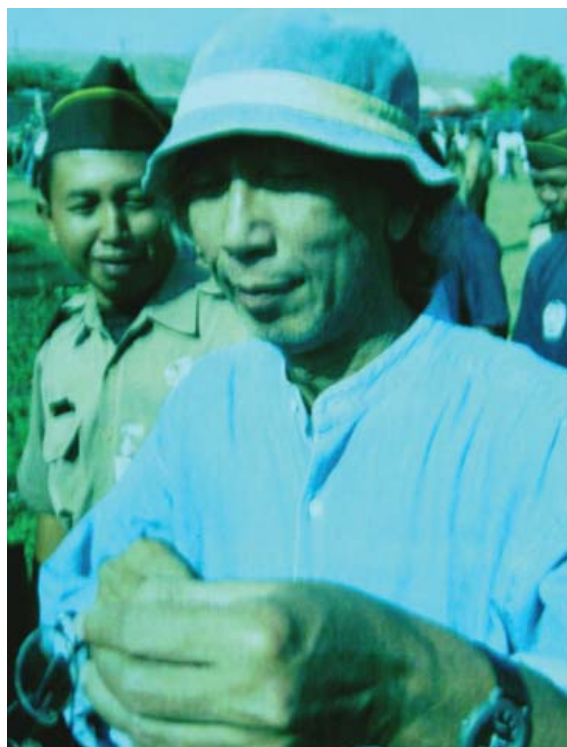
Dalam *Trust* edisi No. 47, 22-28 Agustus 2005, Rahardi mengaku capek dan 'hilang kesabaran.' Vonis MA yang intinya penolakan kasasi itu sudah diketuk sejak 27 Oktober 2004, menguat-

kan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (24 Desember 2002) dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (31 Desember 2003) yang menghukumnya dua tahun. Namun, entah kenapa pelaksanaannya begitu lama tanpa alasan yang jelas.

Seperti juga ditulis media-media lain, antara lain harian *Kompas* (16 Agustus 2005), harian *Media Indonesia* (16 Agustus 2005) dan majalah *Forum Keadilan* (28 Agustus 2005), Rahardi tuduh menyelewengkan uang negara sehingga rugi Rp 4,6 miliar. Saat eksekusi, Rahardi yang juga divonis harus membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta, baru membayar Rp 50 juta. Sisanya akan dicicil sampai Januari 2006.

Kejaksaan sendiri merasa *surprise* ketika Rahardi datang meminta dieksekusi. Mereka berterima kasih pada itikad baik mantan Menperindag itu.

Itikad baiknya menyerahkan diri itu langsung membuahkan keberuntungan. Bertepatan dengan hari ulangtahun Proklamasi 17 Agustus lalu, ia diberi



remisi 2 bulan 4 hari. Menurut kuasa hukumnya, Frans Hendra Winata, jika semua jatah remisi diperoleh kliennya, Maret 2006 Rahardi sudah bebas.

Menuntut MA

Tahun 2001, seperti ditulis *Forum Keadilan*, Rahardi sempat menghebohkan Kejaksaan Agung karena ia menghilang saat akan diperiksa. Diperoleh kabar, ia bersembunyi di luar negeri.

Namun, ketika disinggung hal yang sama oleh *Trust*, Rahardi membantah ia kabur. Menurutnyanya, yang sebenarnya terjadi, elit Partai Golkar termasuk Akbar Tandjung memintanya agar tidak pulang ke Tanah Air. Suatu ketika, Rahardi sadar bahwa upaya menahannya di luar negeri adalah untuk membentuk opini masyarakat bahwa kasus itu adalah kasusnya pribadi, bukan kasus Partai Golkar atau Akbar Tandjung.

Pada dasarnya, ia menghormati putusan hakim agung yang menolak kasasinya. Tetapi bukan berarti ia mengaku telah melakukan korupsi. Bersama kuasa hukumnya, ia masih mempertimbangkan langkah hukum terakhir. Ia juga akan menuntut lambatnya pengiriman salinan putusan MA sehingga ia pun terlambat menjalani hukuman. Menurut Rahardi, kalau ia sudah dieksekusi 27 Oktober tahun lalu, mungkin ia sudah bebas karena mendapat beberapa remisi. ■ RH

TOMMY DAPAT REMISI

Apapun yang menyangkut Tommy Soeharto selalu menarik diberitakan. Kali ini, beberapa media memberitakan putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu mendapat remisi 9 bulan 10 hari.

Dengan 'hadiah' tersebut, Tommy bisa meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada tahun 2007.

Selain Tommy, menurut laporan majalah *Tempo*, 28 Agustus 2005, ada 186 napi lain yang juga mendapat remisi. Saat ini, ada 216 narapidana di LP Batu. Namun, 20 orang tidak mendapat remisi karena merupakan terpidana hukuman mati dan seumur hidup. ■ RH



PENJARA ALA VILLA

Para narapidana memegang kunci tahanannya sendiri. Mereka harus melalui seleksi ketat untuk program asimilasi.

Sebuah lembaga pemasyarakatan (Lapas) selalu identik dengan sel-sel berjeruji besi, pagar-pagar tinggi berkawat duri dan menara pengawas dimana petugas berjaga sambil membawa senjata api.

Tapi ketika tabloid *Nova* No. 19, 29 Agustus 2005, menulis hasil liputannya ke Kampung Asimilasi Gandul, Lapas Terbuka Jakarta, gambaran itu menjadi terbantahkan. Lapas itu sesuai dengan namanya memang terbuka. Tak ada jeruji besi yang memisahkan para narapidana dengan dunia luar. Dari jalan masuk saja, sudah terlihat betapa asrinya Lapas ini. Pot-pot tanaman jeruk tampak terawat, menghiasi tepian sungai kecil yang mengelilingi bangunan.

Lapas ini memiliki tiga bangunan utama. Sebuah bangunan berlantai dua di atas sebuah kolam ikan dipakai untuk kantor Kepala Lapas dan administrasi, serta ruang serbaguna. Kamar-kamar tahanan berjajar di bagian belakang, di dekat lapangan olahraga. Lapas yang terletak di areal perbukitan

itu ibarat villa atau rumah peristirahatan.

Tanggal 14 Mei lalu, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin meresmikan Lapas ini. Selain di Jakarta, Lapas serupa juga ada di Kendal (Jawa Tengah), Pasaman (Sumatera Barat), Lombok dan Waikabubak (NTT).

Berbeda dengan Lapas pada umumnya, para narapidana mendapat kelonggaran. Maklumlah, para penghuninya telah diseleksi dulu dengan ketat. Sehingga mereka merupakan orang-orang yang bisa dipercaya. Syarat-syaratnya, narapidana harus menjalani separuh hukuman, berkelakuan baik dan bukan tersangkut kasus narkoba, penipuan dan terorisme.

Tahap yang dijalani di Lapas tersebut adalah tahap asimilasi. Di mana narapidana dibina dan dipersiapkan mengenal dunia luar sebelum hukumannya berakhir. Karena itu, mereka tergabung dalam kelompok-kelompok kerja seperti pertanian, perikanan dan ternak unggas. Yang punya keahlian lain seperti melukis boleh menerima pesanan, biasanya dari petugas Lapas sendiri. Uangnya lumayan untuk jajan atau disimpan.

Kebebasan juga terlihat saat hari Jumat ketika narapidana muslim berbondong-bondong pergi shalat Jumat ke masjid yang tak jauh dari Lapas. Demikian juga jika hari Minggu tiba, narapidana beragama Nasrani boleh pergi ke gereja di dekat Lapas.

Sistem pengamanan yang diterapkan memang sistem pengamanan minimum. Bahkan kamar para penghuni Lapas jauh



lebih nyaman dari Lapas pada umumnya. Satu kamar berukuran 4x4 meter yang dihuni 3-4 orang itu boleh dilengkapi perangkat elektronik pribadi. Mereka juga memegang kunci kamarnya masing-masing. Namun, kedisiplinan tetap harus dilakukan. Pada waktu-waktu yang telah ditentukan, para penghuni Lapas harus masuk ke kamarnya masing-masing. Untuk menjaga ketertiban di Lapas itu Kepala Lapas menetapkan seorang Kepala Kampung, sebagai penghubung antara para napi dengan petugas.

Lapas model ini boleh dibilang merupakan hal baru bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM. Namun fungsinya dianggap sangat berguna bagi pembinaan tahap lanjut, sebelum para narapidana itu dikembalikan ke masyarakat. ■ RH

MENJEGAL Sebuah ALASAN

Baru satu hari dirawat di Rumah Sakit MH Thamrin Internasional, terpidana kasus korupsi pembelian helikopter Abdullah Puteh diharuskan kembali ke Rutan Salemba. Pasalnya, majelis hakim Mahkamah Agung (MA) melarang Abdullah Puteh berobat di luar rutan.

Puteh telah dua bulan menjalani hukumannya yang dijatuhkan 10 tahun itu. Namun selama jangka waktu itu, ia sering sakit. Pertengahan Agustus lalu, gu-

bernur NAD non aktif itu kembali sakit dan masuk RS MH Thamrin. Namun, rupanya ia tidak meminta izin MA sesuai prosedur.

Ketua majelis hakim MA Ardidjo Alkostar, kemudian menjawab permohonan yang dikirim Kepala Rutan Salemba Kosod Purwanto yang meminta izin Puteh dirawat di RS MH Thamrin. Namun, berdasarkan kajian dokumen dan riwayat kesehatannya, majelis menyarankan Puteh memakai fasilitas ke-



sehatan di rutan.

Masalah dilarangnya Puteh berobat keluar ini juga dibahas harian-harian nasional lainnya. Kepada *Media Indonesia*, 26 Agustus 2005, dokter Rutan Salemba, Fibri Fitri mengatakan sudah menjelaskan bahwa fasilitas di Rutan Salemba untuk merawat Puteh yang kini menderita radang saluran alat kelamin tidak tersedia. Namun, ia menyerahkan semuanya kepada majelis hakim.

Di sisi lain, menurut Kosod, larangan itu tanpa batas waktu. Kalau keadaan darurat pun, ia tetap harus mendapat izin dari MA. ■ RH

Catwalk di Pojok Jawa Timur

Gadis-gadis Jember mulai identik dengan mode. Mereka menggelar karnaval fesyen bertema global.

Pagi yang cerah begitu riuh rendah di alun-alun kota Jember, Jawa Timur. Barisan para perempuan dengan berbagai kostum unik berjalan mantap di tengah jalanan bak *catwalk*. Di bawah tatapan ratusan pasang mata yang berdiri di sepanjang jalan yang mereka lalui.

Kota Jember di hari Minggu, (7/8), penuh bunga warna-warni dan pernik-pernik. Hari itu diselenggarakannya Jember Fashion Carnaval IV dengan tema *Discover The World*. Berbagai spanduk berkibar di pinggir jalan, bertuliskan tema-tema kelompok defile itu. Ada tema Archipelago, Egypt, Tsunami, Grand Prix, England, Spain, Discontruction dan Caribbean.

Tentu saja, gadis-gadis peserta defile berpakaian sesuai tema yang diusung kelompoknya.

Kelompok Archipelago misalnya, busananya dikreasikan dari kain batik yang dibentuk unik, misalnya model burung merak. Namun yang paling menarik perhatian para jurnalis luar negeri yang ikut meliput adalah defile kelompok Tsunami yang menggambarkan datangnya ombak dan narasi yang menceritakan tsunami menghancurkan Aceh.

Seperti dilaporkan harian *Indo Pos* (Senin, 8 Agustus 2005), *Surya* (Senin, 8 Agustus 2005) dan *Kompas* (Minggu, 14 Agustus 2005), antusias para peserta karnaval yang bisa dibbilang hampir semuanya remaja putri menunjukkan betapa fesyen telah menggejala di kota itu. Perempuan di kota kecil itu bukan lagi perempuan kampung yang cuma tahu pakaian berpotongan sederhana.

Semua busana yang dikenakan para peserta dalam karnaval tersebut merupakan kreasi dan rancangan mereka sendiri. Dynand Fariz, pengajar di sekolah ESMOD Jakarta dan perintis Jember Fashion Carnaval memulai karnaval ini di tahun 2000.

Sebulan sebelum acara, Dynand memberikan pengarahan kepada para calon peserta mengenai dasar-dasar mode empat musim dan trik-trik yang berguna dalam hal perancangan busana.

Tidak heran ketika hari H tiba, berbagai busana unik terlihat di mana-mana. Dan semua itu dibuat sendiri gadis-gadis peserta karnaval yang sebagian adalah pelajar SLTP dan SLTA.

Secara lebih mendalam, *Kompas* mengungkapkan bahwa perempuan-an-perempuan Jember yang sadar mode bukan cuma kalangan muda saja, melainkan kaum ibu. Seiring dengan menjamurnya butik-butik di kota itu, acara arisan mulai menjadi ajang peragaan busana. Ibu-ibu muda memakai

pakaian yang lebih seksi dari biasanya. Bahkan, arisan pun kini memiliki *dress code*. ■ RH



Luh Melawan Pedofil

Pariwisata berdampak buruk bagi bocah-bocah di Bali. Sebagai psikiater, ia mengerti penderitaan para korban pedofilia.

Usia yang sudah lebih dari setengah abad tak membuat Luh Ketut Suryani surut langkah dalam aktivitasnya: memastikan pedofil mendapat hukuman yang setimpal. Suryani adalah pendiri lembaga swadaya masyarakat Putra Sesana Bali tahun 1990 yang berusaha memantau, melacak gerak dan perilaku kaum pemangsa bocah di Bali.

Belakangan, kasus-kasus pedofilia semakin marak. Maka ia membentuk Committee Against Sex Abuse (CASA), LSM yang khusus menangani perlindungan anak-anak korban kejahatan seksual. Lewat LSM itu, ia berjuang agar para pedofil dihukum berat. Ia juga

kerap tampil sebagai saksi ahli di persidangan.

Sebagai seorang psikiater, seperti ditulis majalah *Tempo* (14 Agustus 2005), Suryani tahu betul penderitaan yang dialami para bocah itu. Ia menangani para korban dengan *hypnotherapy* di kliniknya di Denpasar. Tak jarang ia turun langsung ke kampung-kampung. Semua itu dikerjakan tanpa pungutan bayaran sesen pun.

Pedofil, menurut Suryani, adalah tanggung jawab seluruh negara. Maka ia mengajak para ekspatriat dan konsul jenderal yang ada di Bali untuk terlibat dalam CASA. Mereka pun memberi dukungan, dan pasti malu jika ada warga negaranya yang terlibat. ■ RH

“The Dream Team” Catur Indonesia

Sejumlah media massa menyebut trio pecatur muda Indonesia, GM Susanto Megaranto, MN Tirta Chandra Purnama, dan si jelita MFW Irene Kharisma Sukandar, sebagai “The Dream Team” generasi baru catur Indonesia.

Susanto Megaranto, remaja putra kelahiran 8 Oktober 1987 asal Desa Tempel, Lelea, Indramayu, Jawa Barat, sudah menjadi grandmaster (GM) sejak setahun lalu.

Pada Olimpiade Catur Dunia ke-36 Oktober 2004 yang berlangsung di Calvia, Spanyol, ia berhasil menembus babak ke-12 yang membuatnya berhak menyanggah gelar GM. Susanto memecahkan pula rekor GM termuda Indonesia, yang sebelumnya selama 21 tahun dipegang oleh GM Utut Adianto. Utut menjadi GM pada tahun 1986 dalam usia 21 tahun.

Torehan prestasi terbaru Susanto terjadi pada Kejuaraan Catur Open Dutch Chess Championship, di Belanda awal Agustus 2005, dan pada turnamen Hogeschool Zeeland Schaaktoenooi, di Vlissingen Belanda beberapa hari kemudian. Pada kejuaraan pertama, Susanto bersama Tirta Purnama tampil sebagai peraih nilai tertinggi.

Pada kejuaraan Hogeschool Zeeland Schaaktoenooi di babak terakhir atau kesembilan Susanto berhasil mengalahkan GM Oleg Romanishin (dari Ukraina, elo rating 2570). Susanto mengumpulkan total nilai *7,5 maath point* (MP).

Media Indonesia (15/8) menulis, dengan kemenangannya Susanto memperoleh tambahan 14 elo rating, sedangkan Tirta yang juga ikut serta dan meraih nilai 5,5 MP, memperoleh tambahan 9 elo rating.

Susanto yang saat ini memiliki elo rating 2499, menyimpan ambisi besar untuk menaikkannya hingga di atas 2700, untuk menyamai prestasi besar Utut Adianto sebagai GM Super.

Susanto, putra pasangan Wasdirah-Darsinah mulai memperlihatkan bakat otodidak sebagai pecatur pada usia tujuh tahun. Saat itu sang ayah memperkenalkannya papan dan permainan catur sekaligus. “Saya



diajari bapak,” urai Susanto, kepada *Koran Tempo* (15/8).

Pada tahun 1995 Susanto mengikuti kompetisi dan menjadi juara nasional kelompok usia 7-12 tahun di Jakarta. Kemudian, saat bertarung di tingkat dunia di tahun 1997 ia menempati ranking ke-11 kejuaraan kelompok usia 10 tahun di Cannes, Perancis.

Susanto bergabung dengan klub catur Japfa Chess milik Utut yang terletak di Bekasi, dan sang ayah lalu ikut boyong ke sana akhirnya.

Calon GM Wanita Pertama

Master Nasional Tirta Chandra Purnama, pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1986 pemilik elo rating 2337, saat bertanding di ajang yang sama dengan Susanto pada Olimpiade Catur Dunia ke-36 Oktober 2004, berhasil meraih gelar Master FIDE.

Sebelumnya, Tirta, ketika bertanding pada kelompok usia 12 tahun di Jakarta, sudah menyabet juara. Lalu pada tahun 2001 menjadi juara U-18 di tingkat ASEAN. Setahun kemudian ia merebut perunggu di Olimpiade Catur Junior Malaysia.

Pecatur wanita Irene Kharisma Su-

kandar juga ikut tergabung dalam rombongan yang bertarung di ajang Olimpiade Catur Dunia ke-36 di Calvia, Spanyol 2004. Di situ Irene berhasil menggondol medali perunggu.

Belum lama ini MFW (master Fide wanita) Irene Sukandar, putri pasangan Singgih Yehezkiel dan Cici Ratna Mulya, yang masih berusia 13 tahun, meraih peringkat ke-4 pada kejuaraan dunia catur junior kelompok usia 14 tahun yang berlangsung di Belfort, Perancis.

Di kejuaraan yang berakhir pada 28 Juli lalu Irene, pemegang elo rating 2010, berhasil meraih nilai 8,5 MP di bawah Elena Tairova (Rusia, elo rating 2232, 9,5 MP), Anastasia Bodnaruk (Rusia/2165/9 MP), dan Mariya Muzyuk (Ukraina/2113/9 MP).

“Saya bersyukur bisa melampaui target lima besar. Hanya, saya merasa kualitas permainan harus ditingkatkan. Karena itu, saya harus sering ikut turnamen atau porsi latihannya yang lebih ditingkatkan,” tutur Irene, yang berambisi menjadi GM wanita pertama Indonesia, kepada tabloid *Bola* (2/8). ■ SUB,HT



**SATYA LENCANA
untuk
Taufik dkk**

Supriyanto (1993), Her-yanto Arbi (1995), dan Hendrawan (2001).

Ini pulalah pertamaka-li Indonesia berhasil menempatkan pasangan ganda campuran sebagai juara dunia, setelah menunggu 25 tahun lamanya. Pasangan Nova Widiyanto/Lilyana Natsir di final mengalahkan ganda campuran China, Xie Zhong-bo/Zhang Yawen, 13-15, 15-8 dan 15-2. Terakhir kali Indonesia menjuarai

ini untuk pertamakali seorang pemain berhasil 'mengawinkan' dua gelar bergengsi sekaligus, yakni gelar juara dunia dan juara olimpiade. Taufik Hidayat peraih medali emas Olimpiade 2004, melakukannya setelah menjadi juara dunia 2005. Taufik di final mengalahkan pemain China, Lin Dan, dua set langsung 15-3 dan 15-7.

Taufik adalah pebulutangkis Indonesia keenam yang pernah menjadi juara dunia, setelah Rudy Hartono (1980), Ickuk Sugiarto (1983), Joko

nomor ini melalui ganda campuran Christian Hadinata/Imelda Wiguna, di Jakarta tahun 1980.

Untuk segala prestasi Taufik Hidayat, Nova Widiyanto dan Lilyana Natsir ditambah sejumlah pebulutangkis lain seperti Lulu Hadiyanto, Chandra Wijaya, Sigit Budiarto, akan menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diserahkan pada Hari Olahraga Nasional (Haornas), 9 September 2005. ■ **SUB**



Legenda hidup sepakbola Liberia George Weah menyatakan sikap serius hendak meraih kursi presiden di negara berpenduduk 3,5 juta jiwa itu. Padahal, Weah sebelum ini sudah pernah mengatakan tidak terlintas sama sekali dirinya ingin menjadi presiden.

Namun sejak kembali ke kampung halaman setahun lalu, baru bermukim beberapa hari saja sudah langsung tertarik dan menyatakan masuk dalam bursa pencalonan presiden.

Hatinya ternyata luluh setelah mendengar sebuah petisi dari para pendukung, yang meminta Weah untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Ia akan bersaing bersama 42 kandidat lain.

Pemain kelahiran Monrovia, Liberia, 39 tahun silam ini sejak 15 Agustus lalu mulai sibuk berkampanye. Pemilihannya berlangsung 11 Oktober, Weah mewakili partai Congress for Democratic Change (CDC).

Sebagai legenda sepakbola hidup hingga ke kawasan Afrika Barat, Weah memang sudah memiliki banyak pendukung. Satu hal saja yang menjadi hambatan baginya, latar belakang pendidiknya. Weah memang kurang terpelajar.

Akan tetapi orang-orang Liberia menilai, dipimpin oleh Weah negaranya akan makmur karena memiliki seorang presiden yang kaya raya dan dermawan. Karena kekayaannya pula peluang Weah untuk melakukan korupsi dinilai tipis.

Weah adalah mantan pemain AC Millan yang memasuki masa keemasan di tahun 1995. Ketika itu ia pernah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia, Pemain Terbaik Eropa, dan Pemain Terbaik Afrika. Weah juga pernah bermain di AS Monaco dan Paris Saint-Germain.

Weah, yang oleh mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela disebut sebagai "African Pride", sejak dua tahun lalu terpilih menjadi duta keliling UNICEF untuk memerangi HIV/AIDS di dunia. ■ **HT**

Kursi Panas Ketua Umum PSSI

Pengaruh Nurdin Halid nampaknya sangat begitu kuat di PSSI. Sampai-sampai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang jatuh pada awal Agustus 2005 dan memasungnya 2,5 tahun penjara, seolah tak mampu menggeser Nurdin dari kursi panas ketua umum.

Padaحال Menpora sendiri, Adyaksa Dault sudah memberikan mandat kepada Ketua Umum KONI Pusat Agung Gumelar, agar menyelesaikan kemelut yang terjadi di tubuh organisasi nasional olahraga terpopuler seingat itu. Halid tetap tampil sebagai ketua umum non aktif kendati dalam enam bulan terakhir sudah selalu berada di ruang tahanan Mabes Polri.

Penggantian ditengah jalanterhadap ketua umum PSSI diatur dalam Pedoman Anggaran Dasar PSSI pasal 10, tentang musyawarah luar biasa (munaslub), atau KLB yang bisa digelar memenuhi sejumlah syarat. Syarat intinya, adanya permintaan penyelenggaraan munaslub dari pengurus harian melalui rapat pleno, dan 60 hari kemudian munaslub dimaksud sudah bolehlah digelar.

Seruan untuk membuat rapat pleno itulah yang kini mulai gencar disuarakan. Seperti dari Sekum Persikab Dadan Rohandi, Ketua Harian Pengda Jabar Hardi Maksud, Ketua Harian Persebaya H. Susanto yang dahulu anggota tim sukses Nurdin, serta Manajer Persik Kediri Iwan Budianto.

Ada pula yang masih ingin mempertahankan Nurdin, atau setidaknya bersikap netral, seperti Ketua Pengda Sulsel Iriantonyah Kasim dan Sekjen PSSI Nugraha Besoes.

Tapi kali ini agaknya kursi panas ketua umum PSSI sudah harus diganti, terbukti merebaknya sejumlah nama calon pengganti. Seperti Pangdam Tanjung Pura Mayjen TNI Erwin Sudjono, Menhub Hatta Radjasa, Menneg BUMN Sugiharto, pebisnis bos Medco Arifin Panigoro, serta Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Plt Ketua Umum PSSI Agusman Effendi. ■ **SUB**



Nilai rupiah meluncur turun sampai ke level 12.000 per dolar AS, terendah setelah krisis moneter 1997. Banyak faktor telah menjatuhkan nilai tukar rupiah.

Pemerintah dan Bank Indonesia panik lantaran nilai rupiah terhadap dolar AS meluncur turun sampai 1000 poin hanya tempo sepekan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono buru-buru mengadakan pertemuan, membahas langkah-langkah penting untuk menyelamatkan rupiah. BI mengeluarkan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga dan sejumlah langkah penyelamatan lainnya.

Langkah ini diambil BI setelah menguras tak kurang dari 3 miliar dolar AS dari koceknya untuk melakukan intervensi pasar. Tampaknya, langkah penyelamatan BI membuahkan hasil. Nilai rupiah yang sempat menyentuh angka 12.000 per dolar AS (30/8), hari berikutnya (31/8) menguat menjadi Rp 10.600, dan pada penutupan pekan lalu (1/9) menguat 350 poin, menjadi Rp 10.250 per dolar AS.

Pemerintah menyalahkan lonjakan harga minyak bumi di pasar tunai internasional sebagai penyebab utama merosotnya nilai rupiah terhadap dolar. Tetapi para pelaku pasar lebih melihat penyebab pada lemahnya tim ekonomi Presiden Susilo. Susilo yang tampil di depan televisi Jum'at (1/11), menjanjikan pemulihan nilai rupiah dengan memangkas subsidi, alias menaikkan harga BBM. Kenaikan itu akan dilakukan seputar September atau Oktober. Sebab dengan harga minyak mentah 70 dolar per barel, pemerintah harus menanggung subsidi Rp 150 triliun. Susilo bersikeras tidak akan merombak kabinetnya.

Rupiah bukan semata-mata sebagai alat tukar, tetapi menjadi cermin kekuatan ekonomi dan stabilitas negara. Kurs rupiah bergerak ke atas atau ke bawah sejalan dengan kinerja ekonomi serta perkembangan politik dan keamanan. Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil dimanfaatkan oleh para



spekulasi untuk mempermainkan nilai rupiah.

Lantaran Indonesia menjadi bagian dari perdagangan bebas, maka kurs rupiah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal; posisi neraca berjalan (ekspor-impor), tingkat pertumbuhan ekonomi, manuver bursa saham, potensi produksi, laju inflasi dan pergerakan mata uang asing yang besar, terutama dolar AS. Faktor eksternal, berkaitan dengan kegiatan impor, pembayaran cicilan utang luar negeri, gerakan mata uang dan bursa saham asing dan kebijakan tingkat suku bunga internasional.

Memang buat negara yang menganut sistem nilai tukar tetap (*fixed currency rate*), seperti Cina, kurs hanya berdimensi ekonomi sehingga nilainya tidak berubah dalam jangka panjang. Tetapi buat negara-negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating currency rate*), mata uang benar-benar bermuka dua. Di satu sisi berdimensi ekonomis, di sisi lain berdimensi politis.

Dalam dimensi ekonomi, perjalanan kurs bisa diprediksi karena mengikuti

kinerja ekonomi. Namun dalam dimensi politik, gejolak kurs atau krisis moneter, bisa mengubah peta politik sebuah negara. Hal ini pernah terjadi pada ujung pemerintahan Presiden Soeharto (1997-1998). Gejolak kurs memberi andil cukup besar bagi tumbangannya pemerintahan Pak Harto. Nilai rupiah yang di awal tahun 1997 masih berada pada kisaran Rp 2.500-Rp 2.800 per dolar AS, terjun bebas sampai ke angka 16.000 pada ujung tahun 1997 sampai awal 1998. Di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999), nilai rupiah membaik pada kisaran 7.000 per dolar AS.

Gejolak politik bisa membuat nilai rupiah terkaget-kaget, bahkan dalam tempo kurang dari 24 jam. Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1999-2001). Seringnya penggantian anggota kabinet dan pernyataan-pernyataan Gus Dur yang kontroversial, dimanfaatkan oleh para spekulasi untuk menggoyang nilai tukar rupiah terhadap dolar. Gejolak rupiah ikut memberi andil bagi jatuhnya pemerintahan Gus Dur.

Hanya di era pemerintahan Presiden



RAPUH

Megawati (2001-2004), kurs rupiah agak stabil karena ditopang oleh situasi politik dan keamanan yang relatif stabil. Nilai rupiah bergerak pada kisaran Rp 8.500 sampai Rp 9.000 per dolar AS. Jatuhnya nilai rupiah di masa pemerintahan Presiden Susilo, memang banyak dipengaruhi oleh krisis BBM akibat naiknya harga minyak mentah dan lemahnya kinerja ekonomi (impor lebih besar dari ekspor). Selain cicilan utang luar negeri, pemerintah via PT. Pertamina, harus mengumpulkan 1,5 miliar dolar AS sebulan untuk mengimpor 15 juta barel minyak dan 14 juta barel BBM olahan.

Gangguan (*distorsi*) terhadap kinerja ekonomi makro Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak hari-hari pertama masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu. Sejumlah analis mengisyaratkan reaksi negatif pasar terhadap personalia KIB. Pasar cemas lantaran sejumlah personalia kabinet diangkat berdasarkan kompromi politik, bukan karena keahliannya. Keceemasan pasar lainnya, adanya diskordinasi di antara para menteri yang berlatar belakang politik berbeda. ■ SH

Enam Langkah Stabilisasi Rupiah

- 1 Menaikkan suku bunga BI rate sebesar 75 basis poin menjadi 9,5% mulai 30 Agustus.
- 2 Menaikkan suku bunga fasilitas simpanan BI (Fasbi) 7 hari sebesar 100 basis poin menjadi 8,5%, berlaku sejak 31 Agustus.
- 3 Menyerap likuiditas dengan instrumen *fine tune contraction* (FTC) dengan *variable rate tender*, melakukan pelelangan, misalnya lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 4 Suku bunga penjaminan simpanan dinaikkan mulai September 2005. Untuk deposito rupiah jangka waktu menjadi BI *rate plus* 50 basis poin atau 10%. Untuk deposito valuta asing naik 125 basis poin dari 3% menjadi 4,25%.
- 5 BI menaikkan simpanan wajib perbankan atau giro wajib minimum (GWM), yang saat ini 8%, secara bervariasi sesuai dengan kondisi bank.
- 6 Atas kenaikan GWM tersebut, BI juga menaikkan imbalan jasa giro (semacam bunga) dari 3% menjadi 5,5%, untuk semua GWM di atas 5%.

Langkah-langkah Lain

- 1 Menyediakan fasilitas swap dengan BI untuk perlindungan nilai (*hedging*).
- 2 Melakukan intervensi valuta asing (valas) dengan instrumen swap jangka pendek.
- 3 Menyempurnakan ketentuan kehati-hatian dalam transaksi devisa. Antara lain, dengan mengatur transaksi margin perdagangan dan penyesuaian ketentuan posisi devisa neto (*net open position*).
- 4 BI akan meningkatkan pengawasan terhadap bank atas transaksi valas tanpa dokumen pendukung, termasuk mengenakan sanksi (Sumber: BI-SH).

KURS RUPIAH TERHADAP DOLAR AS

◆ Januari 9.305	◆ Maret 9.520	◆ Mei 9.545	◆ Juli 9.360
◆ Februari 9.300	◆ April 9.755	◆ Juni 9.770	◆ Agustus 12.000

CADANGAN DEVISA (DALAM JUTAAN USD)

	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
SDR	86,05	10,03	9,93	93,21	15,03	23,33
RPF	221,30	221,80	219,50	220,20	216,10	212,30
Emas	1.262,53	1.340,58	1.315,58	1.334,33	1.290,29	1.263,50
Surat Berharga & Simpanan	34.469,45	34.917,00	34.382,05	34.629,18	32.937,22	32.212,03
Lain-lain	52,95	53,20	103,08	151,86	153,96	154,25
Total Cadangan Devisa	35.002,18	36.542,11	36.030,14	36.420,78	34.612,80	33.865,41

(Sumber: BI-SH).

APBN TERANTUK EMAS HITAM

Baik RAPBN-2006 maupun APBN-Perubahan 2005 menanggung beban subsidi BBM tak terkira lantaran lonjakan harga minyak bumi. Tak pelak lagi, jalan satu-satunya, menaikkan harga BBM.

Penuh optimis dan percaya diri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (16/8) mengajukan RAPBN 2006 yang kelewat optimis di depan sidang pleno DPR.

Di dalam lampiran nota keuangan RAPBN 2006, tertera angka-angka; asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 persen, nilai tukar rupiah 9.400 per dolar AS, tingkat inflasi 7 persen, suku bunga rata-rata 3 bulan 8 persen, harga minyak mentah 40 dolar AS per barel (d/b) dan produksi minyak 1,705 juta barel per hari. Sedangkan di dalam APBN-P 2005, asumsi pertumbuhan ekonomi 6%, laju inflasi 8%, nilai tukar rupiah 9.500 per dolar AS, suku bunga SBI 8,25% dan produksi minyak 1,705 juta barel per hari.

Sedangkan nasib APBN-P2005 selama sisa waktu 4 bulan ini tak lagi jelas. Dana kompensasi Rp 17 triliun dari kenaikan harga BBM Maret lalu, seperti hilang ditelan bumi. Kwik Kian Gie, ekonom terkemuka dan mantan Menko EKUIN di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, menulis di harian *Bisnis Indonesia* (15/8), defisit Rp 19,55 triliun yang diumumkan pemerintah, menyesatkan. (Angka-angka silakan lihat tabel).

Sebagian besar fraksi di DPR meminta Susilo meninjau kembali angka-angka

yang diajukannya. Nota keuangan pemerintah dianggap tidak realistis. Asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 persen dinilai kelewat optimis di tengah gejala harga minyak dan tekanan terhadap nilai rupiah. Juga asumsi laju inflasi 7 persen dianggap kelewat "berani" dengan adanya rencana menaikkan harga BBM dua bulan mendatang. Sebaliknya, para anggota parlemen mengingatkan Susilo bahwa asumsi penerimaan pajak Rp 402,1 triliun dan deviden BUMN sebesar Rp 12 triliun harus bisa digenjut jadi lebih besar.

Susilo menerima sebagian saran fraksi-fraksi DPR untuk menaikkan asumsi harga minyak dari 40 ke 50 d/b. Dengan asumsi 40 d/b sementara harga pasar 68 d/b, pemerintah harus menanggung subsidi Rp 150 triliun. Hanya sepekan berikutnya (23/8), Susilo tampil di layar kaca dengan mimik yang sangat kebingungan. Susilo mengambil alih kendali ekonomi dari Wapres Jusuf Kalla, sehari setelah nilai rupiah meluncur turun sampai ke angka 12.000 per satu dolar AS. Sementara harga minyak bumi di pasar tunai internasional menukik, menyentuh angka 70 d/b.

Masyarakat dan pasar menunggu kebijakan BBM dari Susilo. Isyaratnya sudah jelas, harga BBM akan kembali naik. Artinya rakyat harus siap-siap ikat pinggang sampai gepeng. ■ SH

BBM NAIK 35 PERSEN?

Pemerintah panik. Lonjakan harga minyak bumi menebarkan kecemasan yang luas. APBN terganjal, nilai rupiah terus melemah.

Tak ada jalan lain. Pemerintah harus menempuh cara yang paling tidak populer untuk menyembuhkan ekonomi yang mengidap penyakit kronis. Dalam dua bulan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berancang-ancang untuk menaikkan lagi harga BBM sekitar 35%, hanya lebih rendah 1% dari kenaikan Maret tahun ini.

Kenapa jalan ini yang diambil? Alasannya, harga minyak bumi di pasar tunai internasional terus menukik, pernah menembus angka tertinggi, 70 d/b. Padahal dalam APBN-P 2005, pemerintah mematok harga 50 d/b, dan asumsi 40 d/b untuk RAPBN 2006. Jika harga BBM tidak naik, APBN akan dibenani subsidi BBM sebanyak Rp 130-140 triliun sampai akhir tahun, dan Rp 150 triliun pada tahun 2006. Lonjakan harga minyak dituding sebagai biang kerok melorotnya nilai tukar rupiah ke angka terendah, 12.000 per satu dolar AS.

Para pengamat perminyakan sependapat bahwa tahun depan harga minyak mentah tidak akan turun di bawah angka 60 d/b, tetapi tidak sampai menyentuh angka 100 d/b. Indonesia, kendatipun jadi anggota OPEC, mengimpor minyak mentah rata-rata 15 juta barel dan BBM olahan 14 juta barel sebulan. Karena itu, PT. Pertamina harus mengumpulkan devisa 1,5 miliar dolar AS sebulan untuk pengadaan BBM dalam negeri. Sebaliknya, Indonesia mengeksport minyak mentah 400.000 barel sehari.

Juga produksi minyak bumi dalam negeri menurun dari 1,5 juta ke 1,075 juta barel per hari. Sedangkan tingkat produksi sudah menyentuh angka 1,115 juta barel sehari. Akibatnya, PT. Pertamina harus mengimpor 29 juta barel minyak—15 juta barel minyak mentah dan 14 juta barel minyak olahan (BBM)—setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk itu Pertamina harus mengumpulkan dana 1,5 miliar dolar AS sebulan untuk mengimpor bahan bakar minyak.

Tidak hanya Indonesia. Krisis minyak bumi melanda hampir seluruh negara Asia, seperti Malaysia, China, Filipina, Thailand, India dan Jepang. Akibatnya, harga minyak di pasar global naik tiga kali lipat sejak akhir tahun 2001, ditutup 68 dolar AS per barel, pekan lalu. Kemelut energi yang menimpa Asia (*Newsweek*, 5/11) juga mencerminkan kebijakan pemerintah untuk melindungi ekonomi nasional dari guncangan minyak dengan mensubsidi—dari bahan bakar listrik, pesawat sampai bahan bakar rumah tangga, minyak tanah. ■ SH

APBN-P 2005 (Dalam miliar rupiah)

PENERIMAAN

1. Pajak	Rp 319.440,50 M
2. Penerimaan SDA	Rp 87.677,80 M
3. Laba BUMN	Rp 8.913,30 M
4. Penerimaan Non-pajak	Rp 21.993,30 M
5. Hibah	Rp 5.761,80 M
JUMLAH	Rp 443.786,70 M
DEFISIT	Rp 58.724,40 M

PEMBIAYAAN DEFISIT

1. Penjualan BUMN	Rp 3.500,00 M
2. Jual Asset BPPN	Rp 4.000,00 M
3. Utang dari Rakyat	Rp 22.085,80 M
4. Utang LN Reguler	Rp 18.672,20 M
5. Utang Proyek Tsunami	Rp 2.901,40 M
JUMLAH	Rp 58.724,40 M

PENGELUARAN

1. Belanja Pemerintah Pusat	Rp 173.756,10 M
2. Bunga Utang Dalam Negeri	Rp 41.587,10 M
3. Bunga Utang LN	Rp 18.147,00 M
4. Subsidi	Rp 60.328,30 M
5. Bantuan Sosial	Rp 28.619,50 M
6. Belanja Daerah	Rp 140.893,90 M
7. Cicilan Utang LN	Rp 34.718,90 M
8. Cicilan Utang DN	Rp 3.460,20 M
9. Penyertaan Modal Pemerintah	Rp 1.000,00 M
JUMLAH	Rp 502.511,00 M

(Sumber: BI-SH)

Warning bagi Penyelundup

Aksi penyelundupan di Indonesia semakin marak. Aparat Bea dan Cukai siapkan senjata pamungkas.

Meski jajaran Bea dan Cukai menggagalkan berbagai jenis penyelundupan, perbuatan ilegal ini semakin berani dengan berbagai modus operasinya. Gejala apa ini?

Rambu hukum perundangan sudah ada. Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui delapan langkah pemberantasan korupsi pun telah dipangankan. Malah poin kedelapan mengisyaratkan keterlibatan penuh institusi pajak dan Bea dan Cukai dalam pemberantasan korupsi. Semua itu agaknya dianggap hanya angin lalu.

Terbersit satu pertanyaan: mungkinkah keberanian para penyelundup melakukan aksinya karena masih ada celah untuk ditembus? Sulit menjawabnya. Namun, meski sporadis aksi penyelundupan sampai saat ini terus berlangsung.

Misalnya, hari ini Bea dan Cukai berhasil menggagalkan aksi penyelundupan di Medan, beberapa hari kemudian ada lagi aksi penyelundupan—dengan barang berbeda dan perusahaan pelaku berbeda pula—yang digagalkan dan para pelakunya ditangkap di Jakarta.

Fenomena penyelundupan sangat abstrak sifatnya: datang tak diundang dan pergi tak diantar. Dewasa ini, berbagai sorotan terus menerpa institusi Bea dan Cukai, baik itu keberhasilan maupun kegagalan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Eddy Abdurrahman, mengakui sorotan berbagai pihak yang ditujukan kepada instansi yang dipimpinnya memang beragam. Tapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat luas memberikan penilaian.

“Kami selama ini secara konsisten melakukan tugas-sesuai dengan aturan yang berlaku, itu bisa dibuktikan dengan tindakan tegas dari jajaran Bea Cukai menangkap para pelaku penyelundupan sesuai aturan dan UU yang berlaku,” tandas Eddy Abdurrahman kepada **Samsuri** dari *Berita Indonesia*.

Dia juga mengakui ada pihak yang meragukan komitmen Bea dan Cukai dalam usaha penegakan hukum padahal, menurutnya, tanpa banyak publikasi instansinya terus melakukan penegakan hukum terhadap para penyelundup. Eddy juga mengingatkan, para pelaku aksi penyelundupan bisa dijerat dengan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya, Eddy tidak menjelaskan sejauh mana statistik penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan di tanah air.

Sehingga sulit disimpulkan bahwa UU tersebut benar-benar ampuh sebagai senjata

pamungkas instansi Bea dan Cukai untuk membuat para penyelundup menjadi jera.

Yang penting, jelas orang pertama di Bea dan Cukai itu diplomatis, jajarannya melihat tingkat kesalahan dan urgensi penggunaan UU itu. Sesuai dengan instruksi Presiden SBY, melalui delapan langkah pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks pembayaran pajak dan cukai, maka semua instrumen yang ada dimungkinkan diberlakukan.

“Sebagai terapi jera bagi pelaku lainnya sekaligus *warning* bagi siapa pun yang ingin coba-coba melakukan aksi penyelundupan,” ujarnya.

Pada bagian lain, Eddy Abdurrahman mengatakan, hal terpenting yang menjadi prioritas kerja instansinya adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara agar sesuai dengan target yang dicanangkan.

Untuk itu, tidak ada cara lain selain mengoptimalkan penerimaan dan mengoptimalkan pelayanan. Sebagai pelayan publik, sambungnya, Bea dan Cukai berusaha memberikan yang terbaik meski untuk mewujudkan itu perlu waktu dan kerja keras.

Kepada jajarannya, Eddy menekankan tiga tugas utama Bea dan Cukai: memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya, memberantas aksi penyelundupan, dan memberikan kontribusi penerimaan bagi negara sebesar-besarnya sesuai yang diprogramkan.

Secara terpisah, Direktur Pencegahan dan Penyidikan (P2) Ditjen Bea dan Cukai, Sofyan Permana, berkomentar bahwa salah satu kontribusi konkret Bea dan Cukai dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, adalah dengan menindak tegas tanpa pandang bulu atas berbagai kasus pelanggaran, baik pemalsuan dokumen maupun penyelundupan barang.

“Ini sudah komitmen kami untuk mengimplementasikannya secara konsisten di lapangan,” imbuh Sofyan.

Meski dengan sarana yang serbaterbatas dalam memburu para penyelundup, baik dari segi armada kapal maupun dari aspek sarana penunjang lainnya, dibanding cakupan tanggung jawab yang diemban sangat berat karena menyangkut bentangan wilayah meliputi ribuan pulau dan berbagai pelabuhan, alam maupun buatan, Bea dan Cukai menjadikan itu sebagai sebuah tantangan.

“Saya mengharapkan kalangan eksportir dan importir untuk taat dan patuh terhadap aturan untuk kepentingan bersama, dan jangan sekali-kali memberi peluang atau berkolusi dengan petugas untuk melakukan pelanggaran.” ■ **RF**

Keterpurukan nilai tukar rupiah dimanfaatkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perdagangan, Departemen Perdagangan (Depdag), untuk mendorong eksportir meningkatkan volume ekspor guna memacu kenaikan perolehan devisa.

Kepala Balitbang Perdagangan Depdag, Erwidodo, mengatakan, apresiasi dolar AS terhadap rupiah merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan ekspor di semua komoditas andalan Indonesia. Momentum ini harus dicermati dan dimanfaatkan betul oleh kalangan eksportir karena terjadinya cuma sesaat.

Erwidodo menjelaskan, Depdag berupaya meningkatkan ekspor semua komoditas unggulan bukan hanya pada produk pertanian saja. Penambahan kapasitas ekspor semua komoditas perlu segera dilakukan, termasuk di dalamnya melakukan investasi untuk menambah kapasitas, sebab jika tidak ditingkatkan apresiasi dolar AS akan sia-sia saja.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Depdag, Diah Maulida, menyebutkan pula hal yang sama bahwa Depdag akan meningkatkan ekspor produk primer pertanian. “*Natural base product* itu kan tidak ada *import contain*-nya, jadi ya akan terus ditingkatkan ekspornya,” ujar Diah, kepada *Investor Daily* (3-4/9).

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Depdag, Agus Tjahjono, mengatakan Depdag akan berkoordinasi dengan Departemen Pertanian untuk meningkatkan mutu produk pertanian yang akan diekspor.

Kata Agus, selisih nilai tukar dollar AS terhadap rupiah pasti berpengaruh karena *gain*-nya akan lebih tinggi. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggenjot ekspor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ekspor nonmigas Juli 2005 mencapai 5,42 miliar dolar AS, naik 3,81% dibanding bulan sebelumnya. Total nilai ekspor Januari-Juli 2005 juga mengalami kenaikan, besarnya 27,69% dibanding tahun sebelumnya.

Dilihat per komoditas, selama Juli itu ekspor lemak dan minyak hewan atau nabati naik menjadi 222,9 juta dolar AS, sedangkan karet dan barang dari karet turun menjadi 83,5 juta dolar AS.

Amerika Serikat adalah tujuan terbesar ekspor Indonesia Juli 2005, mencapai 796,8 juta dolar AS, disusul Jepang 780,2 juta dolar AS, dan Singapura 545,1 juta dolar AS. Ketiga negara menyumbang kontribusi ekspor hingga 37,33%. ■ **HT**

Menyalakan Sebuah Sumbu

Perdana Menteri Junichiro Koizumi ingin menghancurkan partainya sendiri, menjauhkannya dari hubungan kroni dan kelompok kepentingan.

Pada akhirnya tertumpu pada sebuah peristiwa yang hampir mustahil antara dua pemimpin paling berkuasa di Jepang. Malam 6 Agustus, Yoshiro Mori, pemimpin senior parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, mengenakan pakaian musim panas, bertandang ke kediaman Perdana Menteri Junichiro Koizumi untuk berembuk. Kedua pemimpin itu punya masalah sangat penting untuk dibicarakan—terutama, apakah Majelis Tinggi, Diet, akan menyetujui undang-undang paling genting, privatisasi Jawatan Pos Jepang, di mana pembaruan yang diumumkan Koizumi telah menjadi masalah yang mengguncang pemerintahannya.

“Mori, seorang bekas perdana menteri, membawa berita buruk,” tulis majalah *Newsweek* dalam laporan sampul berjudul *Reformasi atau Mati* (22/8). Suara-suara bukan itu, jelas Mori, dan dia membujuk Koizumi melepas ancamannya untuk menyelenggarakan pemilihan umum pengunci bilamana rancangan undang-undang privatisasi tersebut tidak disetujui. Tetapi Koizumi punya alasan sendiri. Jika para anggota perlemen tidak bisa membuatnya terjadi, katanya, dia tidak punya pilihan kecuali menyodorkannya kepada para pemilih.

“Anda lebih dari orang aneh!” keluh Mori. “Itulah saya dan saya terpaksa melakukannya,” jawab Koizumi. Kemudian Mori mengadu kepada pers bahwa perdana menteri yang masih jejak tersebut, di dalam pertemuan mereka, menunjukkan keramahan tanpa basa-basi, menyuguhkan: “bir kaleng, ikan salmon dan keju hangat.”

Ambil atau tinggalkan: itulah pesan Koizumi bagi “kekuatan penentang” sebutan yang ditujukan pada kelompok konservatif, sebagaimana diperkirakan, terus menghadang rencananya untuk membenah Jawatan Pos Jepang—dinilai para ahli akan membantu membangkitkan kembali ekonomi negeri itu untuk jangka panjang.

Dua hari setelah pertemuannya dengan Mori, para anggota Majelis Tinggi menolak RUU-nya dengan pemungutan suara 125 lawan 108. Suara yang menentang, termasuk 22 anggota partai dan bekas menteri Koizumi sendiri. Kemudian Koizumi membubarkan Majelis Rendah, melicinkan jalan bagi apa yang disebut, Pemilu yang menentukan, 11 September. Yang dipertaruhkan lebih dari nasib jawatan pos milik pemerintah



tersebut. Jika kekuatan pro-reformasi Koizumi menang, hasilnya bisa jadi sebuah tim LDP yang bersih kroni politik dan kelompok kepentingan. Jika dia kalah, kekalahanannya hampir pasti menandai penyusunan kembali kekuatan politik Jepang yang fundamental: berakhirnya hegemoni LDP selama setengah abad di dalam peta politik—di mana partai tersebut sedang bersiap-siap untuk merayakan ulang tahunnya yang ke 50.

“Ini bisa menjadi awal yang nyata bagi berakhirnya dominasi LDP,” kata Masayuki Tadokoro dari Keio Universitas, kepada *Newsweek*. “Seperti adanya sekarang, telah jelas bahwa pengawal tua akan berakhir.”

Kematian LDP telah diramalkan sebelumnya. Tetapi saat ini semuanya sangat berbeda. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam periode pasca perang, ada penantang kuat yang bersiap-siap menantang LDP dikandungnya—Partai Demokratik Jepang (DPJ) yang para anggotanya di Diet bergabung dengan para dinosaurus LDP untuk mementahkan RUU tersebut. Menteri Lingkungan Yuriko Koike, seorang loyalis Koizumi yang akan ikut di dalam pemilihan umum, mengatakan bahwa pemilihan tersebut akan merupakan ujian menentukan “apakah Jepang meninggalkan reformasi atau meneruskan proses tersebut.”

Koizumi, dalam banyak hal, seorang pemimpin revolusioner, Boris Yeltsinnya Jepang—bertekad untuk merongrong kebiasaan buruk partainya sendiri dan pengakuan khusus terhadap kekuasaan. Sungguh, dia sering dituding bahwa salah satu tujuan utamanya adalah “penghancuran LDP—tekad yang dia tegaskan kembali ketika membubarkan Majelis Rendah.■

(*Newsweek-SH*)



Adamczyk bermain sebagai Paus.

Paus di Layar Kaca

ROMA: Bagaimana Anda mengalihkan kehidupan Paus Johannes Paulus II – aktor, musuh Nazi dan komunis, sasaran pembunuhan, ikon dunia, pemimpin spiritual bagi lebih dari satu miliar orang – ke sebuah film televisi? Piotr Adamczyk menemukan dongeng Polandia yang memberitahunya untuk melukis Tuhan, tetapi selama sebulan tak pernah menyentuh kuas untuk menggores lukisan di kanvas.

“Tuhan datang dalam mimpi saya dan mengatakan, ‘Jangan lukis saya di lututmu,’” kata Adamczyk.

“Lukislah saya bagus-bagus.” Dia faham, sebagai seorang aktor yang menggambarkan Karol Wojtyla muda di saluran Hallmark, “Seorang yang menjadi Paus (A Man Who Became Pope).” Tayangan itu untuk memenuhi kebutuhan publik Amerika empat bulan setelah pemakaman Paus.

CBS belum lama ini memulai shooting di Cracow. Film serial televisi, Tak Ada Ketakutan: Kehidupan Paus Johannes Paulus II (Have No Fear: The Life of John Paul II), juga sedang digarap oleh ABC. ■

(Newsweek-SH)

FLU BURUNG KE BARAT

DEN HAAG: Flu burung mengguncang Eropa pekan lalu. Virus H5N1 yang telah membunuh 57 dari 112 orang yang diserangnya di Asia sejak akhir 2003, dan mengakibatkan kerusakan dan kematian 150 juta ekor unggas, muncul di Rusia dan Kazakhstan. Para penguasa Finlandia mengatakan serangan virus tersebut telah membunuh seekor anjing laut di sebuah kota pantai utara.



Penemuan-penemuan tersebut menimbulkan kecemasan bahwa virus tersebut bisa menyerang industri telur dan ayam potong Uni Eropa yang bernilai 27 miliar dolar, dan juga bisa beralih ke manusia.

Para pejabat pertanian di Negeri Belanda memerintahkan para petani untuk mengurung lima sampai enam juta ekor babi mereka. Para dokter khewan dari Uni Eropa yang beranggotakan 25 negara menyatakan keceemasan yang sangat serius, tetapi menghentikan sementara larangan umum terhadap unggas berada di udara bebas, mengingatkan burung-burung yang berimigrasi bisa menyebarkan virus pada daerah-daerah terpencil atau dataran rendah Uni Eropa. ■ (Time-SH)

“Maafkan Saya”

WASHINGTON: Kamar mayat ditata seperti kantor seorang dokter. Para anggota keluarga dan orang-orang tercinta dari 33 prajurit yang tewas di Irak atau Afganistan diundang ke sebuah ruang tunggu yang luas di Fort Bragg, N.C. Selama tiga jam mereka mengitari lima kamar khusus, di mana mereka bertemu dengan Presiden George W. Bush, didampingi oleh dua anggota dinas rahasia dan seorang fotografer. Karena dindingnya tipis, para keluarga yang sedang menunggu giliran dapat mendengar tangis dari dalam.

Presiden Bush tersenyum, tetapi matanya merah sembab dan dia tampak sangat sedih ketika dia menyalami janda Crystal Owen, seorang guru, yang kehilangan suaminya di Irak. “Katakan pada saya tentang

Mike,” sergapnya. “Saya tak ingin kematian suami saya sia-sia,” katanya kepada Bush.

Presiden Bush berulang kali meminta maaf atas kematian suaminya. Tatkala Owen mulai menangis, Bush memegang tangannya. “Jangan cemas, jangan cemas,” katanya, meskipun suaranya yang parau menyatakan bahwa dia sendiri sangat cemas. Kemudian sang presiden dan janda itu saling berpelukan. “Rasanya saya menganggapnya sebagai ayah,” kata kenang Owen kepada *Newsweek*. ■ SH



Haiti yang Kacau-balau

HAITI: Penggulingan Presiden Jean-Bertrand Aristide yang didukung AS awal tahun 2004 diduga mengarahkan negeri Karibia tersebut menuju jalan demokrasi dan stabilitas. Namun di bawah pasukan kecil pemelihara perdamaian PBB dan pemerintahan sementara yang tidak efisien, negara paling miskin yang berkiblat ke barat sedang menuju ke hukum rimba.



Akhir tahun lalu, beberapa polisi dipanggil kepalanya di dalam apa yang disebut sebagai “Operasi Bagdad.” Kekerasan yang bermotif politik itu telah menelan 700 nyawa sejak September 2004. Sejak Maret, terjadi tak kurang dari 450 kasus penculikan.

“Telah terjadi tahun yang hilang di Haiti,” kata Daniel Erikson dari lembaga pemikir American Dialogue yang berbasis di Washington. Dan keputusan pekan lalu untuk menangguhkan pemilihan kotapraja agar negeri itu dapat menyiapkan sebaik mungkin pemilihan presiden bulan November hampir menyapu rasa optimisme.

“Melangkah maju tanpa mendirikan partai-partai (di tingkat lokal),” kata Erikson,

“Anda terbang dalam gelap.” ■ (Newsweek-SH).

GARMEN CHINA MEMBANJIRI EROPA

PARIS: Kembali dari liburan tidak selalu bisa santai, tetapi Peter Mandelson merasa sedikit tidak enak. Komisioner Perdagangan Uni Eropa itu kembali bekerja pekan lalu, menemukan 47 juta sweater buatan China, 17 juta pasang kaos kaki pria, 6 juta T-shirt dan lebih dari 8 juta BH yang tersimpan di gudang-gudang di seluruh Eropa dan para grosir di benua tersebut membuatnya pusing.

Tumpukan pakaian tersebut merupakan hasil dari perjalanan Mandelson Juni lalu ke Beijing untuk membatasi ekspor ekspor tekstil China ke Uni Eropa. Saat itu, industri tekstil Eropa, didukung oleh pemerintah Prancis,



Spanyol dan yang lain, berteriak meminta perlindungan dari banjir garmen China yang berharga murah, menyusul berakhirnya sistem kuota internasional Desember lalu. Para grosir Eropa sangat bergantung pada China sebagai sumber utama barang-barang pakaian. ■

(Time-SH)

Rebana Damai dari PASAI

Tradisi Aceh yang sempat dipasung sejak diterapkannya DOM kini bangkit kembali. Perlu regenerasi.



Pagi itu, ratusan orang berdiri berjajar di pinggir jalan menyaksikan iring-iringan truk dengan para penabuh rebana besar.

'Si Rifa'i dari Pasai' yang menghilang selama satu generasi kini kembali unjuk gigi.

Tradisi memang tidak akan pernah mati. Seperti dilaporkan harian *Waspada*, 7 Agustus 2005, menyongsong perdamaian pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Swedia, maka dilaksanakan penabuhan *rapa'i pasee* – rebana raksasa khas Aceh – selama 24 jam.

Sepuluh truk bergerak membawa 288 orang penabuh rebana khas daerah Pasai itu. Masing-masing menabuh sebuah rebana besar berdiameter 80-110 sentimeter dan berat 60 kilogram. Rutenya dari Banda Aceh sampai Peureulak, 7-8 Agustus.

Ketika pawai itu dilakukan, banyak yang mengaku baru mengetahui apa itu *rapa'i pasee*. Jangankan orang dari daerah lain, anak Aceh yang lahir pasca DOM pun mengaku baru melihatnya. Tradisi ini sempat menghilang sejak Daerah Operasi Militer diberlakukan tahun 1998. Sebab, lokasi pertunjukan *rapa'i pasee* yang biasanya dipertandingan se-

lama pesta panen (*uroh*) di tengah sawah, berubah menjadi lokasi pertempuran TNI dengan GAM.

Tradisi rebana besar ini masuk bersamaan dengan masuknya ajaran Islam di Samudra Pasai pada abad ke-8. Demikian ulasan majalah *Tempo*, 21 Agustus 2005. Di masa itu, ada dua ulama terkenal yakni Syekh Abdul Kadir Jailani dan Syekh Ahmad Rifa'i dari Guejarat. Rifa'i membuat rebana ini dengan tujuan mengumpulkan orang ketika menyebarkan agama Islam.

Suara rebana bertalu-talu berhasil menarik orang untuk berkumpul. Ketika rebana berbunyi, biasanya orang pun akan

berkata, "Itu si Rifa'i dari Pasai." Orang Aceh pun akhirnya menyebut tradisi menabuh rebana itu sebagai *rapa'i pasee*.

Karena bentuknya besar, maka seringkali orang pun menyebutnya gendang. Pembuatannya sangat sakral, didahului upacara meminta izin kepada pohon yang akan ditebang (biasanya tualang atau merbau). Kulitnya pun harus diambil dari sapi berumur 5-6 tahun dengan berat 100 kilogram.

Di masa penjajahan Belanda, *rapa'i pasee* bahkan berguna bagi perjuangan. Irama gendang menjadi sandi. Bunyinya yang keras, bertalu-talu, bisa didengar sampai ke tempat lain di mana pejuang lain berada sebagai isyarat tertentu.

Kini, tradisi yang sempat hilang itu kembali diperdengarkan. Ada pepatah yang sungguh tepat tentang tradisi ini. "Kalau *rapa'i uroh* berbunyi, pertanda rentetan senjata akan berhenti." ■ RH



Napak Tilas LAKSAMANA BESAR

Berbagai acara dan upacara digelar memperingati 600 tahun pelayaran Cheng Ho.

Ribuan orang bak menyemut di jantung kota Semarang. Sebagian besar adalah warga keturunan Tionghoa. Ada kirab menuju Klenteng Sam Poo Kong menyusuri jalan-jalan protokol Semarang. Kemacetan tak bisa dihindari. Namun boleh dibilang tak ada yang keberatan. Toh kirab ritual itu pun sesuatu yang asyik ditonton.

Mereka rupanya memperingati tahun pelayaran Lak-

samana Cheng Ho yang ke-600. Cheng Ho adalah laksamana muslim dari Dinasti Ming yang tujuh kali mengunjungi Nusantara. Salah satu daerah yang sempat disinggahinya adalah Semarang.

Seperti bisa dilihat di halaman "Foto Pekan Ini" harian *Kompas*, 7 Agustus 2005, antusiasme warga Semarang kelihatan begitu kental. Foto-foto yang ditampilkan bernuansa merah, warna khas China,

memperlihatkan seorang anggota kirab yang berperan sebagai Laksamana Cheng Ho, lilin-lilin menyala di Klenteng Sam Poo Kong, penonton yang ikut berkostum tradisional China dan duplikat pasukan pengawal berkuda sang laksamana.

Sementara itu, *Gatra* (13 Agustus 2005) dan *Koran Tempo* (7 Agustus 2005), membahas topik ini lebih mendalam. Memaparkan bahwa peringatan pelayaran Cheng Ho tidak hanya menjadi tradisi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, melainkan juga di China dan negara-

negara yang pernah disinggahinya.

Yang jelas, setiap 4 Agustus (tanggal 30 bulan kenam penanggalan imlek) ribuan orang Tionghoa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan kirab. Tanggal itu dipercaya sebagai hari pendaratan laksamana yang nama muslimnya adalah Haji Mahmud.

Cheng Ho sangat dihormati di Indonesia karena berperan besar membawa budaya China ke Nusantara. Ia mengajarkan pengetahuan tentang sutra, keramik, pertanian, pertukangan, peternakan dan perikanan. Ia tidak hanya singgah di Semarang, melainkan juga di Gresik (Jawa Timur), Tanjung Priok (Jakarta), Cirebon dan Samudera Pasai (Aceh). ■ RH

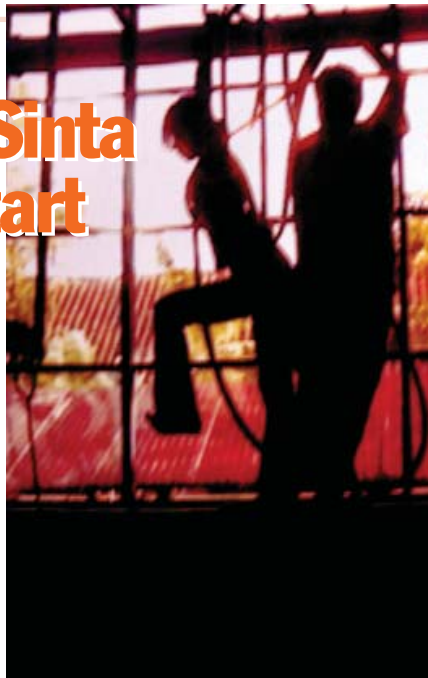
FILM

Mengundang Sinta ke Negeri Mozart

Beberapa orang bergelantungan di roda-roda katrol yang melintang sepanjang ruangan. Di antara mereka, tampak Eko Supriyanto sang koreografer.

Adegan di sebuah bangunan penjalagan sapi di kawasan Jagalan, Solo itu adalah persiapan membuat film musikal berjudul "Sinta Obong". Film ini akan disertakan dalam peringatan 250 tahun Mozart di Wina, Austria.

Sutradara kondang Garin Nugroho menjadi salah satu sineas dunia yang mendapat kehormatan diundang Peter Sellars, sutradara opera ternama untuk



ikut serta dalam peringatan tersebut.

Kisah utama film ini, seperti ditulis majalah *Tempo* edisi 14 Agustus 2005, merupakan representasi dari kisah klasik Ramayana tentang suami isteri bernama Setio dan Siti. Setio adalah Rama, Siti adalah Sinta dan tokoh Rudiro adalah Rahwana.

Setio diperankan oleh Miroto, seorang penari dari Yogya. Sedangkan Sinta diperankan oleh Artika Sari Devi, mantan Puteri Indonesia 2004. Eko Supriyanto sendiri berperan sebagai Rudiro dan penari handal Retno Maruti menjadi ibu Rahwana. Adegan peperangannya akan mengambil gaya *free dance Broadway*.

Untuk film ini, Garin mengajak perancang busana terkenal, seniman teater maupun perupa untuk ikut berpartisipasi. ■ RH

CANDI Mengekalkan Jejak Leluhur

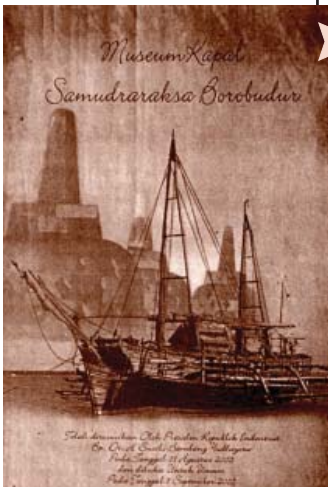
Setelah berlayar menyusuri jalur kayu manis (*The Cinnamon Route*) sejak 15 Agustus 2003 sampai 23 Februari 2004, kapal Samudraraksa kini berlabuh di museum yang diperuntukan khusus di kompleks wisata Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, (31/8), museum itu dinamai Museum Kapal Samudraraksa. Selain itu, dipentaskan pula sendratari Mahakarya Borobudur yang mengisahkan tentang pembangunan Candi Borobudur.

Kapal itu telah dibuat berdasarkan relief di dinding candi. Seorang mantan perwira Angkatan Laut Inggris, Philip Beale, mencetuskan ide untuk membuat kapal serupa dengan teknik tradisional.

Kapal berawak 15 orang ini berlayar menuju Afrika melalui Seychelles, Madagaskar, Afrika Selatan dan berakhir di pelabuhan Tema, Accra, Ghana.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, seperti dikutip harian *Republika*, Jumat, 26 Agustus 2005, berharap museum itu membangkitkan kembali semangat kemaritiman bangsa dan melestarikan sejarah bangsa. ■ RH



OPERA

Cerpen Modern dalam Opera Kuno

A kisah seorang pemuda Belanda bernama Van Steffen jatuh cinta pada gadis penjual patung bernama Ni Luh Rai. Bak petir menggelegar, Ni Luh Kompiang, ibu Luh Rai, menyatakan bahwa mereka kakak beradik.

Percintaan yang berakhir sedih itu dikisahkan dalam sebuah cerpen karya sastrawan Bali, Made Sanggra (79), yang ditulis tahun 1970-an. Majalah *Gatra* edisi 13 Agustus 2005 menulis tentang cerpen berjudul "Katemu Ring Tampaksiring" yang dipentaskan selama tiga jam dalam sebuah seni pertunjukan khas Bali yang disebut arja, oleh Geria Olah Kreativitas Seni (Geoks) pimpinan I Wayan Dibia.

Arja adalah opera Bali yang terdiri dari tari, drama dan nyanyian. Dalam sebuah pementasan, setiap tokoh melantunkan tembang sendiri sesuai dengan wataknya pada pemunculan pertamanya.

Seni pertunjukan ini diduga muncul pada 1775-1825, yang awalnya dimainkan para pria. Setelah berjaya sekitar setengah abad, 1920-1970-an, pemainnya didominasi kaum perempuan dan pementasannya pun semakin langka. Sempat bangkit antara 1994-2000 dengan para pemain pria dan melakoni cerita-cerita modern dan berunsur komedi. ■ RH



Idola Baru Indonesia

L antunan *winner song* "Semua Untuk Cinta," menjadi ungkapan kemenangan Michael Prabawa Mohede. Big Mike, demikian ia disapa selama mengikuti ajang *Indonesian Idol 2*. Akhirnya, pemuda berusia 22 tahun itu menjadi juara pertama pemilihan penyanyi yang audisinya diikuti ribuan orang dari seluruh Indonesia itu.

Ya. Seperti dilansir berbagai media massa cetak maupun elektronik, Mike memang berhasil mengalahkan ribuan orang dan menjadi salah satu dari 12 finalis *Indonesian Idol 2*. Keberun-

tungan masih di pihaknya ketika ia pun berhasil mengalahkan 11 rekannya dan menjadi idola baru Indonesia. Jumlah SMS yang masuk untuk Mike mengalahkan rivalnya, Judika Nalon Abadi Sihotang.

Harian *Indo Pos* edisi 14 Agustus menulis, sosok Mike kerap diidentikkan dengan pemenang *American Idol*, Ruben Studdart, yang sama-sama bersuara emas. Mike berhak membawa pulang sebuah mobil Hyundai Getz kuning dan sederet hadiah lainnya dari sponsor.

Diakuinya, seperti dikutip *Koran Tempo*, 21 Agustus 2005, sosoknya yang



bertinggi 170 cm dan berat 25 kg itu sempat membuatnya minder. Namun suara emasnya dan dukungan penggemarnya yang tergabung dalam Mike-niacs akhirnya membuatnya lebih percaya diri dan terbukti menjadi faktor pendorong kemenangannya. ■ RH

Penghargaan Untuk Deddy

K ali ini, giliran Deddy Mizwar naik panggung karena mendapat Lifetime Achievement Award. Seperti dilaporkan beberapa media massa, penghargaan itu diserahkan dalam acara SCTV Award "Kemilau 15 Tahun SCTV" di Jakarta Convention Center, Kamis malam, (25/8).

Seperti dikutip harian *Warta Kota*, Jumat, 26 Agustus 2005, Deddy Mizwar yang kini lebih banyak bermain di sinetron-sinetron bertema religius mengatakan ingin memanfaatkan pengalaman dan ilmunya di bidang film untuk orang banyak, agar lebih dekat dengan Tuhan.

Deddy merasa kebanyakan film-film yang dibintanginya dulu mengandung adegan yang tidak pantas dan berbau seks sehingga mungkin berdampak buruk bagi penonton. ■ RH



PEMENANG SCTV AWARDS 2005

- 1 **Aktris Ngetop:**
Agnes Monica
- 2 **Aktor Ngetop:**
Anjasmara
- 3 **Penyanyi Pop Ngetop:**
Krisdayanti
- 4 **Penyanyi Dangdut Ngetop:**
Ira Swara
- 5 **Pembawa Acara Ngetop:**
Eko Patrio
- 6 **Program Ngetop:**
Malin Kundang
- 7 **Iklan Ngetop:**
Pro XL versi Jam
- 8 **Lifetime Achievement Award:**
Deddy Mizwar
- 9 **Band Ngetop:**
Peter Pan

KONSER SLANK DITOLAK

B aru kali ini grup Slank ditolak manggung. Penghuni perumahan Gading Serpong, Tangerang, khawatir bakal terjadi kerusuhan di lingkungan tempat tinggalnya bila konser itu diselenggarakan.

Konser yang itu digelar tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-60. Ellipso Pro menggandeng pengembang Ambassador Gading Serpong untuk menggelar konser yang berjudul Terimakasih Indonesiaku di lahan seluas 6 hektar, yang bakal menampung 50.000 penonton di kawasan tersebut. Demikian harian *Surya*, 12 Agustus 2005 melaporkan. Konser ini juga menampilkan Shanty yang berkolaborasi dengan Slank.

Warga yang tidak setuju menggelar demo dan ramai-ramai menggelar spanduk di depan kantor pemasaran PT Ambassador. Menurut mereka, dari pihak pengembang tak ada jaminan keamanan untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

Menurut harian *Berita Kota*, 15 Agustus 2005, warga menyalahkan pengembang tidak bicarakan lebih dulu rencana konser itu dengan warga. Apalagi pengembang cuma mau bertanggung jawab terhadap berbagai kemungkinan di sekitar konser, bukan di seluruh perumahan.

Mengenai penolakan itu, Shanty maupun Slank tidak menanggapi dengan berlebihan. Bahkan Shanty lebih memikirkan jurus jitu untuk tampil maksimal di hadapan ribuan Slanker (penggemar Slank) yang menontonnya. ■ RH

Berpulanginya Sang Begawan

Dia guru bangsa yang pemikiran dan gagasannya sering memberi pencerahan, kendati juga sering mengundang perdebatan. Dia cendekiawan muslim yang negarawan.

Puluhan karangan bunga berjajar di pelataran kampus Universitas Paramadina, Jakarta. Para penumpang di mobil-mobil yang melintas di depan kampus menoleh. Terbaca di karangan-karangan bunga itu nama Nurcholish Madjid. Banyak yang tersentak dan tak mengira tokoh nasional itu telah tiada.

Semangatnya yang menyala, pemikirannya tentang nasionalisme dan pembaharuan Islam yang tak pernah surut, harus kalah oleh sakit yang dideritanya. Kesehatan Cak Nur, demikian ia disapa, terus menurun sejak menjalani transplantasi hati di China, Juli 2004.

Pernah bercita-cita menjadi masinis ketika masih kecil, Cak Nur dewasa sampai akhir hayatnya dikenal sebagai seorang cendekiawan dan bapak bangsa. Mengutip ucapan Ketua DPR Agung Laksono, Cak Nur adalah tokoh yang dari ucapan-ucapannya tidak pernah membuat orang lain menjadi gelisah, terpicu emosi, dan merasa dirugikan.

Sepanjang hayatnya, ia adalah negarawan yang tanpa pamrih. Berbagai gagasannya selalu segar dan tajam. Ketika

masa reformasi menjelang, Cak Nur termasuk orang yang mengkritik pemerintah Orde Baru. Justru karena ia mengutarakan kritiknya dengan santun, Presiden Soeharto mengundangnya ke Istana dan menawarinya masuk ke dalam jajaran kabinet *re-shuffle*.

Ketika itu Cak Nur, dengan argumentasi yang bisa diterima, menolak untuk duduk dalam pemerintahan. Karena itu, publik dan sahabat-sahabatnya terhenyak ketika pada April 2003 ia mencalonkan diri sebagai presiden dan ikut konvensi Partai Golkar, Juli 2004. Namun mereka tidak terkejut ketika tak lama kemudian ia mengundurkan diri gara-gara keharusan memberi dana kampanye sebagai Capres.

Ketika bangsa ini mengalami krisis multidimensional, Cak Nur dan bersama teman-temannya mendirikan Gerakan Jalan Lurus, untuk memberikan substansi kebangsaan Indonesia yang baru, baik dari sisi ekonomi maupun mental spiritual. Menurut Cak Nur kala itu, krisis yang dihadapi bangsa ini adalah krisis kepemimpinan.

Guru bangsa

Semua koran nasional menulis kepergian Cak Nur di halaman satu juga hampir semua mengulasnya di kolom opini.

Republika dan Media Indonesia, 30 Agustus 2005, bahkan mendedikasikan *headline*-nya, khusus mengenai Cak Nur.

Lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 26 Muharram 1358 (17 Maret 1939), Nurcholish kecil telah menghirup hawa pesantren sejak dini. Kultur pesantren semakin membentuknya setelah ia masuk Pesantren Darul Ulum,



Gontor, Jawa Timur. Di pesantren itu, seperti santri-santri lainnya, ia belajar kitab kuning dan bahasa Arab.

Laki-laki yang menguasai bahasa Arab, Inggris dan Perancis ini juga dikenal aktif dalam gerakan kemahasiswaan. Ia pernah menjabat Ketua Umum PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) selama dua periode berturut-turut, presiden pertama Permiat (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara), dan wakil Sekjen IIFSO (*International Islamic Federation of Students Organizations*).

Mengawali karirnya, Cak Nur yang mendapat gelar PhD dari Universitas Chicago (1984), menjadi dosen di IAIN Syarif Hidayatullah, almamaternya. Ia juga menjadi guru besar tamu di Universitas Montreal, Kanada. Terakhir, ia menjabat rektor Universitas Paramadina, Jakarta.

Menikah dengan Omi Komaria tahun 1969 di Madiun, Cak Nur dikaruniai dua anak, Nadia Madjid (35) dan Ahmad Mikail (31).

Meski gagasan-gagasannya tentang pembaruan Islam kerap dikecam karena berbau

sekuler dan plural, ia tetap diakui secara nasional sebagai cendekiawan *par excellant*. Ia pun dijuluki begawan dan guru bangsa.

Ketiadaannya tidak hanya disesali tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang semakin terbiasa dengan pemikirannya yang kontroversial namun esensial itu, tetapi juga oleh tokoh-tokoh lintas agama.

Nathan Setiabudi, mantan Ketua PGI, mengaku sangat kehilangan. Ia bersahabat dengan Cak Nur sejak sama-sama menjadi delegasi tokoh lintas agama dan berjuang menentang perang Irak. "Saya kaget dan sempat berteriak ketika mendengar ia meninggal," ujar Nathan sedih.

Banyak orang menghadiri pemakamannya, Selasa, (30/8), di Taman Pemakaman Kalibata. Setelah sebelumnya disemayamkan di kampus Paramadina dan dilayat Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kalla.

Tembakan salvo kehormatan mengantarkan Cak Nur ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Selamat jalan, Cak Nur. Beristirahatlah dalam damai. ■ RH/berbagai media nasional

Mothercare Buka Outlet Kedua di Indonesia

Jaringan toserba perlengkapan ibu dan anak eksklusif dari Inggris, Mothercare, membuka outlet kedua di Indonesia pada 23 Agustus 2005 yang berlokasi di Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan. Sedangkan outlet yang pertama dibuka di Mal Taman Angrek, Jakarta Barat. Dengan konsep *one stop shopping*, Mothercare menjanjikan para orangtua pengalaman belanja menyenangkan di bawah satu atap.

Produk yang ditawarkan antara lain produk bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita hingga anak usia 8 tahun. Rangkaian produk untuk ibu seperti pakaian hamil dan menyusui, perlengkapan menyusui serta pompa ASI. Rangkaian produk untuk bayi, balita dan anak



tersedia mulai dari pakaian, aksesoris, mainan, peralatan makan dan minum sampai perlengkapan tidur dan perabotan.

Pada setiap gerai disediakan layanan pemasangan *car seat* di dalam mobil dan servis pengepasan bra untuk wanita hamil. Selain itu, Mothercare mengklaim sebagai outlet pertama di Jakarta/Indonesia yang memiliki fasilitas ruang ganti bayi dan pelayanan *gift service* yang menyediakan serangkaian paket bingkisan untuk ibu dan bayi dengan harga bervariasi.

"Kualitas dan keamanan produk menjadi komitmen utama Mothercare dalam menyediakan produk bagi para konsumen.

Seluruh produk Mothercare telah memenuhi persyaratan keamanan produk dari Inggris," papar Christin Yaven, *marketing manager* PT Multitrend Indonesia, mitra lokal yang dipercaya mengelola Mothercare. "Mothercare akan memberikan orang tua pengalaman berbelanja yang menyenangkan karena seluruh produk yang dibutuhkan

berada dalam satu atap," tambahnya lagi.

Christin juga mengungkapkan, Mothercare menyadari sepenuhnya bahwa tidak semua anak bisa beruntung



mendapatkan produk Mothercare karena ketidakmampuan secara ekonomi. Karena itu, pihaknya ingin berbagi dengan mereka yang kurang beruntung tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan bingkisan berupa serangkaian produk, seperti pakaian dan toiletris kepada Panti Asuhan Pondok Si Boncel di Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang memiliki anak asuh usia balita. "Komitmen ini akan terus dilanjutkan di masa yang akan datang sebagai wujud kepedulian Mothercare di Indonesia," ungkap Christin.

Mothercare pertama kali didirikan di Inggris pada tahun 1961 dan telah mempunyai 241 gerai di Inggris, serta 174 gerai di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Menurut rencana, Mothercare akan membuka lima gerai di seluruh Indonesia pada tahun 2006. Setelah Taman Angrek dan PIM 2, outlet berikutnya akan dibuka di Kelapa Gading Mal bulan Oktober 2005. ■

ALAMAT :

Mothercare - Toserba
Perlengkapan Bayi
Mal Pondok Indah No. 247
Telp. (021) 7506891
Toko Online:
<http://www.mothercare.com/>